

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN PETANI DI KAWASAN INDUSTRI**
(Studi Kasus Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi)

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

SHELLY SALAMAH

1906016032

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan FISIP

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Shelly Salamah
NIM : 1906016032
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : **Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kawasan Industri (Studi Kasus Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi)**

Dengan ini telah saya setujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Maret 2023

Pembimbing



Solkhah Mufrikhah M.Si.
NIP. 198505102016012901

SKRIPSI

Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kawasan Industri (Studi Kasus Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi)

Disusun Oleh:

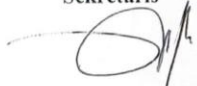
Shelly Salamah

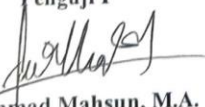
1906016032

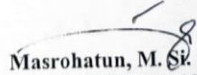
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 17 April 2023 dan dinyatakan lulus.

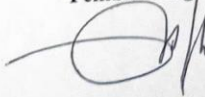
Susunan Dewan Penguji


Ketua
Dr. Tholikhathul Khoir M. Ag.
NIP. 197701202005011005

Sekretaris

Solkhah Mufrikhah, M. Si.
NIP. 198505102016012901

Penguji I

Muhammad Mahsun, M.A.
NIP. 198511182016011901

Penguji II

Masrohatun, M. Si.
NIP. 198806212018012001

Pembimbing

Solkhah Mufrikhah, M. Si.
NIP. 198505102016012901

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang di peroleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 17 Maret 2023
Tanda tangan



Shelly Salamah
1906016032

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah dengan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam sekaligus dengan rahmat dan hidayah-NYA. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak pula sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan curahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita menjadi salah satu yang mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti, Aamiin Aamiin ya rabbal alamin.

Penelitian skripsi yang berjudul **“Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kawasan Industri (Studi Kasus Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi)”** ini telah selesai dikerjakan sebagai pengajuan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penyusunan skripsi dilakukan dengan mengikuti prosedur penyusunan skripsi, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan proposal hingga penelitian dan skripsi ini dapat disusun hingga selesai. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki peneliti.

Peran keluarga, sahabat, dosen pembimbing dan berbagai pihak yang membantu peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sehingga pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Ibu Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. Nur Syamsudin, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Muhammad Mahsum, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Ibu Solkhah Mufrikhah, M. Si. selaku dosen pembimbing yang sekaligus dosen wali yang telah membimbing, membantu, serta bersedia meluangkan waktu untuk peneliti dari mulai proses pengajuan judul skripsi hingga penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo tercinta yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada peneliti selama berada di perkuliahan.
7. Seluruh Civitas Akademik dan Staff Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

8. Untuk subjek dalam penelitian skripsi ini yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, BPP Kecamatan Kedungwaringin, Kepala Desa Karangharum, Bendahara BUMDes Karangharum, Ketua Gapoktan Desa Karangharum, Para Petani dan Masyarakat Desa Karangharum yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian skripsi.
9. Kepada kedua orangtua peneliti tercinta, Ibu Ipah Masripah dan Bapak Uwo Saefullah yang senantiasa selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta kasih sayang yang luar biasa kepada peneliti, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Untuk diri saya sendiri, terima kasih telah berjuang sejauh ini. Terima kasih untuk selalu semangat, tidak mengeluh ataupun bersedih. Pokoknya semangat terus diri, teruslah belajar dan berkembang, jangan pernah menyerah dengan apapun yang terjadi. Hingga mencapai kesuksesan dunia dan akhirat yang kekal dan abadi.
11. Untuk adik peneliti tersayang Ahmad Fathony yang selalu mendoakan serta memberikan semangat kepada peneliti selama kuliah.
12. Untuk sahabat dan teman peneliti tersayang yaitu Erna Hadi, Esti, Sasha, Salsa, Kania, Nurul, Cindy, Fatah, Dony, Sarinah, Dea, dan Ibnu terima kasih telah memberikan semangat dan keceriaan kepada peneliti.
13. Untuk keluarga besar peneliti, teman-teman satu daerah, teman-teman KKN, Adik-Adik Karangkulon, teman-teman Ilmu Politik A angkatan 2019, dan teman-teman FISIP UIN Walisongo angkatan 2019 yang telah bersama-sama berbagi kisah suka duka selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
14. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak yang peneliti tidak bisa sebutkan satu persatu.

Peneliti berharap semoga pihak-pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan banyak kebaikan serta dapat menjadi amal jariyah untuk kehidupan di dunia maupu akhirat nanti. Dengan demikian besar harapan peneliti bahwa skripsi ini dapat memberikan ilmu serta manfaat untuk para pembaca dan peneliti sendiri. Selain itu, peneliti juga berharap kedepannya skripsi ini dapat dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

Wallahu waliyut taufiq, wassalam

Semarang, 17 Maret 2023

Penyusun



Shelly Salamah

NIM. 1906016032

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta yaitu Mamahku Ipah Masripah dan Bapakku Uwo Saepullah telah menjadi motivator terbaikku, yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang yang terhingga, yang selalu menuntun setiap langkah pendidikanku, dan selalu berdoa untuk keberhasilan dan kesuksesanku.

Selain itu, skripsi ini ku persembahkan juga untuk almamaterku tercinta Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

MOTTO

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.”

~ **QS Al Zalzalah: 7-8** ~

“Rasulullah bersabda: “Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat.”

~ **HR. Bukhari** ~

“Teruslah menabur kebaikan meskipun itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang namun pahala kebaikannya akan terus ada, Inshaallah”

~ **Ust. Hanan Attaki** ~

ABSTRAK

Desa Karangharum merupakan desa yang terlatak di Kabupaten Bekasi yang merupakan wilayah indutri terbesar di Asia Tenggara dengan UMK tertinggi ketiga di Indonesia, namun wilayah Desa Karangharum ini masih di dominasi oleh lahan persawahan padi dengan rata-rata mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani. Adanya kawasan industri sendiri banyak berdampak terhadap kesejahteraan petani, karena mengakibatkan fungsi peralihan lahan pertanian menjadi bangunan industri serta mengakibatkan terjadinya perpindahan ekonomi masyarakat yang semula pertanian menjadi industrial. Bila hal tersebut terus terjadi maka akan mengakibatkan terjadinya krisis pangan dan menurunnya tingkat kesejahteraan petani di Indonesia. Maka dari itu peneliti mengambil dua rumusan masalah yang pertama bagaimana peran pemerintah Desa Karangharum dalam meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan industri Kabupaten Bekasi, dan kedua bagaimana hambatan pemerintah Desa Karangharum dalam meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan industri Kabupaten Bekasi.

Penelitian menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008). Teori ini dipilih karena adanya kolaborasi antara Pemerintah Desa dengan pihak BUMDes dan Gapoktan dalam melakukan peranan untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Karangharum. Jenis penelitian pada skripsi ini ialah studi lapangan (*field research*), dengan metode kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dalam bentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data didapatkan melalui data primer yang bersumber dari hasil wawancara langsung dengan informan terkait dan data sekunder yang didapatkan secara tidak langsung yang berupa foto-foto maupun dokumen sebagai data pendukung untuk memperkuat penelitian ini. Objek dalam penelitian ini adalah petani Desa Karangharum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam bidang pertanian Pemerintah Desa Karangharum melakukan kolaborasi dengan pihak BUMDes dan Gapoktan. Kolaborasi tersebut menghasilkan peran-peran tersendiri dari setiap *stakeholder*, sehingga menciptakan program dari masing-masing pemangku kepentingan tersebut. Dimana Pemerintah Desa memiliki program PKTD (Padat Karya Tunai Desa), sedangkan BUMDes simpan pinjam, dan Gapoktan bantuan bibit, pupuk, serta penyuluhan pertanian yang dibantu oleh PPL. *Collaborative governance* yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan pihak BUMDes dan Gapoktan ini dapat dilihat dengan lima proses kolaborasi yaitu melalui dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Dimana proses kolaborasi tersebut dinilai belum optimal dilaksanakan, dikarenakan masih ada tumpang tindih kepentingan dan komunikasi yang tidak terarah. Walaupun sudah ada forum tatap muka rutin, namun kepercayaan antar *stakeholder* yang terkait belum terjalin satu sama lain masing-masing aktor cenderung berfikir individualistis, sedangkan dalam komitmen para pihak memiliki tujuan yang sama yaitu memajukan pertanian tetapi proses kolaborasi yang dilakukan hanya menguntungkan satu pihak. Dalam pemahaman bersama tidak berjalan semestinya karena masih adanya intansi yang terkait dalam melakukan program

maupun kegiatannya tidak memperhatikan program dari instansi lain. Dari proses kolaboratif tersebut mendapatkan hasil sementara bahwa peranan pemerintah tersebut sudah sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Karangharum, walaupun belum berjalan dengan maksimal. Sehingga dalam proses meningkatkan kesejahteraan petani ini pemerintah mempunyai tiga aspek hambatan yaitu aspek program Pemerintah Desa, aspek kondisi geografis, dan aspek Sumber Daya Manusia (SDM).

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Petani, Kesejahteraan, Kawasan Industri, Desa Karangharum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR ISTILAH	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II KERANGKA TEORI.....	22
A. Definisi <i>Collaborative Governance</i>	22
B. Model <i>Collaborative Governance</i>	25
C. Tujuan <i>Collaborative Governance</i>	39
BAB III GAMBARAN UMUM DESA KARANGHARUM.....	41
A. Geografis dan Demografis Desa Karangharum	41
B. Sosial Budaya Desa Karangharum.....	45

C. Profil Petani Desa Karangharum.....	47
BAB IV PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN BEKASI... 54	
A. Peran dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani	58
1. Peran Pemerintah Desa	59
2. Peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)	63
3. Peran GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani)	73
B. Proses Kolaborasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani.....	84
1. <i>Face to face dialogue</i> (Dialog Tatap Muka)	85
2. <i>Trust Building</i> (Membangun Kepercayaan).....	86
3. <i>Commitment to the process</i> (Komitmen Terhadap Proses).....	87
4. <i>Shared Understanding</i> (Pemahaman Bersama)	88
5. <i>Intermediate Outcomes</i> (Hasil Sementara)	89
BAB V HAMBATAN PEMERINTAH DESA KARANGHARUM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN BEKASI	91
A. Program Pemerintah Desa.....	94
1. Program PKTD (Padat Karya Tunai Desa).....	95
2. Program Simpan Pinjam	98
3. Program Pemberian Bibit, Pupuk, dan Penyuluhan Pertanian	99
B. Aspek Geografis.....	101
C. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM).....	103
BAB VI PENUTUP	108
A. KESIMPULAN.....	108
B. SARAN	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	142

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Informan dalam Penelitian Skripsi	16
Tabel 2	Jarak ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten/Kota Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kedungwaringin (km), 2021	41
Tabel 3	Statistik Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi pada tahun 2021	42
Tabel 4	Statistik Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Tahun 2021	42
Tabel 5	Mata Pencharian Masyarakat Desa Karangharum	43
Tabel 6	Sarana Pendidikan di Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi	44
Tabel 7	Statistik Penduduk Desa Karangharum Berdasarkan Agama Per tanggal 01-01-2023	45
Tabel 8	Tempat Ibadah Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin	45
Tabel 9	Data Kelompok Tani Di Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi	48
Tabel 10	Penghasilan Petani Di Desa Karangharum Berdasarkan Subjek Penelitian Periode Tanam Padi Bulan Juli-Oktober 2022	51
Tabel 11	Pengeluaran Rata-Rata Petani di Desa Karangharum	52
Tabel 12	Program Pemerintah Desa Karangharum dalam Bidang Pertanian	58
Tabel 13	Rencana Anggaran Belanja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harum Jaya) Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Tahun 2020	66
Tabel 14	Angsuran Dana Mingguan/Tenor BUMDes Harum Jaya	67
Tabel 15	Angsuran Dana Bulanan/Tenor BUMDes Harum Jaya	68
Tabel 16	Persyaratan Peminjaman Uang di BUMDes	69
Tabel 17	Bantuan yang didapatkan Petani dari Pemerintah Pusat	73
Tabel 18	Banyaknya Kejadian Bencana Alam dan Jenis Bencana Alam di Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi, 2021	100
Tabel 19	Keadaan Iklim di Kecamatan Kedungwaringin, 2021	101
Tabel 20	Prakiraan Serangan OPT Utama pada Tanaman Padi di Indonesia MT 2021	101
Tabel 21	Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non-Pertanian Menurut Tingkat Pendidikan 2020-2022	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Langkah – Langkah Analisis Data	18
Gambar 2	<i>Model of Collaborative Governance</i> (Ansell dan Gash, 2008)	25
Gambar 3	Peta Desa Karangharum	40
Gambar 4	Luas Lahan Persawahan Desa Karangharum	46
Gambar 5	Irigasi Pertanian Desa Karangharum	59
Gambar 6	Bagan Susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa “Harum Jaya” Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi	63
Gambar 7	Bagan Struktur Gapoktan “Karya Tani” Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi	72
Gambar 8	Saung Gubuk Lotin Desa Karangharum	79
Gambar 9	Bagan Proses Kolaborasi Pemerintah Desa dengan BUMDes dan Gapoktan Desa Karangharum	83
Gambar 10	Nilai Tukar Petani (NTP) (Juli 2021-Juli 2022)	91
Gambar 11	Peranan Nilai Impor Menurut Golongan Penggunaan Barang, Januari-Desember 2021 dan 2022	92
Gambar 12	Struktur Nilai Ekspor, Januari-Desember 2021 dan 2022	92
Gambar 13	Jumlah Petani di Indonesia	94
Gambar 14	Pintu Air Desa Karangharum	96
Gambar 15	Jumlah Petani Utama Menurut Kelompok Umur, 2018	105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pendoman Wawancara	118
Lampiran 2	Surat Pengantar Penelitian untuk Kesbangpol Kabupaten Bekasi	125
Lampiran 3	Surat pengantar penelitian untuk Kepala Desa Karangharum	126
Lampiran 4	Surat Pengantar penelitian untuk Bendahara BUMDes Karangharum	127
Lampiran 5	Surat Pengantar penelitian untuk Ketua Gapoktan Desa Karangharum	128
Lampiran 6	Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol Kabupaten Bekasi	129
Lampiran 7	Denah dan Papan Monografi Desa Karangharum	130
Lampiran 8	Potret Persawahan di Desa Karangharum	131
Lampiran 9	Dokumentasi Wawancara dengan Pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi Bapak Arif Risman tanggal 21 Februari 2023	132
Lampiran 10	Dokumentasi bersama Kelapa Desa dan Sekretaris Desa Karangharum tanggal 9 Januari 2023	133
Lampiran 11	Dokumentasi bersama bendahara BUMDes Karangharum tanggal 9 Januari 2023	134
Lampiran 12	Dokumen BUMDes Karangharum	135
Lampiran 13	Dokumen Anggaran Dana dan Simpan Pinjam BUMDes	136
Lampiran 14	Dokumentasi bersama Ketua Gapoktan dan BPP Kedungwaringin tanggal 9 Januari 2023	137
Lampiran 15	Dokumentasi dengan Para Petani dan Masyarakat Desa Karangharum tanggal 10-13 Januari 2023	138

DAFTAR ISTILAH

<i>BPP</i>	:	Balai Penyuluhan Pertanian.
<i>PPL</i>	:	Penyuluhan Pertanian Lapangan.
<i>POPT</i>	:	Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
<i>PKTD</i>	:	Padat Karya Tunai Desa.
<i>e-RDKK</i>	:	elektronik - Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok.
<i>UPTD</i>	:	Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang pelayanan umum.
<i>TKD</i>	:	Tanah Kas Desa.
<i>Musrembangdes</i>	:	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan Desa
<i>P3A</i>	:	Perkumpulan Petani Pemakai Air.
<i>Ip400</i>	:	Pola 4 kali tanam dan panen dalam setahun.
<i>Tandur</i>	:	Tanam mundur.
<i>Bujang</i>	:	Istilah untuk buruh tani.
<i>Gubuk Lotin</i>	:	tempat perkumpulan petani Desa Karangharum.
<i>Garapan</i>	:	Lahan persawahan yang diolah atau dikerjakan.
<i>Mantek</i>	:	Sumur galian untuk lahan persawahan di Karangharum.
<i>Ngrambet</i>	:	Kegiatan pembersihan rerumputan yang mengganggu pertumbuhan tanaman padi.
<i>Nyeblok</i>	:	Sistem dimana pemilik lahan sawah akan meminta warga lain yang tak memiliki sawah untuk ikut menanam di lahan sawah pemilik.
<i>Nyelang</i>	:	Meminjam.
<i>Liliuran</i>	:	Tradisi saling membantu seseorang yang sedang mempunyai beban pekerjaan yang cukup berat.
<i>Kampil</i>	:	Ialah istilah untuk karung plastik 5kg dalam pertanian Desa Karangharum.
<i>Bebelokan</i>	:	Kotor-Kotoran.
<i>Tengkulak</i>	:	Pedagang perantara yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama.
<i>Gabah</i>	:	Butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit

- Bala*** : Penuh rumput atau sampah sehingga terlihat tidak bersih.
- Melek*** : Dapat melihat.
- Calo*** : Orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah.
- Nyempret*** : Kegiatan kegiatan dalam budidaya tanaman padi yang bertujuan untuk memberikan asupan unsur hara mikro dan untuk mengendalikan hama dan penyakit.
- Ngarit*** : Proses pemotong tanaman padi.
- Pestisida*** : Merupakan racun kimia yang berfungsi untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman (OPT).
- Insektisida*** : Salah satu jenis pestisida yang diperuntukan khusus mengendalikan hama jenis serangga. Contohnya walang sangit, lembing, wereng, dan lain-lain.
- Fungisida*** : Salah satu jenis pestisida yang diperuntukan khusus pembasmi jamur, seperti blas pada padi.
- Herbisida*** : Salah satu jenis pestisida yang diperuntukan khusus dalam mengendalikan hama golongan gulma (Jenis rumput).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan industri menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang kawasan industri diartikan sebagai tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Sehingga adanya kawasan industri merupakan hal yang harus diadakan, mengingat jumlah angkatan kerja banyak dan semakin meningkat, sehingga industri tenaga kerja akan banyak terserap baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan pembangunan industri dapat terbuka bidang-bidang usaha lainnya seperti berbagai kegiatan dalam sektor jasa (Nur, 2007). Kabupaten Bekasi sendiri merupakan salah satu kawasan industri yang berada di Provinsi Jawa Barat, yang letaknya tidak jauh dari Ibukota Jakarta. Menurut beberapa artikel salah satunya *kompas.com* yang menyatakan bahwa Kabupaten Bekasi merupakan wilayah industri tersebut di Asia Tenggara yang pusatnya berada di Cikarang Tenggara (Ariefana Pebriansyah, 2021).

Hal yang menjadikan Kabupaten Bekasi menjadi kawasan industri, dikarenakan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sudah tidak memungkinkan lagi pembangunan industri, karena lahan terbuka di wilayah ini sudah sangat terbatas. Oleh karena itulah wilayah yang ada di sekitar Jakarta seperti Bekasi, Tangerang, Cilegon dijadikan sebagai wilayah untuk pengembangan industri. Dengan industri yang dikembangkan di wilayah sekitar Jakarta, maka penduduk yang ingin masuk kota Jakarta dari berbagai pesolok daerah-daerah lain di Indonesia dapat tersalurkan pada daerah sekitar kota Jakarta tersebut. Sehingga urbanisasi untuk masuk ke kota Jakarta dapat berkurang. Terdapat 2000 perusahaan yang beroperasi Kabupaten Bekasi, dengan beberapa kawasan industri yaitu kawasan industri MM2100 (Megalopolis Manunggal 2100), kawasan industri JABABEKA I dan JABABEKA II, kawasan industri EJIP (East Jakarta Industrial Park), kawasan industri HYUNDAI, kawasan industri PANASONIC GOBEL, kawasan industri BIIE (Bekasi International Industrial Estate), kawasan industri SHINTA GROUP, kawasan industri DELTA SILICON I, DELTA SILICON

II, kawasan industri GIIC (Greenland International Industrial Center), dan DELTA MAS (Yulianti, 2017).

Selain itu, pada masa kerajaan Tarumanegara di abad 5 Masehi Kabupaten Bekasi diketahui sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Barat, namun di tahun 1992 mulai dikembangkan menjadi kawasan industri hingga sekarang. Secara fisiografis wilayah Kabupaten Bekasi merupakan wilayah yang berada pada zona dengan topografinya yang datar. Sebagian besar keadaan tanahnya merupakan tanah alluvial yang subur untuk daerah pertanian. Oleh karena itu wilayah Kabupaten Bekasi juga merupakan wilayah pertanian bersama dengan wilayah Kerawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon sebagai andalan Jawa Barat dalam produksi padi. Sebagai daerah pertanian wilayah Kabupaten Bekasi selain ditunjang oleh kondisi iklim dengan curah hujan yang tinggi yaitu berkisar antara 2.000–2.500 mm/tahun juga sudah dilengkapi dengan saluran irigasi baik saluran primer, sekunder sampai tersier (Nur, 2007). Sehingga saat ini pun Kabupaten Bekasi berada pada peringkat ke-7 dalam kontribusi padi di Jawa Barat, yang membuktikan bahwa di tengah kawasan industri yang terus berkembang, Kabupaten Bekasi tetap bisa mempertahankan lahan pertanian (tirtabhagasasi.co.id, 2023).

Namun, adanya kawasan industri ini memiliki dampak yang cukup berpengaruh untuk lahan pertanian. Ada dua permasalahan utama kawasan industri terhadap pertanian, yaitu alih fungsi lahan dan perpindahan ekonomi masyarakat. Bila dilihat dari permasalahan pertama yaitu alih fungsi lahan dari data BPS (Badan Pusat Statistik) yang menunjukkan tahun 2014 Kabupaten Bekasi memiliki luas lahan sawah 51.961 Ha, dan menyusut menjadi 51.797 Ha di tahun 2015, begitupun tahun 2016 menjadi 50.857 Ha, dan di tahun 2017 menjadi 48.608, hingga di tahun 2018 menjadi 42.771 Ha. Data tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penyusutan lahan pertanian di Kabupaten Bekasi di setiap tahunnya. (BPS Kabupaten Bekasi, 2017). Sedangkan dari permasalahan kedua perpindahan ekonomi masyarakat ini ditunjukkan dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten) Bekasi tertinggi ketiga di Indonesia dengan nilai sebesar Rp5.137.575 perbulan, ini jauh lebih besar dengan pendapatan maksimal perhektar rata-rata petani konvensional di Kabupaten Bekasi yaitu sebesar Rp28.118.602 yang dibagi 6 bulan. Dikarenakan rata-rata saat ini petani di Kabupaten Bekasi menanam padi satu tahun 2 kali, sehingga penghasilan yang diperoleh dibagi untuk 6 bulan sekali (Ray Samwal Alfariqi,

2021). Selain itu, sumbangan pertanian pada PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia terus menghadapi degradasi, lain halnya dengan bidang industri yang terus mendapat peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan angka sebaran serta laju pertumbuhan PDB Indonesia pada Triwulan II-2020, industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 19,87% sedangkan sektor pertanian, perikanan, serta kehutanan menunjukkan nilai sebesar 15,46% (masterplandes.com, 2021). Badan Pusat Statistik (BPS) juga melaporkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada bulan Juli 2022 sebesar 104,25 atau turun 1,61 persen. Penurunan NTP disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani (It) yang turun sebesar 1,04 persen sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) meningkat sebesar 0,58 persen (BPS, 2022).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa alih fungsi lahan dan perpindahan ekonomi masyarakat ini akan berdampak negatif terhadap ekosistem pertanian. Sehingga dampaknya akan menimbulkan potensi berkurangnya lahan untuk produksi padi dan berkurangnya tenaga kerja petani yang dapat mengancam ketahanan pangan. Sehingga meningkatkan kesejahteraan petani merupakan hal yang penting, yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengendalikan pertanian agar seimbang. Dimana peningkatan kesejahteraan ini sesuai dengan yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan di dalam Pancasila yaitu sila kelima (Hutauruk, 2021). Sehingga kesejahteraan ini diartikan dalam UU No. 11 tahun 2009 sebagai suatu keadaan dimana sudah tercukupinya kepentingan material, spiritual, serta sosial masyarakat untuk hidup dengan cukup dan dapat mampu meningkatkan diri untuk melakukan fungsi dan kewajiban sosialnya (Sodiq, 2015).

Kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan oleh pemerintah lewat peranannya. Peran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat sangat sentral. Peran tersebut dapat dimulai dari lingkup pemerintahan yang lebih rendah yaitu pemerintahan pada tingkat desa. Seperti di Desa Karangharum yang merupakan salah satu dari tujuh desa yang berada di Kabupaten Bekasi. Desa Karangharum memiliki luas wilayah sebesar 3.39 km², yang masih didominasi oleh lahan pertanian, yaitu pertanian padi yang menghasilkan beras. Pembangunan ekonomi di desa ini masih berada di tahap berkembang dengan rata-rata pencaharian masyarakatnya adalah petani (BPS, 2019). Masih didominasinya Desa Karangharum oleh lahan pertanian seharusnya menjadikan kesejahteraan petani adalah hal yang utama. Dikarenakan padi merupakan

makanan pokok yang memenuhi 56-80% kebutuhan kalori penduduk di Indonesia (Syahri dan Somantri, 2016). Dengan lokasi Desa Karangharum yang berada di wilayah industri membuat pertanian seakan terabaikan, sehingga banyak desa-desa di sekitar Desa Karangharum seperti di Desa Karang Sambung yang sudah berdiri dua PT (Perseroan Terbatas) besar yaitu PT Mulia Prima Packindo (MPP) dan PT Platinum Cermics Industry yang menunjukkan telah terjadi fungsi peralihan lahan. Maka dengan masih didominasinya lahan pertanian di Desa Karangharum ini harus dipertahankan salah satunya dengan mensejahterakan petani agar pertanian ini tidak beralih ke sektor industri (Natawidjaja, 2007).

Peranan Pemerintah Desa Karangharum dalam meningkatkan kesejahteraan petani dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan dana desa. Dibantu oleh perangkat desa yaitu BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Dimana Pemerintah Desa memiliki program PKTD (Padat Karya Tunai Desa) yaitu pembersihan saluran irigasi untuk mengairi lahan persawahan dengan mengeluarkan dana sebesar 20 juta. Selanjutnya BUMDes mendapatkan dana dari kas Desa Karangharum sebesar 50 juta rupiah pada tahun 2019 yang semuanya digunakan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. Pihak BUMDes Karangharum menyatakan memiliki program untuk pertanian, berupa simpan pinjam sekaligus penyedia alat untuk pertanian seperti alat semprot hama; traktor untuk membajak sawah; mesin pemotong padi; mesin untuk menggiling padi; serta menyediakan lumbung sebagai penyimpan hasil pertanian, lalu program selanjutnya yaitu penyedia bahan-bahan untuk keperluan pertanian. Tujuan serta target yang diharapkan dari jaringan dan kemitraan yang dilakukan oleh BUMDes yaitu agar kegiatan yang dilaksanakan benar-benar terwujud dan tepat sasaran guna pemberdayaan ekonomi masyarakat agar lebih baik lagi. Sejak dimulai pembentukannya pada tahun 2019 BUMDes Karangharum telah berhasil membantu para petani desa mempermudah dalam menggarap lahannya.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) diartikan sebagai kumpulan dari sejumlah organisasi petani yang sedang menjalankan usaha agribisnis dengan asas solidaritas guna memperoleh pendapatan dan pengembangan produksi bagi petani dan para anggota tani (Pujiharto, 2010). Gapoktan menjadi arena bagi petani saling berhubungan dan berdiskusi tentang kondisi pertanian, dengan adanya Gapoktan akan memudahkan petani untuk mendapatkan informasi tentang pertanian. Gapoktan Desa Karangharum berdiri pada bulan

Desember 2018. Dengan adanya Gapoktan ini lebih memudahkan masyarakat dalam pengelolaan lahan pertanian. Dari mulai proses pembajakan tanah, penanaman benih padi, penyemprotan hama, hingga proses panen padi. Dimana proses tersebut terjadi serentak sehingga padi yang diproduksi di Desa Karangharum dapat bersamaan agar dapat menjaga kestabilan harga pasar. Proses pemasaran di Desa Karangharum sendiri masih menggunakan tengkulak, dimana masyarakat menjual hasil panennya kepada tengkulak, yang selanjutnya tengkulak tersebut mengumpulkan hasil panen dari masyarakat kemudian dijual kembali kepada perusahaan besar. Gapoktan Desa Karangharum saat ini sedang menyusun program baru yang sesuai dengan arahan dari Kementerian Pertanian yaitu IP400 yaitu model tanam dan panen empat kali dalam setahun, yang bertujuan meningkatkan produksi dan luas tanam demi kekuatan pangan nasional. Hal ini bertujuan supaya penghasilan pertanian meningkat sekaligus sebagai jalan keluar atas penurunan luas tanam akibat alih fungsi lahan. Dengan program tersebut Gapoktan mengklaim bahwa hasil panen padi Desa Karangharum akan terus meningkat setiap tahunnya, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Indikator untuk menentukan kesejahteraan petani sendiri terdapat tiga aspek yaitu perkembangan struktur pendapatan, perkembangan pengeluaran, dan perkembangan NTP (Nilai Tukar Petani) (Badan Pusat Statistik, 2022). Struktur Pendapatan Rumah Tangga Petani diartikan Mubyarto (1991) sebagai hasil pengurangan antara hasil penjualan dengan seluruh bayaran yang dikeluarkan mulai dari masa tanam hingga produk tersebut terletak ditangan konsumen akhir. Dalam tingkatan pemasukan, hingga petani wajib berupaya tingkatkan hasil-hasil penciptaan supaya mendapatkan kenaikan pemasukan dengan mengoptimalkan input-input aspek yang pengaruhi (Soekartawi, 1995). Sedangkan, struktur pengeluaran konsumsi rumah tangga petani menurut Suparmoko (2016) diartikan sebagai sikap warga membelanjakan sebagian dari hasil pemasukan untuk membeli sesuatu. Konsumsi sendiri adalah fungsi dari pemasukan yang sedia digunakan (*disposable income*), dengan kata lain guna mengkonsumsi membuktikan ikatan antara tingkatan pengeluaran mengkonsumsi dengan tingkatan pemasukan yang siap dibelanjakan (Sugianto, 2019). Selanjutnya, Nilai Tukar Petani (NTP) didefinisikan sebagai ukuran keahlian dalam menukar barang (produk) pertanian yang diperoleh petani dengan barang dan jasa yang diperlukan untuk pengeluaran dan kepentingan rumah tangga dalam menghasilkan produk pertanian. Oleh karena itu, NTP diperoleh dari perbandingan persentase indeks harga yang diterima petani (I_t) terhadap indeks harga yang

dibayar petani (Ib). It mencakup sektor tanaman pangan dan tanaman rakyat, sedangkan Ib mencakup kelompok pengeluaran rumah tangga dan biaya produksi serta penambahan barang modal (BPS, 2021).

Dengan demikian peranan dari Pemerintah Desa sangat berarti untuk kesejahteraan para petani, agar para petani dapat hidup sejahtera dan tetap dapat mempertahankan lahan pertanian mereka di tengah maraknya kawasan industri. Berdasarkan fenomena yang terjadi membuat peneliti ingin mengkaji peranan Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan industri dengan studi kasus di Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa Karangharum dalam meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan industri Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana hambatan Pemerintah Desa Karangharum dalam meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan industri Kabupaten Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui mengenai peran Pemerintah Desa Karangharum dalam meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan industri Kabupaten Bekasi. Dan untuk mengetahui hambatan Pemerintah Desa Karangharum dalam meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan industri Kabupaten Bekasi

2. Tujuan Subjektif

Untuk dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta informasi bagi peneliti tentang peran Pemerintah Desa Karangharum dalam meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan industri Kabupaten Bekasi.

Serta untuk menambah data secara rinci dan jelas untuk bahan dalam menulis karya ilmiah sebagai persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam program

studi Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa didapatkan dari skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat diharapkan mampu memberikan pemahaman dan informasi tentang peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan industri.
2. Bagi ilmu pengetahuan dapat digunakan sebagai sumber rujukan tambahan yang dapat digunakan sebagai perkembangan keilmuan, dan juga dapat dijadikan sebagai pijakan langkah pada riset berikutnya.
3. Bagi penulis penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman keilmuan bagi peneliti sendiri dan untuk yang membacanya. Dengan begitu penulis berharap penelitian ini akan lebih memudahkan siapa pun yang ini mengkaji dan menganalisis tentang peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan para petani di kawasan industri Kabupaten Bekasi.

E. Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan pustaka ini peneliti menganalisis beberapa hasil tinjauan dari jurnal yang telah dilakukan oleh para pengkaji sebelumnya, dimana peneliti mencari aspek-aspek lain yang belum dikaji, lalu mengembangkan dan mencari perbedaan terhadap penelitian sebelumnya. Dimana kajian pustaka ini memiliki 2 (dua) tema yaitu mengenai kesejahteraan petani dan peran Pemerintah Desa.

1. Kesejahteraan Petani

Pada tema tinjauan pustaka kesejahteraan petani, peneliti mengambil 5 artikel terkait dari karya Shandi Agung Pratama (2022), Petrus Kristriantono dan Yuliawati (2022), Retno Fitriani (2022), Afriliyeni (2021), dan Tity Iriani Datau (2019). Adapun penjelasan lebih lengkap mengenai artikel-artikel tersebut ialah sebagai berikut:

Pertama, penelitian dari jurnal yang ditulis oleh Muhammad Shandi Agung Pratama tahun 2022 yang berjudul “*Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Usaha Desa Melalui*

PT. Mitra Desa Pamarican sebagai Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.”. Artikel ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif yang bersumber dari data sekunder berupa penelitian kepustakaan. Studi yang dilakukan menunjukkan bahwa untuk mengatasi pertumbuhan populasi, suatu negara harus tangguh. Oleh karena itu, harus ada pemangku kepentingan tertentu yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani untuk meningkatkan sumber daya dan menjamin keberlanjutan sektor agroindustri. PT. Bank Mandiri melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility*, peran PT. Mitra Desa Pamarican sebagai pemangku kepentingan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan petani serta pelaku usaha di Desa Pamarican, Kabupaten Ciamis. Artikel ini juga menjelaskan mengenai bagaimana program PT Mitra Desa Pamarican telah berhasil meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan kualitas hasil pertanian dengan meningkatkan kegiatan usaha milik desa, serta melalui pendayagunaan teknologi.

Kedua, Jurnal karya Petrus Kristiantono dan Yuliawati tahun 2022 yang berjudul “*Dampak Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Dan Tenaga Kerja Sektor Pertanian*”. Jurnal ini memakai metode penelitian jenis analisis deskriptif dengan analisis data berupa analisis pola struktur produksi, analisis kelas peresapan tenaga kerja, dan analisis *shift share*. Jurnal ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bentuk parameter yang menandakan peningkatan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena pertanian merupakan sumber tenaga kerja sekaligus penghasil ekonomi bagi sebagian besar masyarakat di Sumatera Selatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari tahun 2012 sampai 2020 menunjukkan tingginya angka nilai tukar petani di Sumsel yakni 110,13; 110,03; 100,92; 96,87; 94,58; 95,03; 93,62; 90,52; dan 95,37. Dimana angka ini menandakan kualitas kesejahteraan petani yang masih rendah. Oleh karenanya Pemerintah Provinsi Sumsel harus merehabilitasi permasalahan pada komponen dasar yang berada di daerah, khususnya pada sektor pertanian. Nilai tersebut juga menunjukkan juga peran serta partisipasi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan pada bidang pertanian mengalami penurunan, sedangkan pada sektor jasa meningkat, dan sektor industri cenderung konsisten. Dengan begitu dampak perubahan struktur ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian Sumatera Selatan diwujudkan dalam agregasi tenaga kerja di sektor pertanian akibat kurang cepat tanggapnya aliran tenaga kerja ke sektor jasa dan industri. Turunnya nilai tukar petani akibat dari dampak perubahan struktur ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan petani di Sumatera

Selatan yang terlihat dari data di tahun 2012 yang menunjukkan angka 110,13 menjadi 95,37 pada tahun 2020 hal ini berarti bidang pada bidang pertanian telah terjadi kerugian serta tingkat kesejahteraan yang rendah.

Ketiga, jurnal karya Retno Fitrianti tahun 2022 yang berjudul “*Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Inovasi Produk Olahan Singkong di Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa*”. Metode penelitian yang dipakai berupa penyuluhan serta melakukan praktek pengolahan singkong secara langsung. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan kesejahteraan masyarakat dengan pembaharuan produk pengolahan singkong di Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa yang memberikan dedikasi untuk kepada warga dengan tujuan membantu keuntungan dalam meningkatkan kemampuan serta pengetahuan dalam proses mengolah singkong sebagai bahan pangan yang lebih memiliki nilai serta dapat menciptakan keanekaragaman produksi singkong yang dapat bersaing. Pelatihan ini mengajarkan mengenai mengolah singkong menjadi produk makanan yang lebih memiliki nilai jual yang tinggi, serta cara mengemas, memberi label, dan menjualnya. Ini menunjukkan cara mensejahterakan petani (petani singkong) dengan memberikan pelatihan agar nantinya para petani ini bukan hanya menjual singkong mentah saja, tetapi juga dapat menghasilkan produk dari olahan singkong yang bernilai dan diminati dipasaran.

Keempat, jurnal karya Afriliyeni tahun 2021 yang berjudul “*Hubungan Reforma Agraria dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kasus: Lahan Eks HGU di Desa Pasawahan, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat)*”. Penelitian ini memakai metode kuantitatif yang dibantu oleh data kualitatif. Harapan dari kajian ini yakni untuk menguraikan *land reform* pada perspektif reformasi aset dan reformasi akses, mengkaji peningkatan kesejahteraan petani, serta mempelajari interaksi antara *land reform* dan peningkatan kesejahteraan petani. Dimana jurnal ini menerangkan bahwa kemiskinan di pedesaan disebabkan salah satunya oleh rendahnya akses petani terhadap tanah sehingga belum maksimalnya penggunaan sumber daya lahan pertanian. Maka reforma agraria menjadi salah satu akses untuk mengendalikan kesengsaraan tersebut. Reforma agraria adalah pembentukan kembali bentuk kepemilikan tanah yang lebih berkeadilan, yang diharapkan dapat menghasilkan keadilan dan pemerataan kepemilikan tanah yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah desa. Dari kajian ini menunjukkan bahwa tingkat *asset reform*

pada kategori rendah itu berarti penataan terhadap aset tanah buruk. Namun keberadaan atas *access reform* dan peningkatan kesejahteraan pada golongan medium yang berarti kontribusi atas kesempatan terhadap permodalan atau bantuan lainnya yang ditujukan kepada subjek reforma agraria untuk peningkatan kesejahteraan berada pada kategori medium. Dengan demikian penelitian ini menemukan hubungan antara kesejahteraan rumah tangga petani, dimana reformasi akses tidak memiliki kaitan dengan kesejahteraan rumah tangga petani.

Kelima, Jurnal karya Tity Iriani Datau, Syarwani Canon, dan Amir Halid tahun 2019 yang berjudul “*Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Menurut Tipologi Masyarakat*”. Penelitian ini memakai teknik analisis data berupa deskriptif tentang tingkat penghasilan dan jatah dari pengeluaran, serta kalkulasi rasio DBPp (Daya Beli Rumah Tangga Petani) serta NTPRP (Nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani) sebagai standar dari kualitas kesejahteraan petani. Artikel ini menyatakan pemerintah terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan petani di pedesaan dengan membuat program kawasan pertanian terpadu. Lebih unggulnya pendapatan dari usahatani jenis padi sawah dan usahatani dibandingkan pendapatan non pertanian dari ketiga tipologi petani tersebut, baik itu petani lokal, non lokal maupun campuran. Dimana pada umumnya daya beli petani pada ketiga kategori tersebut berkisar antara 2,14 sampai 6,70, nilai rata-rata NTPRP akan lebih dari satu (>1) dan berkisar antara 1,38 hingga 8,66.

2. Peran Pemerintah Desa

Pada tema tinjauan pustaka mengenai Peran Pemerintah Desa, peneliti disini mengambil 5 artikel terkait dari karya Bayu Budiandrian (2022), Retno Palupi (2022), Rizqalya Rachmatu Syafira dan Dewi Rahmi (2022), Goestyari Kurnia Amantha (2021), dan Liza Amelia (2020). Adapun penjelasan lebih lengkap mengenai artikel-artikel tersebut ialah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal karya Bayu Budiandrian tahun 2022 yang berjudul “*Peran Organisasi Petani dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Petani di Indonesia*”. Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa membangun pertanian di Indonesia adalah suatu hal yang berat dan tidak bisa dianggap hanya tanggung jawab pemerintah saja. Dimana kerjasama ini bersifat pentahelix untuk meningkatkan mutu dan nilai dari pembangunan pertanian di Indonesia sebagai syarat yang harus dipenuhi demi

terwujudnya harapan bersama. Dimana membuktikan bahwa dibutuhkan penegakan layanan serta program yang bukan saja mengarah kepada pengembangan daya cipta pertanian, melainkan kepada pengurangan beban biaya keluarga tani, sehingga kehidupannya akan lebih berkepanjangan.

Kedua, Jurnal karya Retno Palupi tahun 2022 yang berjudul “*Strategi Balai Penyuluhan Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani pada Era Kostratani di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri*”. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dan pengumpulan data yang berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan 4 ketua kelompok tani, 3 petugas BPP Wates, dan 5 penyuluh dan ditelaah memakai alat Nvivo versi 12 untuk menggali latar belakang terbesar atas pelaksanaan peran, tugas, dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Wates pada era Kostratani (Komando Strategis Pembangunan Pertanian). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Kostratani merupakan rencana dari Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk jangka panjang guna memaksimalkan peran, fungsi, dan tugas dari BPP. Dimana BPP Wates tertuju pada peningkatan kelompok tani pada penerapan peran, fungsi, dan tugas BPP. Terdapat 3 (tiga) aspek penghambat yaitu kurangnya anggota ahli di BPP Wates sehingga pelayanan kurang cepat dan fasilitas yang kurang memadai dan buruk. Namun ada 4 (empat) faktor penunjang yaitu kegiatan aktif, penyuluhan aktif, konsultasi mudah, program bantuan mudah didapatkan. Sehingga dari penelitian ini didapatkan lima strategi yaitu menanggulangi masalah petani dengan diadakannya rapat rutin, perbaikan fasilitas, kekurangan petugas dapat di koordinasi dengan dinas setempat, dan pembentukan kelompok tani berbadan hukum.

Ketiga, Jurnal karya Rizqalya Rachmatu Syafira dan Dewi Rahmi tahun 2022 yang berjudul “*Peran Kelompok Tani dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung*”. Jurnal ini memakai metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan informan ketua organisasi petani dan 7 anggotanya. Kajian ini menjelaskan kalau kelompok tani didirikan untuk lebih mempermudah dalam penyediaan alat produksi pertanian (bibit, pupuk, obat). Maka adanya kelompok tani ini harga dari hasil pertanian dapat ditetapkan secara bersama. Di Indonesia sekarang ini kelompok tani tidak hanya didirikan oleh dan untuk petani, tetapi dibentuk hanya untuk reaksi atas agenda pemerintah yang mewajibkan petani untuk berkelompok. Apabila agenda pemerintah tersebut

telah selesai maka sebagian besar petani keluar dalam organisasi tani. Dengan demikian permasalahan yang terjadi pada petani di Desa Warnasari karena terdapatnya campur tangan pemerintah dalam organisasi kelompok tani, kurangnya modal, instabilitas harga dan pendapatan, kesulitan memperoleh bibit terbaik, serta terdapatnya hama tanaman. Lalu peran kelompok tani di Desa Warnasari dalam meningkatkan kesejahteraan petani ialah dengan menyediakan unit usaha, kelas belajar-mengajar, dan kolaborasi.

Keempat, Jurnal dari Goestyari Kurnia Amantha tahun 2021 yang berjudul “*Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Pengelolaan Sumber Mata Air Panas Desa Way Urang)*”. Jurnal ini memakai metode penelitian deskriptif kualitatif, sumber data yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kajian tersebut mengungkap bahwa Desa Way Urang, salah satu desa di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, memiliki kapasitas kekayaan alam berupa sumber air panas alami. Kekayaan alam yang tersedia belum dimanfaatkan serta dikelola secara optimal untuk sebesar-besarnya manfaat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkait pengelolaan sumber air panas di Desa Way Urang. Pemerintah Desa Way Urang Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran gagal berperan sebagai stabilisator, inovator, pionir, serta modernisator dalam pengelolaan Sumber Air Panas Desa Way Urang. Hal ini berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat, misalnya dengan meningkatkan akses dan pilihan kesempatan yang sesuai dengan aspirasi, kemampuan dalam meningkatkan taraf hidup, serta keberdayaan. Namun masih kurangnya sinergi antara masyarakat, Pemerintah Desa dan pemerintah daerah dalam pengembangan, pengelolaan, dan pemberdayaan Sumber Air Panas Desa Way Urang sebagai potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kelima, skripsi dari Liza Amelia tahun 2020 yang berjudul “*Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Sektor Budidaya Ikan Studi Desa Kubu Kandang Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari*”. Skripsi ini memakai metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil skripsi tersebut menjelaskan peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada sektor budidaya ikan dengan didirikannya Program Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) dimana pembentukan kelompok tersebut

sebagai bentuk desentralisasi dari pemerintah pusat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kubu Kandang dan mengurangi pengangguran khususnya di Desa Kubu Kandang. Selama implementasi proyek ini, pemerintah melalui proyek POKDAKAN Sumber Jaya telah memainkan beberapa peran yaitu sebagai pembelajaran di bidang budidaya ikan, sebagai media komunikasi, sebagai wahana negosiasi dan kerjasama, untuk meningkatkan keakraban, untuk menyatukan keinginan yang murni dan sehat. Peran Pemerintah Desa melalui skema POKDAKAN Sumber Jaya sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendampingi masyarakat dalam memainkan skema tersebut. Hal ini terlihat dari cara Pemerintah Desa bekerja sama dengan anggota kelompok, memberikan kewenangan kepada kelompok, serta menolong anggota POKDAKAN dengan memberikan pinjaman dana desa untuk menyediakan makan bagi ikan-ikan milik anggota kelompok.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan di atas, maka perbedaan antara skripsi penulis dengan referensi yang sudah dijelaskan yaitu, jika dari tema peran Pemerintah Desa terdapat peran-peran dari Pemerintah Desa yang dibantu oleh lembaga seperti POKDAKAN, Organisasi Petani, dan BPP. Sedangkan untuk tema kesejahteraan petani dapat dilihat dari sisi usaha memproduksi kembali hasil lahan yang lebih bernilai, lebih meningkatkan produktivitas dari seorang petani, dan upaya peningkatan lahan untuk pertanian. Sedangkan dalam skripsi ini peneliti membahas mengenai peranan dari Pemerintah Desa yang berkolaborasi dengan pihak Gapoktan dan BUMDes, yang dilihat dari dua aspek yaitu peranan serta hambatan yang dirasakan oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan industri. Selain itu, skripsi ini akan juga membahas pandangan dari masyarakat desa tentang peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Hal yang menarik dari skripsi penulis adalah mengenai peranan Pemerintah Desa Karangharum dalam meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan industri Kabupaten Bekasi, yang mana kawasan industri adalah masalah besar bagi terjadinya fungsi peralihan lahan.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan Jenis penelitian studi lapangan (*field research*), dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer. Sedangkan metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif, dimana mekanisme penelitian akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan mengenai individu dan perilakunya sedang diamati (Lexy, 1989:3). Selain itu, metode ini membentuk gambaran mendalam mengenai ucapan, tulisan, dan apa yang diamati dari individu, kelompok, masyarakat, dan institusi dalam kehidupan sehari-hari yang dipelajari dari perspektif yang lengkap dan komprehensif. Dengan penelitian kualitatif deskriptif ini, peneliti akan dapat menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat (Meleong, 2010:11). Dimana Penelitian mengkaji masalah dalam masyarakat, serta cara-cara yang berlaku dalam masyarakat dalam kondisi tertentu, relasi tertentu, pandangan, sikap, kegiatan, maupun proses yang sedang terjadi serta pengaruhnya terhadap suatu kejadian. Dimana fenomena pada penelitian ini mengenai peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan industri.

b. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini memakai jenis pendekatan studi kasus, yaitu studi mendalam terhadap sektor-sektor sosial tertentu, dimana hasil penelitian akan memberikan gambaran yang luas serta mendetail tentang sektor-sektor sosial tertentu. Mata pelajaran terbatas, tetapi fokus serta variabel yang dipelajari sangat luas cakupannya (Danin, 2002). Dimana fenomena yang menjadi kasus dalam penelitian ini ialah Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi yang merupakan wilayah yang menjadi tempat penelitian terkait peranan Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

c. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini ialah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer, ialah sumber data yang berupa hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan subjek penelitian. Dalam hal ini penelitian memperoleh data atau informasi secara langsung dengan menggunakan instrumen wawancara yang telah ditentukan. Data primer dihimpun oleh peneliti untuk menjawab mengenai pertanyaan penelitian, data primer ini akurat, karena data yang akan ditampilkan secara rinci (Wahyu, 2010). Pemilihan narasumber dalam penelitian ini didasarkan kepada informan yang memahami serta mengetahui permasalahan yang akan diteliti mengenai peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan industri.
2. Data sekunder, merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian orang-orang yang telah melakukan penelitian dari sumber atau kajian yang telah ada sebelumnya (Hasan, 2002). Sumber data sekunder dipakai untuk mendukung keterangan dari sumber primer. Data sekunder didapatkan dari buku, studi pustaka, penelitian terdahulu, hasil literatur, dan lainnya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa pengamatan secara langsung oleh peneliti (observasi), wawancara kepada para narasumber dan dokumentasi.

1. Observasi

Teknik observasi yang peneliti lakukan ialah untuk mendapatkan data dan gambaran secara lengkap mengenai peran Pemerintah Desa Karangharum dalam meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan industri Kabupaten Bekasi. Dalam pengamatan ini peneliti akan melakukannya secara langsung di lokasi yang diteliti agar hasil data yang diperoleh akan lebih lengkap, informatif, serta akurat sehingga nantinya data yang ditulis akan dapat dipercaya.

Tipe observasi yang peneliti gunakan dalam skripsi ini ialah tipe observasi terus terang atau tersamar. Dimana menurut (Sugiyono, 2014) observasi tipe ini yaitu peneliti melakukan pengumpulan data secara terus terang kepada narasumber bahwa peneliti sedang melaksanakan penelitian. Namun dalam hal tertentu peneliti tidak berterus terang, hal ini dilakukan apabila data yang peneliti cari merupakan data yang

bersifat rahasia. Observasi merupakan sebuah dasar dari seluruh ilmu pengetahuan, yang mana para ahli hanya dapat bekerja berlandaskan penemuan yang didapatkan dari kenyataan dunia yang diperoleh melalui pengamatan.

2. Wawancara

Pada skripsi ini memakai teknik wawancara semi struktur, dimana peneliti akan bertanya pertanyaan yang telah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam lagi untuk menggali keterangan lebih lanjut tentang topik penelitian yang sedang diteliti (Arikunto, 2010). Teknik wawancara seperti ini ialah termasuk kedalam kategori *in-dept interview*, yang mana di dalam praktiknya akan lebih bebas daripada wawancara terstruktur (Sugiyono, 2014). Menurut Esterberg wawancara ialah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk berbagi informasi dan ide melalui sesi tanya jawab, sehingga dibentuk suatu makna dalam poin tertentu (Sugiyono, 2014). Melalui wawancara maka peneliti akan mendapatkan suatu hal secara lebih mendalam mengenai peran dari Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan industri yang tidak peneliti dapatkan dari hasil observasi.

Wawancara ini ditujukan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, BPP Kecamatan Kedungwaringin, Kepala Desa Karangharum, Ketua Gapoktan Desa Karangharum, Bendahara BUMDes, 10 orang petani, 5 masyarakat. Petani serta masyarakat desa yang terdiri atas laki-laki, perempuan dan milenial. Para narasumber yang akan menjadi informan ini tentunya berkaitan dengan penelitian skripsi ini dimana para perangkat desa selaku pembuat peranan dalam meningkatkan kesejahteraan petani, sedangkan petani dan masyarakat adalah objek yang dituju dari peranan pemerintah tersebut. Dengan demikian wawancara yang dilakukan ialah wawancara yang berpedoman dan dikembangkan sesuai dengan situasi dan informasi di lapangan.

Tabel 1
Data Informan dalam Penelitian Skripsi

No	Nama	Umur	Status	Keterangan
1	Arif Risman	52	PPL Kabupaten Bekasi	Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi
2	Karolina	42	BPP Kecamatan Kedungwaringin	PPL Desa Karangharum dan Admin
3	H. M. Rimansyah, A.Md	45	Kepala Desa Karangharum	Periode Jabatan 2019-2025
4	Ipah Masripah	48	Bendahara BUMDes	Periode Jabatan 2020-2022
5	Ucep Somantri	50	Ketua Gabungan Kelompok	Periode Jabatan 2019-2024
6	Nasan	55	Petani	Pemilik Lahan Persawahan
7	Damang	58	Petani	Pemilik Lahan Persawahan
8	Daming	53	Petani	Pemilik Lahan Persawahan
10	Enjuh	51	Petani	Penggadai Lahan Persawahan
11	Masnah	54	Petani	Penggadai Lahan Persawahan
12	Rami	55	Petani	Penyewa Lahan Persawahan
13	Ano Sumarno	58	Petani	Penyewa Lahan Persawahan
14	Marsan	50	Buruh Tani	Bekerja di Sawah Oranglain
15	Nakip	63	Buruh Tani	Bekerja di Sawah Oranglain
16	Abo	24	Buruh Tani	Bekerja di Sawah Oranglain
17	Sarinah	21	Masyarakat	Warga Desa Karangharum

18	Jamal	53	Masyarakat	Warga Desa Karangharum
19	Gangga	22	Masyarakat	Warga Desa Karangharum
20	Iyang Saefudin	65	Masyarakat	Warga Desa Karangharum
21	Marni	55	Masyarakat	Warga Desa Karangharum

Sumber: Wawancara Peneliti di Lapangan

3. Dokumentasi

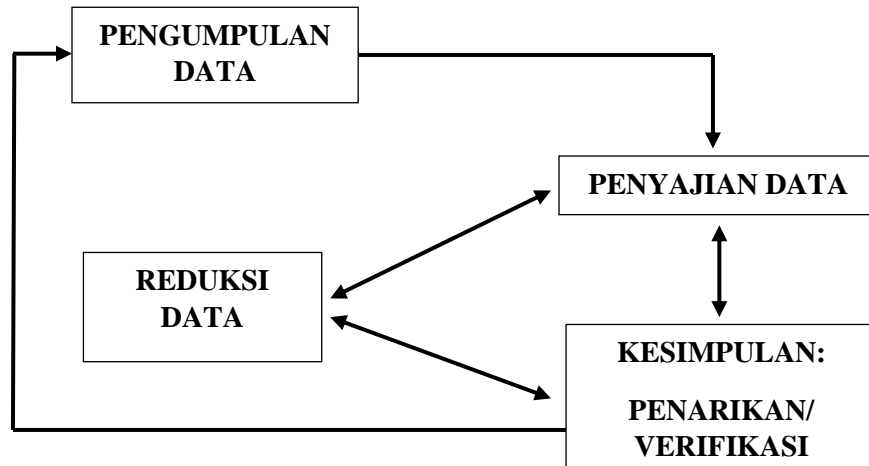
Dokumentasi yakni sebuah cara yang digunakan dalam memperoleh data dan fakta berupa dokumen, arsip, buku, gambar, dan angka tertulis yang berbentuk laporan dan informasi yang akan mendukung penelitian (Sugiyono, 2018). Dimana dokumentasi ini merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara, sehingga penelitian ini akan lebih dapat dipercaya serta berkualitas jika dibantu dengan data berupa foto, karya tulis, ataupun dokumen yang ada.

Dokumentasi ini dipakai guna memperoleh data sekunder, sumber data yang dikumpulkan dari hasil dokumentasi ini berupa dokumen serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian mengenai peran dari Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan industri. Maka dari itu peneliti akan mencatat dan memfoto dokumen yang didapatkan dari para informan yang berada di lapangan.

e. Teknik Analisis Data

Dalam skripsi ini teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Gambar 1. Langkah-langkah Analisis Data



Sumber: Sugiyono 2014

- 1) Reduksi data dalam skripsi ini berupa data yang didapatkan dari penelitian mengenai peranan Pemerintah Desa Karangharum dalam meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan industri Kabupaten Bekasi. Dimana reduksi data merupakan rangkuman dan pemilihan hal-hal yang menjadi poin serta berfokus kepada sesuatu yang penting, yang kemudian dicari model dan temanya (Sugiyono, 2014). Selain itu reduksi data juga merupakan proses pemusatan dalam penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data kasar yang terdapat dari ulasan-ulasan yang diperoleh dari hasil penelitian.
- 2) Penyajian data di dalam skripsi ini berfungsi untuk lebih memudahkan peneliti dalam memahami data yang didapatkan dari lapangan yang akan peneliti disajikan dalam bentuk naratif. Pada penelitian kualitatif penyajian data diuraikan dalam wujud deskripsi singkat, relasi antar kategori, *chart*, *flowchart*, dan lain-lain (Sugiyono, 2014). Miles dan Huberman menjelaskan bahwa wujud dari penyajian data penelitian kualitatif di masa lalu ialah menggunakan teks naratif.
- 3) Penarikan kesimpulan, yakni menanggapi pertanyaan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya dan membuat kesimpulan yang berupa uraian atau representasi tentang objek yang menjadi penelitian. Sugiyono menjelaskan bahwa

kesimpulan dalam kajian kualitatif sebagai sesuatu yang aktual yang belum pernah ada. Dikarenakan belum pastinya deskripsi maupun gambaran sebelumnya mengenai suatu objek maka dengan penarikan kesimpulan penelitian yang dilakukan akan lebih eksplisit dan dapat berupa hipotesis atau hubungan teori, dan interaktif (Sugiyono, 2014).

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I akan menerangkan mengenai latar belakang mengapa perlu adanya penelitian skripsi ini dengan memuat dua rumusan masalah. Bab ini juga akan menjelaskan secara rinci tentang tujuan dari penelitian serta manfaat yang dapat diperoleh dari skripsi ini. Bab I menguraikan dengan sebuah metode serta pendekatan yang diambil dari penelitian, pemahaman dari teori, perencanaan penelitian mampu tersusun secara sistematis menjadi karya tulis skripsi yang sempurna.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab II menjelaskan secara rinci yang terkait teori kajian penelitian yang perlu dijelaskan yaitu mengenai teori *collaborative governance*. Teori kajian dalam bab ini memiliki tujuan menambah kekuatan skripsi sebagai kerangka berpikir penulis dalam melakukan analisis data dalam meneliti sebuah objek penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM DESA KARANGHARUM

Bab III akan memuat tiga sub bab, pertama menjelaskan gambaran wilayah Desa Karangharum yang terdiri atas kondisi geografis, demografis. Lalu sub kedua akan menjelaskan kondisi sosial budaya dan agama masyarakat Desa Karangharum. Sub bab Ketiga akan menjelaskan mengenai profil petani di Desa Karangharum.

BAB IV PERAN PEMERINTAH DESA KARANGHARUM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI KAWASAN INDUSTRI DI KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN BEKASI

Bab IV akan menjelaskan rumusan masalah pertama mengenai bagaimana peran Pemerintah Desa Karangharum dalam meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan industri Kabupaten Bekasi.

BAB V HAMBATAN PEMERINTAH DESA KARANGHARUM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN BEKASI

Bab V akan menjelaskan rumusan masalah kedua mengenai bagaimana hambatan Pemerintah Desa Karangharm dalam meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan industri Kabupaten Bekasi.

BAB VI PENUTUP

Bab V menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban akhir dari susunan penulisan hasil dari rumusan masalah yang telah diuraikan. Selain kesimpulan, terdapat saran dari peneliti yang berupa masukan kepada berbagai pihak agar bisa meneruskan penemuan-penemuan yang ditemukan peneliti, baik berupa penelitian lanjutan ataupun sebagai penyusun untuk berbagai kebijakan.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Definisi *Collaborative Governance*

Dalam jurnal karya Chris Ansell dan Alison Gash (2008) tentang *Collaborative Governance in Theory and Practice* mereka mendefinisikan *collaborative governance* sebagai:

"An arrangement by one or more public agencies to directly involve non-government stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensual, and consultative for the development or implementation of public policy or the management of public programs or assets."

Pengertian yang disampaikan Ansell dan Gash mengacu kepada enam parameter penting. Pertama, lembaga yang dikuasai oleh badan atau lembaga publik. Kedua, peserta dalam institusi termasuk aktor non-negara. Ketiga, partisipan yang berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya berkonsultasi dengan badan publik. Keempat, forum diatur secara formal dan bertemu bersama. Kelima, forum bertujuan untuk mengambil keputusan berdasarkan konsensus, meskipun dalam praktiknya konsensus tidak tercapai. Keenam, fokus kerjasama akan mengarah pada kebijakan publik.

Dalam mendefinisikan *collaborative governance* Ansell dan Gash mengambil referensi pendapat dari beberapa tokoh yaitu Lynn, Heinrich, dan Hill (2001) yang menyatakan pemerintahan berlaku pada hukum dan peraturan yang berkaitan dengan penyediaan barang publik. Lalu, pendapat Stoker (1998) tentang tata kelola yang mengatakan sebagai pengambilan keputusan kolektif dan khususnya tentang pengambilan keputusan kolektif yang mencakup aktor publik dan swasta. Maka dari dua pendapat tersebut disimpulkan bahwa *collaborative governance* sebagai suatu bentuk administrasi di mana aktor publik dan swasta bekerja sama dengan cara yang berbeda, menggunakan proses khusus untuk membuat hukum dan aturan untuk menyediakan barang publik (Ansell and Gash, 2008). Salah satu komponen penting dari istilah tata kelola kolaboratif ialah "*governance*".

Ansell dan Gash menggunakan istilah "*public agency*", yang bertujuan untuk memasukkan badan publik seperti birokrasi, pengadilan, legislatif, dan badan lain di tingkat

lokal, negara bagian, atau federal. Badan publik tersebut dapat membentuk forum kerja sama baik untuk memenuhi tujuan mereka sendiri atau untuk mematuhi mandat, termasuk perintah pengadilan, undang-undang atau peraturan yang mengatur alokasi dana federal. Sebagai contoh, Undang-Undang Investasi Tenaga Kerja tahun 1998 menetapkan bahwa semua negara bagian dan daerah yang menerima dana pengembangan tenaga kerja federal harus mengadakan dewan investasi tenaga kerja yang terdiri dari aktor publik dan swasta untuk mengembangkan dan mengawasi kebijakan di tingkat negara bagian dan lokal mengenai pelatihan kerja, kekurangan dan pengangguran. Dari contoh tersebut menunjukkan bahwa dewan investasi tenaga kerja ini diberi mandat untuk terlibat dalam tata kelola kolaboratif.

Selain itu, Ansell dan Gash berpendapat bahwa meskipun lembaga publik biasanya merupakan pemrakarsa atau penghasut tata kelola kolaboratif, namun membutuhkan partisipasi pemangku kepentingan non-negara. Seperti beberapa sarjana menggambarkan koordinasi antar lembaga sebagai tata kelola kolaboratif. Maka dari itu, Ansell dan Gash menggunakan istilah “*stakeholder*” untuk mengacu pada partisipasi warga sebagai individu dan partisipasi kelompok terorganisir. Selain itu, pemakaian istilah ini juga merujuk pada lembaga publik dan pemangku kepentingan non negara, meskipun lembaga publik memiliki peran kepemimpinan yang khas dalam tata kelola kolaboratif. Definisi tata kelola kolaboratif Ansell dan Gash juga menetapkan standar untuk partisipasi pemangku kepentingan non-pemerintah, bahwa kolaborasi tidak pernah murni konsultatif, tetapi memerlukan komunikasi dua arah dan pengaruh antara otoritas dan pemangku kepentingan, dan kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk berbicara. satu sama lain, satu sama lain. Otoritas dan aktor harus bekerja sama dalam proses multilateral. Meskipun alat manajemen berpotensi sangat berguna, teknik konsultasi seperti penelitian pemangku kepentingan atau kelompok fokus tidak kolaboratif dalam hal ini, karena tidak memungkinkan komunikasi dua arah atau diskusi multilateral.

Bekerja sama juga berarti bahwa aktor non-negara memiliki tanggung jawab nyata atas hasil kebijakan. Oleh karena itu, pemangku kepentingan harus terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Kriteria ini tersirat dalam banyak literatur tentang kolaborasi. Dimana hal tersebut menunjukkan bahwa otoritas tertinggi mungkin terletak pada badan publik (seperti negosiasi peraturan), tetapi pemangku kepentingan harus berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, komite penasihat dapat menjadi bentuk tata kelola

kolaboratif jika saran mereka terkait erat dengan hasil pengambilan keputusan. Namun dalam praktiknya (dan sesuai desain), komite penasehat seringkali jauh dari pengambilan keputusan yang sebenarnya.

Ansell dan Gash menunjukkan kriteria kolaborasi *formal* untuk membedakan tata kelola kolaboratif dari bentuk interaksi kelompok kepentingan lembaga yang lebih santai dan konvensional. Seperti istilah tata kelola kolaboratif mungkin dianggap menggambarkan hubungan informal yang selalu dipupuk oleh lembaga dan kelompok kepentingan. Tentunya, kelompok kepentingan dan badan publik selalu terlibat dalam aliran pengaruh dua arah. Perbedaan antara definisi kami tentang tata kelola kolaboratif dan pengaruh kelompok kepentingan konvensional adalah bahwa yang pertama menyiratkan strategi eksplisit dan publik untuk mengatur pengaruh ini.

Collaborative governance berfokus pada politik dan urusan publik. Fokus pada perhatian publik membedakan manajemen kolaboratif dari bentuk-bentuk pembangunan konsensus lainnya seperti penyelesaian sengketa alternatif atau mediasi transformatif. Sementara lembaga dapat menggunakan penyelesaian sengketa atau mediasi untuk mengurangi konflik sosial atau politik, teknik ini sering digunakan untuk mengatasi konflik pribadi. Selanjutnya, penyelesaian atau mediasi sengketa publik hanya dapat bertujuan untuk menyelesaikan sengketa pribadi. Meskipun mengakui ketidakjelasan batas antara publik dan privat, Ansell dan Gash membatasi penggunaan istilah "*collaborative governance*" hanya untuk tata kelola urusan *public*.

Definisi Ansell dan Gash mengenai tata kelola kolaboratif dimaksudkan untuk membedakan tata kelola kolaboratif dari dua pola alternatif pembuatan kebijakan: *adversarialism* dan *managerialism*. Berbeda dengan keputusan yang dibuat secara bermusuhan, tata kelola kolaboratif bukanlah bentuk intermediasi kepentingan "*winner-take-all*". Dalam tata kelola kolaboratif, pemangku kepentingan akan sering memiliki hubungan permusuhan satu sama lain, tetapi tujuannya adalah untuk mengubah hubungan permusuhan menjadi hubungan yang lebih kooperatif. Dalam politik permusuhan, kelompok dapat terlibat dalam tawar-menawar jumlah positif dan mengembangkan aliansi kooperatif. Namun, kerja sama ini bersifat ad hoc, dan politik permusuhan tidak secara eksplisit berupaya mengubah konflik menjadi kerja sama. Dalam manajerialisme, lembaga publik membuat keputusan secara

sepihak atau melalui proses keputusan tertutup, biasanya mengandalkan ahli lembaga untuk membuat keputusan. Meskipun lembaga manajerial dapat mempertimbangkan perspektif pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan mereka dan bahkan dapat berkonsultasi langsung dengan pemangku kepentingan, tata kelola kolaboratif mengharuskan pemangku kepentingan secara langsung disertakan dalam proses pengambilan keputusan.

Terdapat istilah lain dari *collaborative governance* yang dapat menyebabkan kebingungan seperti “korporatisme”. Definisi klasik korporatisme ini menekankan tawar-menawar tripartit antara asosiasi puncak tenaga kerja dan modal dan negara. Biasanya, asosiasi puncak ini memiliki monopoli representasional di sektor mereka. Jika kita mulai dengan definisi korporatisme yang lebih sempit ini, tata kelola kolaboratif adalah istilah yang lebih luas. Tata kelola kolaboratif seringkali menyiratkan penyertaan pemangku kepentingan yang lebih luas daripada korporatisme, dan pemangku kepentingan seringkali tidak memiliki monopoli perwakilan atas sektor mereka. Istilah “tata kelola asosiasi” kadang-kadang digunakan untuk merujuk pada mode pemerintahan yang lebih umum dengan asosiasi, tetapi tata kelola kolaboratif bahkan mungkin tidak mencakup asosiasi formal.

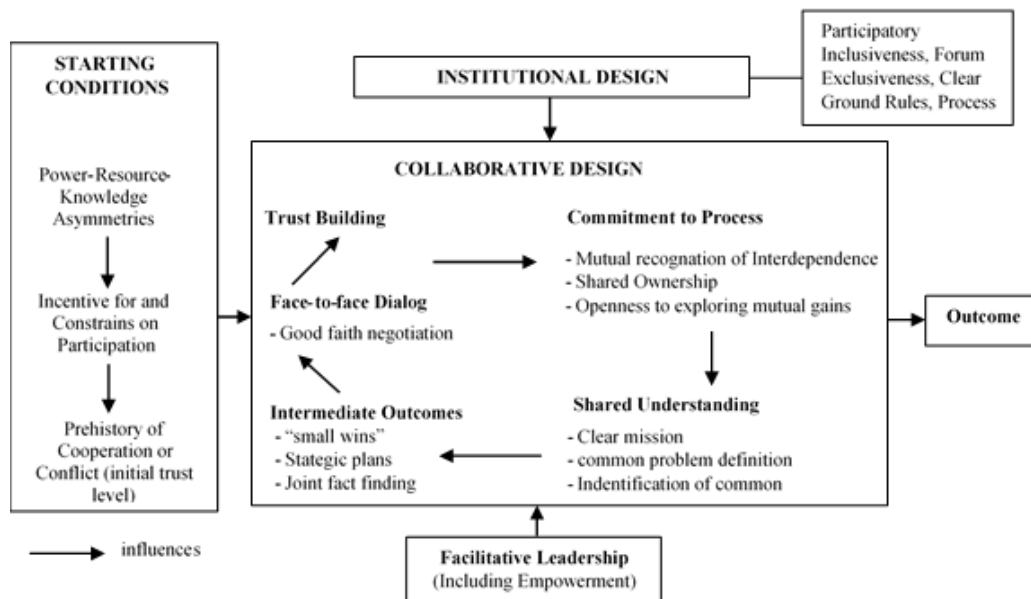
Terkadang istilah “jaringan kebijakan” digunakan untuk menggambarkan bentuk kerjasama negara-masyarakat yang lebih pluralistik. Jaringan kebijakan dapat mencakup lembaga publik dan kelompok pemangku kepentingan. Selain itu, jaringan kebijakan biasanya menyiratkan bentuk musyawarah atau pengambilan keputusan yang kooperatif di antara para aktor dalam jaringan. Dengan demikian, istilah jaringan kebijakan dan tata kelola kolaboratif dapat merujuk pada fenomena serupa. Namun, tata kelola kolaboratif mengacu pada strategi eksplisit dan formal untuk menggabungkan pemangku kepentingan ke dalam proses pengambilan keputusan yang berorientasi multilateral dan konsensus. Sebaliknya, kerja sama yang melekat dalam jaringan kebijakan mungkin bersifat informal dan sebagian besar tetap implisit (misalnya, tidak diakui, tidak dinyatakan, tidak dirancang).

B. Model *Collaborative Governance*

Model *collaborative governance* Ansell dan Gash mempunyai 4 (empat) variabel yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaboratif. Dimana variabel-variabel tersebut dapat dipecah menjadi variabel yang lebih spesifik. Variabel proses

kolaboratif diperlakukan sebagai inti dari model *collaborative governance*, sedangkan untuk variabel lainnya seperti kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan ini memberikan masukan atau konteks penting dalam proses kerja sama. Kondisi awal menetapkan persyaratan dasar untuk kepercayaan, konflik dan modal sosial, yang menjadi sumber daya atau ikatan dalam kerjasama. Perencanaan kelembagaan yang menentukan aturan dasar di mana kerjasama terjadi. Dan kepemimpinan mewakili mediasi dan fasilitasi penting dari proses kolaboratif.

Gambar 2



Model of Collaborative Governance (Ansell dan Gash, 2008)

1. *Starting Condition* (Kondisi Awal)

Kondisi yang berlaku pada awal kerja sama dapat memfasilitasi atau menghambat kerja sama yang terjadi di antara para *stakeholder*. Pertama, pihak-pihak yang terlibat memiliki ketidaksepakatan yang sengit atas beberapa masalah lokal yang bermuatan emosional dan memandang satu sama lain sebagai musuh yang tidak bermoral. Di sisi lain, mereka yang terlibat memiliki kesamaan visi tentang apa yang akan dicapai melalui kerja sama dan kerja sama masa lalu dan saling menghormati. Kedua, kerja sama bisa jadi sulit, tetapi dalam kasus pertama masalah ketidakpercayaan, ketidakhormatan, dan antagonisme terbuka harus diatasi. Oleh karena itu, Ansell dan Gash membatasi kondisi awal ini kepada tiga variabel besar, yaitu

ketidakseimbangan sumber daya, insentif untuk kerjasama kelompok kepentingan, dan konflik atau kerjasama antara kelompok kepentingan.

a. ***Power/Resource Imbalances (Ketidakseimbangan Daya / Sumber Daya)***

Ketidakseimbangan kekuatan di antara *stakeholder* merupakan permasalahan yang sering diawasi dalam manajemen kolaboratif. Ketika beberapa pemangku kepentingan tidak mempunyai keterampilan, organisasi, posisi, atau sumber daya untuk terlibat dengan *stakeholder* lain atas dasar kesetaraan maka proses manajemen kolaboratif rentan terhadap manipulasi oleh aktor yang lebih berkuasa. Contohnya seperti yang terjadi pada pemerintahan Ontario yang membuat kebijakan terkait pelatihan, kesehatan, keselamatan dalam bekerja melalui cara kolaboratif, namun digagalkan oleh status istimewa perusahaan yang memiliki “*informal channels*”, sehingga perusahaan tersebut memperoleh akses ke pejabat senior. Dari kasus tersebut menunjukkan ketidakseimbangan akan menciptakan ketidakpercayaan serta komitmen yang lemah (Ansell dan Gash, 2008).

Masalah ketidakseimbangan kekuatan utamanya terjadi ketika *stakeholder* yang merupakan hal penting, namun tidak mempunyai infrastruktur organisasi untuk mewakili mereka dalam proses kolaborasi. Dalam banyak kasus yang terjadi, para *stakeholder* ini tidak mempunyai rasa kolektif untuk mewakili kelompok kepentingan individu. Selain itu, masalah lainnya juga menunjukkan *stakeholder* mungkin tidak mempunyai keterampilan dan keahlian untuk membahas masalah yang sangat teknis. Sehingga masalah lainnya juga menyatakan bahwa beberapa *stakeholder* tidak mempunyai waktu, upaya, atau kebebasan untuk terlibat dalam proses kolaboratif yang memakan waktu. Dari permasalahan yang sudah dijelaskan tersebut menunjukkan tidak satu pun dari masalah ini tidak dapat diatasi, karena para pendukung kerja sama telah menyoroti berbagai strategi untuk memberdayakan kelompok yang kurang terwakili dan lemah. Dengan demikian Ansell dan Gash dalam teori kontingensi tata kelola kolaboratif, menyimpulkan bahwa jika ada ketidakseimbangan kekuatan atau sumber daya yang signifikan di antara *stakeholder*, maka *stakeholder* tersebut tidak dapat berpartisipasi dengan

cara yang berarti, dikarenakan *collaborative governance* yang efektif membutuhkan komitmen terhadap strategi yang positif untuk memberdayakan dan mewakili *stakeholder* yang lemah.

b. *Incentives to Participate* (Insentif untuk Berpartisipasi)

Partisipasi sebagian besar bersifat sukarela, jadi penting untuk memahami insentif apa yang dimiliki pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersama dan faktor apa yang mempengaruhi insentif tersebut. Ini termasuk analisis insentif bagi lembaga publik untuk mensponsori tata kelola kolaboratif. Sebagai contoh, membandingkan berbagai insentif yang dihadapi lembaga kehutanan dan irigasi India dan menunjukkan bagaimana insentif keuangan yang positif sangat penting untuk keberhasilan kolaboratif dalam kasus irigasi (Ansell dan Gash, 2008)

Para ahli *collaborative governance* telah mengakui bahwa kekuasaan dan ketidakseimbangan sumber daya akan mempengaruhi insentif kelompok untuk berpartisipasi dalam proses kolaboratif. Perbedaan kekuatan di antara para pemain mempengaruhi kesediaan mereka untuk berunding. Para pecinta lingkungan lebih menyukai proses dengar pendapat kongres tradisional, katanya, karena mereka yakin mereka lebih unggul dalam forum itu. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa pertimbangan waktu akan menjadi penting: pihak-pihak yang percaya bahwa kekuatan mereka sedang meningkat tidak mungkin mau mengikatkan diri pada kolaborasi. Insentif untuk partisipasi sebagian tergantung pada harapan peserta apakah proses kolaboratif akan menghasilkan hasil yang berarti, terutama dalam kaitannya dengan waktu dan energi yang dibutuhkan untuk bekerja sama. Motivasi meningkat ketika pemangku kepentingan melihat hubungan langsung antara partisipasi mereka dan hasil kebijakan yang nyata, jelas dan efektif.

Meskipun pendekatan kolaboratif mungkin diamanatkan oleh pengadilan atau legislatif, partisipasi pemangku kepentingan biasanya bersifat sukarela. Konsekuensi-nya, insentif yang dimiliki pemangku kepentingan untuk melakukan kolaborasi akan tampak besar sebagai faktor dalam menjelaskan apakah tata kelola kolaboratif dapat berhasil. Insentif untuk berpartisipasi rendah ketika pemangku kepentingan dapat mencapai tujuan mereka secara sepihak atau melalui cara

alternatif. Dimana *stakeholders* menganggap diri mereka memiliki sekutu yang kuat di pengadilan atau di badan legislatif. Tempat belanja dapat dengan mudah melemahkan proses kolaboratif, bahkan jika pemangku kepentingan tersebut secara tentatif memutuskan untuk terlibat dalam proses kolaboratif, mereka dapat mengambil klaim mereka ke tempat alternatif jika mereka tidak puas dengan proses atau hasilnya. Sebaliknya, insentif bagi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi cenderung meningkat ketika proses kolaboratif menjadi forum eksklusif untuk pengambilan keputusan. Seperti contoh kasus penyu di Nevada dimana kolaborasi yang sukses terjadi setelah pengadilan menolak membatalkan daftar darurat kura-kura sebagai spesies yang terancam punah dan kemudian putusan ini mencegah pengadilan untuk digunakan sebagai tempat alternatif.

Insentif untuk berpartisipasi dalam tata kelola kolaboratif juga akan meningkat jika pemangku kepentingan menganggap pencapaian tujuan mereka bergantung pada kerjasama dari pemangku kepentingan lainnya. Misalnya, prevalensi tata kelola kolaboratif dalam perselisihan pengelolaan sumber daya lokal mungkin terkait dengan ketergantungan bersama kelompok-kelompok lokal pada sumber daya bersama. Implikasi dari saling ketergantungan ini terkadang berlawanan dengan intuisi. Dengan demikian, pemangku kepentingan yang sangat bermusuhan yang juga sangat bergantung satu sama lain dapat bergerak menuju proses kolaboratif yang berhasil. *Balance of terror* membuat pemangku kepentingan saingan tetap berada di meja perundingan karena takut kalah jika mereka tidak terlibat. Alternatifnya, pemangku kepentingan dengan landasan kepercayaan yang mendalam dan nilai-nilai bersama mungkin gagal dalam kolaborasi karena pemangku kepentingan merasa lebih mudah mencapai tujuan mereka secara sepihak. Persepsi saling ketergantungan, seringkali bergantung pada konteks politik. Jadi, insentif untuk berpartisipasi seringkali dibentuk oleh “*shadow of the state*”, seperti ancaman regulasi atau pengadilan. Di bidang perlindungan spesies yang terancam punah, misalnya, kolaborasi dianggap umum oleh semua pemangku kepentingan sebagai pilihan yang lebih baik daripada pertarungan pengadilan yang panjang dan mahal.

Oleh karena itu Ansell dan Gash menyimpulkan bahwa pengelolaan kolaboratif hanya akan berhasil jika ada lokasi alternatif di mana para pemangku kepentingan dapat secara sepihak mencapai tujuannya, jika para pemangku kepentingan melihat diri mereka sangat saling bergantung. Dan jika interdependensi bergantung pada forum kolaboratif yang menjadi tempat eksklusif, sponsor harus bersedia melakukan pekerjaan dasar untuk menemukan forum alternatif (pengadilan, parlemen, dan badan eksekutif) untuk merayakan hasil dari proses kolaboratif.

c. ***Prehistory of Antagonism and Cooperation (Prasejarah Antagonisme dan Kerjasama)***

Banyak penelitian yang menyatakan bahwa sejarah kerja sama antara pemangku kepentingan akan menghambat atau memfasilitasi kerja sama. Namun, ketika para *stakeholder* sangat saling bergantung, maka jika terjadi tingkat konflik yang tinggi akan dapat menciptakan insentif yang kuat untuk pengelolaan kolaboratif. Situasi seperti itu sering muncul dalam konteks pengelolaan sumber daya, di mana penghentian itu sendiri menimbulkan biaya yang signifikan di kedua sisi perselisihan. Oleh karena itu, konflik yang tinggi tidak serta merta menjadi penghalang untuk berkolaborasi. Dalam beberapa hubungan kolaboratif yang berhasil dijelaskan dalam literatur, pemangku kepentingan telah mengalami bahwa mereka tidak dapat mencapai tujuan mereka tanpa proses kolaboratif dengan pemangku kepentingan lainnya, yang kepentingannya seringkali bertentangan secara diametris.

Tata kelola kolaboratif sering dibangun di atas sejarah dendam yang telah melembagakan psikologi sosial antagonisme. Seperti yang sangat disadari oleh para mediator, dinamika “*us versus them*” adalah racun untuk kerja sama yang sukses. Sejarah konflik cenderung terwujud dalam kepercayaan yang rendah, yang pada gilirannya mengarah pada komitmen yang rendah, strategi manipulatif, dan komunikasi yang tidak jujur. Dengan kata lain, sejarah konflik menghasilkan lingkaran setan kecurigaan, ketidakpercayaan, dan stereotip. Namun dari sudut pandang lain sejarah kolaborasi yang sukses dapat menghasilkan modal sosial dan

tingkat kepercayaan yang tinggi sehingga menghasilkan siklus kolaborasi yang menguntungkan. Oleh karena itu, Ansell dan Gash (2008) mengatakan bahwa di mana ada sejarah antagonisme antara *stakeholder*, maka manajemen koperasi tidak mungkin berhasil kecuali (a) ada dependensi yang kuat antara pemangku kepentingan atau (b) diambil langkah-langkah positif, dengan tingkat kepercayaan dan modal sosial di antara para *stakeholder*.

2. *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)

Kepemimpinan secara luas dilihat sebagai bahan penting dalam membawa pihak ke meja dan untuk mengarahkan mereka melalui tambalan kasar dari proses kolaboratif. Meskipun negosiasi “*unassisted*” kadang-kadang dimungkinkan, literatur menemukan bahwa kepemimpinan fasilitatif penting untuk menyatukan pemangku kepentingan dan membuat mereka terlibat satu sama lain dalam semangat kolaboratif. Fasilitasi adalah yang paling tidak mengganggu hak prerogatif yang bersangkutan; Peran fasilitator adalah untuk memastikan integritas dari proses pembangunan konsensus itu sendiri. Mediasi meningkatkan peran intervensi pihak ketiga dalam perincian penting negosiasi ketika para pihak tidak efektif dalam mencari manfaat yang saling menguntungkan. Jika para pihak yang terlibat tidak dapat mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka pihak ketiga dapat mencari solusinya.

Kepemimpinan penting untuk menetapkan serta mempertahankan aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan mengeksplorasi keuntungan bersama. Kepemimpinan penting untuk menyatukan, memberdayakan, dan melibatkan *stakeholder* dan memobilisasi mereka untuk mendorong kerjasama. Seorang pemimpin kolaboratif harus memiliki keterampilan dalam mendorong partisipasi yang luas dan aktif, lalu memastikan pengaruh dan kontrol yang luas, kemudian memfasilitasi dinamika tim yang produktif, serta memiliki ruang lingkup untuk meningkatkan proses yang luas. Kerja sama yang sukses juga dapat mempekerjakan banyak pemimpin secara formal dan informal, daripada mengandalkan satu pemimpin. Kerja sama yang efektif akan memerlukan waktu, sumber daya, serta keterampilan.

Adanya kepemimpinan juga penting untuk memberdayakan sekaligus mewakili *stakeholder* yang lebih lemah. Teknik “*transformative*” adalah prosedur mediasi dalam

membantu menciptakan “*balance of power*” di antara para pemangku kepentingan. Gaya kepemimpinan yang fasilitatif ini akan membuat pemangku kepentingan untuk mengeksplorasi kemungkinan keuntungan bersama. Dimana pemimpin fasilitatif harus memberikan suara yang bermakna kepada peserta dan mendorong peserta untuk mendengarkan satu sama lain. Pemimpin harus merangsang kreativitas dengan mensintesis pengetahuan dari beragam peserta sehingga kelompok dapat menciptakan ide dan pemahaman baru.

Maka apabila motivasi untuk berpartisipasi lemah, kekuasaan dan sumber daya didistribusikan secara asimetris, serta antagonisme sebelumnya tinggi, maka kepemimpinan menjadi semakin penting. Bila terjadi saling curiga di antara para *stakeholder*, disitulah dibutuhkan kepemimpinan untuk bertindak seperti broker yang jujur. Namun, ketika insentif untuk berpartisipasi lemah atau ketika kekuasaan asimetris, pemimpin harus ikut campur dalam membantu mempertahankan *stakeholder* serta memberdayakan aktor yang lebih lemah. Peran kepemimpinan berbeda ini dapat menciptakan ketegangan. Selain itu, terkadang ada ketegangan antara peran netralitas dan peran persuasi. Ketika konflik tinggi, peran perantara yang jujur sering kali diberikan kepada mediator luar yang tampaknya tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap hasilnya. Namun mediator luar mungkin juga memiliki sedikit pengaruh dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dengan demikian Ansell dan Gash menyimpulkan bahwa jika konflik tinggi dan kepercayaan rendah, namun alokasi kekuasaan yang relatif merata dan pemangku kepentingan yang terinsentif untuk berpartisipasi, maka *collaborative governance* dapat bekerja baik dengan mengandalkan layanan perantara yang jujur yang diterima dan dipercaya oleh masing-masing *stakeholder*. Wakil yang terbuka ini mungkin seorang penghubung yang profesional. Jika alokasi kekuasaan lebih asimetris, atau insentif untuk partisipasi lemah atau asimetris, tata kelola kooperatif lebih mungkin berhasil jika ada pemimpin “organik” yang kuat yang menginspirasi rasa hormat dan kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan sejak awal. Pemimpin “organik” diartikan sebagai mereka yang ada dalam komunitas *stakeholder*. Adanya para pemimpin ini dapat memungkinkan bergantung pada kondisi sekitar. Implikasi dari situasi ini adalah kemampuan untuk bekerja sama secara efektif dapat sangat dibatasi oleh kurangnya kepemimpinan.

3. *Institutional Design* (Desain Kelembagaan)

Desain kelembagaan mengacu pada aturan yang mendasari aturan dasar dalam kolaborasi, terpenting untuk legitimasi prosedural dari proses kolaboratif. Saluran ke proses kolaboratif mungkin merupakan masalah desain yang paling mendasar. Inti dari proses legitimasi ini akan bersumber pada peluang bagi *stakeholder* untuk berkomunikasi dengan pihak luar tentang dampak kebijakan, serta akan ada penegasan bahwa dampak kebijakan ini akan mewakili konsensus yang luas. Oleh karena itu, representasi yang lemah atau tidak lengkap berisiko merusak legitimasi hasil kemitraan.

Literatur menyatakan bahwa inklusivitas terkait erat dengan *eksklusivitas* forum kolaboratif yang mana forum kolaboratif adalah “satu-satunya permainan di kota”, akan lebih mudah untuk memotivasi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi; sebaliknya, ketika mereka dikecualikan, mereka mungkin terdorong untuk mencari tempat alternatif. Seperti yang dikatakan Para pemimpin meminta para *stakeholder* untuk terlibat dalam negosiasi dengan itikad baik karena untuk mengeksplorasi potensi pertukaran yang akan saling menguntungkan. Namun, pemangku kepentingan seringkali terlibat dalam proses kolaboratif dengan pola pikir skeptis. Mereka peka terhadap masalah keadilan, khawatir tentang kekuatan pemangku kepentingan lainnya, dan hidup dalam perspektif manipulasi. Keabsahan proses tersebut sebagian bergantung pada sudut pandang dari pemangku kepentingan bahwa mereka mendapatkan “*fair hearing*”. Aturan dasar yang jelas dan diterapkan secara konsisten maka akan meyakinkan *stakeholder* bahwa proses yang berjalan adil, merata, serta terbuka.

Proses yang transparan dapat meyakinkan *stakeholder* bahwa negosiasi publik adalah “*real*” serta proses kerjasama yang terjadi bukanlah tameng untuk kesepakatan pribadi di balik layar. Formalisasi struktur tata kelola terkadang dilihat sebagai fitur desain yang penting. Literatur tampaknya kurang setuju tentang pentingnya aturan konsensus. Konsensus dipandang sebagai mempromosikan representasi sudut pandang individu dan mendorong lebih banyak kerjasama. Namun, aturan konsensus sering dikritik karena mengarah pada hasil “penyebut umum terkecil”. Mereka juga dapat menyebabkan kebuntuan keputusan, meskipun mungkin untuk proses kolaboratif dimulai dengan prosedur konsensus dan kemudian kembali ke prosedur lain dalam kasus jalan buntu. Masalah desain kelembagaan terakhir ialah penggunaan tenggat waktu, walaupun para ahli menyatakan pentingnya tenggat waktu, terutama karena

pertemuan kerjasama bisa tidak ada habisnya. Masalahnya tenggat waktu dapat melemahkan sifat kolaborasi yang sedang berlangsung, secara tidak sengaja mengurangi insentif untuk kerja sama jangka panjang.

4. *The Collaborative Process* (Proses Kolaborasi)

The Process Collaborative terkadang memvisualisasikan kerja sama yang berkembang secara bertahap. Dimana Ansell dan Gash berpendapat bahwa model tahap kolaborasi penting untuk menarik perhatian pada perubahan strategi kolaborasi seiring dengan perubahan konteks dimana cara proses kolaboratif yang bersifat siklis dan bukan linier. Dimana kolaborasi sering bergantung pada pencapaian siklus yang baik antara komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman, serta hasil.

a. *Face-To-Face Dialogue* (Dialog Tatap Muka)

Semua *collaborative governance* didasarkan pada dialog langsung oleh setiap *stakeholder*. Sebagai proses yang berbasis konsensus, “komunikasi padat” yang dimungkinkan oleh dialog tatap muka diperlukan bagi para *stakeholder* untuk mengidentifikasi kesempatan yang saling menguntungkan. Namun, dialog tatap muka bukan hanya sarana negosiasi. Namun inti dari proses ini adalah membangun kepercayaan, saling menghormati, saling pengertian, dan komitmen. Maka Ansell dan Gash berpendapat bahwa dialog tatap muka merupakan syarat yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk kerja sama. Misalnya, dialog tatap muka dapat memperkuat prasangka atau perbedaan status atau meningkatkan antagonisme dan saling tidak menghormati. Namun sulit membayangkan kerja sama yang efektif tanpa dialog tatap muka. Literatur kolaborasi penuh dengan contoh bagaimana memecahkan cetakan melalui komunikasi tatap muka.

b. *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)

Rasa kurang percaya di antara para *stakeholder* merupakan titik awal dalam proses *collaborative governance*. Di mana, proses kerjasama tidak hanya negosiasi tetapi juga membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan. Para pemimpin yang berkolaborasi dengan baik menyadari bahwa mereka harus membangun

kepercayaan di antara para pesaing sebelum *stakeholder* berisiko dimanipulasi. Studi kasus menunjukkan bahwa membangun kepercayaan adalah proses yang memakan waktu yang membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai hasil kolaboratif. Jadi, Ansell dan Gash menyimpulkan jika prasejarah sangat bermusuhan, maka *stakeholder* harus memberikan waktu untuk menetapkan perbaikan yang efektif. Dikarenakan mereka tidak dapat membenarkan waktu dan biaya yang terlibat, karena mereka tidak boleh memulai strategi untuk bekerjasama.

c. *Commitment To The Process* (Komitmen Terhadap Proses)

Meskipun terminologi digunakan secara luas dalam literatur, studi kasus menunjukkan bahwa tingkat komitmen pemangku kepentingan terhadap kerjasama dalam menentukan variabel penting untuk menjelaskan keberhasilan atau kegagalan. Lemahnya komitmen kerja sama lembaga publik, terutama di tingkat kantor pusat, seringkali dipandang sebagai masalah tersendiri. Komitmen tentu saja terkait dengan motivasi awal untuk terlibat dalam tata kelola kolaboratif. Tetapi pemangku kepentingan mungkin ingin terlibat untuk memastikan pandangan mereka tidak diabaikan atau untuk memastikan legitimasi posisi mereka atau untuk memenuhi kewajiban hukum. Sebaliknya, komitmen untuk memproses berarti mengembangkan keyakinan bahwa bernegosiasi dengan itikad baik untuk kebaikan bersama adalah cara terbaik untuk mencapai hasil politik yang diinginkan. Keyakinan ini bukannya tanpa pamrih. Pengembang mungkin berpikir cara terbaik untuk membangun rumah adalah bernegosiasi dengan itikad baik dengan pecinta lingkungan. Namun komitmen untuk berkolaborasi tetap membutuhkan perubahan psikologis yang sangat penting, terutama di antara mereka yang mengambil sikap mutlak. Sebagai langkah pertama, kebutuhan akan perubahan ini terkadang disebut “pengakuan universal” atau “saling menghargai”.

Komitmen juga dapat menghasilkan masalah yang rumit. Komitmen terhadap proses kerjasama menginginkan kesediaan awal dalam mematuhi hasil musyawarah, bahkan jika harus mengarah ke arah yang tidak didukung sepenuhnya oleh pemangku kepentingan. Tentu saja, dasar *collaborative governance* yang berorientasi pada konsensus sangat mengurangi risiko bagi pemangku kepentingan.

Namun dinamika tawar-menawar dapat mengarah ke arah yang tidak terduga, dan *stakeholder* dapat mengalami tekanan untuk menyesuaikan diri dengan posisi yang tidak sepenuhnya mereka anut. Sebelum berkomitmen pada suatu proses yang dapat menuju ke arah yang tidak dapat diprediksi, para pemangku kepentingan harus merasa yakin bahwa langkah musyawarah dan negosiasi memiliki karakter. Rasa komitmen dan kepemilikan dapat ditingkatkan dengan meningkatnya kontribusi.

Dimensi komitmen terkadang dapat dinamakan “*ownership of the process*”. Dalam proses permusuhan atau manajerial yang tipikal, *stakeholder* non negara merupakan pengamat luar pengambilan keputusan. Mereka mungkin berusaha untuk melobi, menekan, atau mengaruhi pembuat keputusan lembaga sipil, tetapi lembaga itulah yang pada akhirnya bertanggung jawab atas hasil kebijakan. Tata kelola kolaboratif menggeser “*ownership*” pengambilan keputusan dari agensi ke pemangku kepentingan yang bertindak secara kolektif. Sekali lagi, ini menyiratkan dilema yang rumit. Pemangku kepentingan tidak lagi sekadar pengkritik proses. Mereka kini “*own*” proses pengambilan keputusan secara kolektif dengan pemangku kepentingan lain yang mungkin memiliki pandangan yang bertentangan.

Kepemilikan menyiratkan tanggung jawab bersama dalam proses. Tanggung jawab ini mengharuskan *stakeholder* untuk mengamati hubungan mereka dengan *stakeholder* lainnya dalam sudut pandang baru, dimana mereka berbagi tanggung jawab dengan lawan mereka. Kepemilikan bersama mungkin terhalang oleh ketidakseimbangan kekuatan atau perbedaan persepsi tentang siapa yang harus mengambil inisiatif. Contohnya dalam wawancara dengan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemanenan bulu babi yang menemukan bahwa personel perikanan dan penyelam memiliki persepsi yang berbeda tentang tingkat kepemilikan mereka atas proses kolaboratif. Penyelam menganggap diri mereka membantu staf perikanan, sedangkan staf perikanan mengharapkan penyelam untuk memimpin proses pengambilan keputusan di beberapa area.

Insentif yang lemah menjadikan bentuk-bentuk kolaborasi yang dimandatkan mungkin penting, namun kerjasama yang diamanatkan juga dapat menyamarkan kurangnya komitmen nyata dari pihak pemangku kepentingan. Karena itu, ketika

tata kelola kolaboratif diamanatkan, mencapai “pembelian” masih merupakan aspek penting dari proses kolaboratif. Tingkat saling ketergantungan yang tinggi di antara pemangku kepentingan dapat meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi, tetapi juga meningkatkan insentif untuk bertindak dengan cara yang manipulatif serta korup. Godaan ini mungkin tertahan dimana kolaborasi bukanlah kesepakatan satu kali tetapi bergantung pada kerja sama yang berkelanjutan. Literatur tentang aksi kolektif, tentu saja, menunjukkan bahwa cakrawala masa depan ini bisa menjadi syarat penting bagi timbal balik. Maka dari itu strategi tata kelola kolaboratif sangat cocok untuk situasi yang membutuhkan kerja sama berkelanjutan.

d. *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama)

Pada titik tertentu dalam suatu kemitraan, para pemangku kepentingan perlu menyepakati apa yang dapat mereka capai bersama. Pemahaman umum telah ditafsirkan secara berbeda dalam literatur, seperti misi bersama, visi bersama, latar belakang bersama, tujuan bersama, ideologi bersama, tujuan yang jelas, arah strategis yang jelas, dan keselarasan nilai-nilai inti. Pemahaman bersama juga dapat melibatkan persetujuan atas definisi suatu masalah atau persetujuan atas pengetahuan yang relevan yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Pengembangan pemahaman bersama dapat dilihat sebagai bagian dari “proses pembelajaran kooperatif” yang lebih besar.

e. *Intermediate Outcomes* (Hasil Sementara)

Beberapa literatur kasus menyatakan kemungkinan kerjasama yang lebih besar ketika tujuan dan manfaat yang mungkin diperoleh dari kemitraan relatif spesifik dan ketika “*small wins*” dapat diperoleh dari kemitraan. Walaupun hasil sementara ini sendiri dapat mewakili hasil yang nyata, oleh karena itu merupakan proses penting dengan implikasi penting untuk membangun momentum yang dapat mengarah pada kesuksesan kerja sama. Manfaat kecil ini dapat mengalir ke dalam kemitraan, menciptakan lingkaran kepercayaan dan komitmen yang baik. Jadi, jika

penolakan sebelumnya tinggi dan komitmen jangka panjang diperlukan untuk membangun kepercayaan, hasil antara yang mengarah pada kemenangan kecil sangatlah penting. Namun jika dari beberapa kasus pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan tidak dapat memperkirakan keuntungan kecil, mereka tidak boleh memulai jalur kerja sama. Akibatnya, kemenangan kecil mungkin bukan strategi yang tepat untuk membangun kepercayaan ketika pemangku kepentingan memiliki tujuan yang lebih besar yang tidak dapat dengan mudah dipecah menjadi hasil antara. Mereka berpendapat bahwa dalam situasi ini, kepercayaan dapat dibentuk melalui eksplorasi bersama awal dari keseluruhan nilai kemitraan.

5. Conclusion: Time, Trust, And Interdependence (Kesimpulan: Waktu, Kepercayaan, Dan Ketergantungan)

Istilah “*collaborative governance*” menjanjikan imbalan yang manis. Tampaknya menjanjikan bahwa jika kita memerintah secara kolaboratif, maka dapat menghindari tingginya biaya pembuatan kebijakan permusuhan, memperluas partisipasi demokratis, dan bahkan mengembalikan rasionalitas manajemen publik. Dimana Ansell dan Gash menekankan tiga kemungkinan inti dari *collaborative governance* yaitu waktu, kepercayaan, dan saling ketergantungan. Banyak studi kasus mencatat bahwa tata kelola kolaboratif adalah proses yang memakan waktu, dan pembangunan konsensus khususnya, memakan waktu dan tidak dapat diburu-buru. Ketika meningkatkan kepercayaan sangat penting, waktu yang dibutuhkan untuk membangun kepercayaan dapat menambah banyak waktu untuk proses tersebut. Oleh karena itu, tata kelola kolaboratif mungkin bukan strategi yang baik untuk situasi di mana lembaga perlu membuat atau menerapkan keputusan dengan cepat. Namun, perlu ditekankan bahwa investasi awal dalam kolaborasi yang efektif terkadang dapat menghemat banyak waktu dan energi dalam penerapan hilir. Setelah pemangku kepentingan mencapai konsensus kerja, dokumen tersebut menunjukkan bahwa implementasi dapat terjadi dengan cukup cepat. Dengan demikian, pembuat kebijakan mungkin lebih menyukai tata kelola kolaboratif dimana mereka mengharapkan proses implementasi yang sulit.

Lebih lanjut, Ansell dan Gash juga menyatakan bahwa situasi konflik tinggi yang ditandai dengan tingkat kepercayaan yang rendah masih dapat dikelola secara kooperatif jika para pemangku kepentingan memiliki saling ketergantungan yang tinggi. Saling

ketergantungan menumbuhkan keinginan untuk terlibat dan berkomitmen untuk kerjasama yang berarti, dan dapat membangun kepercayaan dalam situasi saling ketergantungan yang kuat. Sebaliknya, dimana saling ketergantungan lebih lemah, akan sulit membangun kepercayaan secara efektif. *Stakeholder* akan terlibat dalam kolaborasi dengan satu mata pada strategi alternatif (non kolaboratif). Jika salah satu pemangku kepentingan mengancam untuk membelot dari kolaborasi, komitmen semua pemangku kepentingan kemungkinan besar akan terganggu, dan akan sulit untuk mengembangkan rasa memiliki, pengertian, dan kepercayaan. Penting untuk diperhatikan bahwa kepercayaan dan saling ketergantungan sebagian bersifat endogen keduanya dibentuk secara positif atau negatif oleh proses kolaboratif itu sendiri. Maka *stakeholder* yang memasuki proses kolaboratif mungkin tidak menganggap diri mereka saling bergantung. Namun melalui dialog dengan para *stakeholder* lainnya dan melalui pencapaian hasil antara yang berhasil, mereka dapat mencapai pemahaman baru tentang hubungan mereka.

C. Tujuan Collaborative Governance

Terdapat berbagai alasan yang menjadi latar belakang adanya kolaborasi pada setiap lembaga. Dimana pemerintahan kolaboratif muncul tiba-tiba karena disebabkan oleh gagasan dari berbagai pihak pendukung yang bekerja sama dan berkoordinasi dalam memecahkan masalah yang dihadapi publik. Adanya pemerintahan yang berkolaboratif ialah dibentuk sebagai respon atas kegagalan dalam sebuah pelaksanaan kebijakan publik, biaya tinggi, serta politisasi regulasi (Ansell dan Gash, 2008:54).

Tata kelola kolaboratif tidak muncul begitu saja, tetapi dilatarbelakangi oleh berbagai dimensi. *Collaborative governance* dapat diamati dari faktor perlunya lembaga untuk menjalin kerjasama, karena tergantung pada kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan program kegiatannya sendiri. Oleh karena itu, kerjasama juga timbul karena keterbatasan dana dari suatu instansi, dimana kerjasama tidak hanya berasal dari satu instansi saja, melainkan instansi lain yang ikut andil dalam proses kerjasama tersebut. Kolaborasi bisa juga dikatakan sebagai salah satu aspek ilmu pemerintahan, apalagi dengan munculnya konsep *governance* yang melibatkan beberapa aktor seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaannya. Kerja sama dapat menjadi alternatif dalam mengembangkan keterlibatan *stakeholder* dan kegagalan atas manajerialisme suatu lembaga. Kompleksitas yang timbul

dalam perkembangannya mengakibatkan keadaan saling ketergantungan antar lembaga yang mengakibatkan tuntutan untuk bekerja sama.

Penjelasan yang lebih jelas selanjutnya dikemukakan oleh Ansell dan Gash dalam Sudarmo yang menunjukkan tata kelola kolaboratif timbul secara adaptif maupun disengaja dibuat secara sadar karena alasan akan pentingnya konsep ini untuk diterapkan, termasuk komplikasi dan saling ketergantungan antar lembaga, konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat potensial serta sulit untuk diselesaikan. Selain itu kolaborasi juga dikatakan sebagai usaha menemukan cara baru dalam menggunakan arena kelembagaan lain untuk menghambat keputusan, memobilisasi kelompok kepentingan, dan mahalnnya politisasi regulasi. Pandangan tersebut menjelaskan bahwa *collaborative* dilakukan karena kompleksitas saling ketergantungan dari setiap lembaga. Kolaborasi juga diharapkan muncul karena adanya kepentingan masing-masing kelompok yang menciptakan sebuah kolaborasi. Dengan melakukan berkolaborasi maka dapat memberikan arahan kepada kelompok kepentingan. Dimana kolaborasi dapat menjadi solusi atas permasalahan terkait buruknya implementasi program yang dilakukan oleh satu lembaga, karena adanya keterbatasan. Lebih dari itu kerjasama juga dapat menjadi solusi dalam mengatasi biaya dalam suatu kegiatan.

Dengan demikian bentuk kolaborasi yang terjadi dalam skripsi ini ialah kolaborasi antara pemerintah desa dengan pihak BUMDes dan Gapoktan guna meningkatkan kesejahteraan petani, yang dianalisis menggunakan 5 (lima) proses kolaborasi yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu melalui dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Sehingga adanya praktik kerjasama ini dapat menggali informasi dari pemerintah desa dalam usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan desa dengan mengembangkan aspek sarana serta prasarana atas sumber daya manusia dari lembaga-lembaga yang berkolaborasi tersebut.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA KARANGHARUM

A. Geografis dan Demografis Desa Karangharum

Gambar 3. Peta Desa Karangharum



Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Karangharum

Desa Karangharum terletak di wilayah Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Desa Karangharum merupakan salah satu dari 7 desa yang berada di Kecamatan Kedungwaringin, dengan jumlah penduduk yang sedikit dan wilayah yang paling kecil yang hanya mempunyai luas sebesar 3.39 km², namun masih didominasi oleh lahan persawahan. Desa Karangharum berada pada posisi yang berbatasan dengan beberapa desa diantaranya:

Sebelah Barat	: Desa Karang Sari
Sebelah Utara	: Desa Karang Mukti
Sebelah Timur	: Desa Waringin Jaya

Sebelah Selatan : Desa Karang Sambung

(Sumber: BPS Kecamatan Kedungwaringin 2022)

Tabel 2

Jarak ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten/Kota Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kedungwaringin (km), 2021

Desa/Kelurahan	Jarak ke Ibukota Kecamatan (km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota (km)
Bojongsari	1	20
Kedungwaringin	1	12
Waringinjaya	3	22
Karangsambung	4	20
Karangharum	6	30
Mekarjaya	4	25
Karangmekar	5	31

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022

Berdasarkan **Tabel 2** diatas diketahui bahwa jarak Desa Karangharum cukup jauh dari pusat Ibukota yaitu Kabupaten Bekasi yang berjarak 30 km. Jika menggunakan sepeda motor ini akan memakan waktu sekitar 40 menit, sedangkan dengan mobil atau angkutan umum akan memakan waktu sekitar 46 menit. Sedangkan jarak ke ibukota kabupaten adalah 6 km. Lokasi Desa Karangharum ini berada di ujung timur Kabupaten Bekasi berbatasan langsung dengan Kabupaten Karawang sehingga Desa Karangharum ini lebih dekat dengan pusat Kabupaten Karawang yang hanya berjarak 9,6 km dibandingkan ke ibukotanya sendiri yaitu Kabupaten Bekasi. Letak geografis Desa Karangharum berada di dataran yang rendah namun memiliki lahan pertanian yang luas serta mendominasi. Sehingga desa ini merupakan salah satu desa di Kedungwaringin yang mempunyai tingkat kesuburan tanah yang sesuai untuk lahan pertanian yaitu tanaman padi. Dikarenakan padi menjadi produk yang cukup penting dan berpengaruh di Desa Karangharum, maka mayoritas lahan yang ada di desa ini memang dimanfaatkan untuk tanaman padi tersebut. Desa Karangharum sendiri terdiri atas 3 (tiga) dusun, 6 RW (Rukun Warga), dan 13 RT (Rukun Tetangga).

Tabel 3

Statistik Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi pada tahun 2021

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	LAKI-LAKI	2,524
2	PEREMPUAN	2,524
JUMLAH TOTAL		5,048

Sumber: BPS Kecamatan Kedungwaringin 2022

Berdasarkan **Tabel 3**, diketahui dari data statistik penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2021 desa ini mempunyai penduduk sebanyak 5048 jiwa yang terdiri dari 2524 jiwa penduduk laki-laki dan 2524 jiwa penduduk perempuan dengan 1.694 Kepala Keluarga, yang mana jumlah penduduk Desa Karangharum ini adalah paling sedikit di Kecamatan Kedungwaringin. Dari tabel diatas mengungkapkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Karangharum setara.

Tabel 4

Statistik Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Tahun 2021

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		Laki-Laki	Perempuan		
1	0-14	656	606	1.262	25%
2	15-65	1.767	1.767	3.534	70%
3	65+	101	151	252	5%
Total		2.524	2.524	5.048	100%

Sumber: BPS Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi 2022

Berdasarkan data pada **Tabel 4** diketahui bahwa penduduk Desa Karangharum untuk kelompok dengan umur 0-14 tahun terdapat 1.262 jiwa. Kemudian untuk usia 15-65 tahun terdapat yaitu 3.534 jiwa. Sedangkan untuk kelompok umur 65 tahun ke atas hanya terdapat 252 jiwa. Sehingga dari data tersebut diketahui kelompok umur dengan usia produktif yaitu 15-65 tahun mendominasi wilayah Desa Karangharum.

Pembangunan ekonomi yang terjadi di desa ini dinilai masih dalam tahap berkembang. Mata pencaharian rata-rata penduduk Desa Karangharum adalah petani yang diikuti oleh buruh pabrik dan pedagang. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Desa Karangharum ini berada di Kabupaten Bekasi yang merupakan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten) tertinggi ketiga di Indonesia yaitu sebesar Rp 5.055.874,60 (bekasikab.go.id, 2022). Namun pada **Tabel 5** dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk desa ini masih didominasi oleh seorang petani padi.

Tabel 5

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Karangharum

No	Jenis	Persentase
1	Belum/Tidak Bekerja	10%
2	Pelajar/Mahasiswa	15%
3	Petani/Peternak	25%
4	Karyawan Swasta	20%
5	Pedagang	20%
6	Pegawai Negeri Sipil	5%
7	Dll	5%
Jumlah		100%

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat, walaupun wilayah Kabupaten Bekasi sudah menjadi kawasan industri, tetapi pekerjaan menjadi seorang petani mendominasi Desa Karangharum yang dikarenakan wilayah desa ini masih didominasi oleh beberapa lahan persawahan. Hal inilah yang membuat kondisi ekonomi masyarakat desa Karangharum pun masih beragam, karena masih ada masyarakat yang berpenghasilan rendah (miskin), menengah, dan tinggi (kaya).

Pemahaman masyarakat Desa Karangharum mengenai pendidikan terbilang cukup baik, akan tetapi minat mereka untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi masing sangat kurang. Dimana pendidikan merupakan kebutuhan pokok manusia, yang bertugas menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pembangunan bangsa dan Negara.

Kurang minatnya masyarakat Desa Karangharum terhadap pendidikan disebabkan oleh faktor perekonomian masyarakat desa ini yang tergolong masih menengah kebawah. Sebagian masyarakat Desa Karangharum juga percaya bahwa pendidikan tidak menjamin masa depan seseorang, terbukti dengan banyaknya lulusan perguruan tinggi yang menganggur sehingga masyarakat desa memiliki persepsi yang salah tentang pendidikan. Sehingga pada akhirnya mereka tidak tertarik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 6

Sarana Pendidikan di Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi

No	Jenis Sekolah	Status		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	PAUD/TK	0	4	4
2	SD/MI	3	1	4
3	SMP/MTS	0	1	1
4	SMA/MA/SMK	0	1	1
5	Perguruan Tinggi	0	0	0
Total		3	7	10

(Sumber: BPS Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi 2020)

Namun pada **Tabel 6** di atas dapat diketahui bahwa untuk mencapai tingkat pendidikan sampai jenjang SMA sederajat cukup dapat dijangkau dengan mudah di Desa Karangharum. Dimana Desa Karangharum sendiri terdapat beberapa sekolah diantaranya 3 Sekolah Dasar Negeri (SDN), 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, 1 Madrasah Tsanawiyah Swasta, dan 1 Madrasah Aliyah (MA) Swasta. Dengan demikian di Desa Karangharum terdapat 6 (enam) sarana pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai akses pendidikan di desa ini terbilang mudah untuk dijangkau.

B. Sosial Budaya Desa Karangharum

Penduduk Desa Karangharum memiliki latar belakang suku, budaya, serta tingkat pendidikan yang hampir serupa, dikarenakan desa ini masih tinggi dengan nilai kekeluargaan. Dari segi keagamaan sendiri mayoritas penduduk di Desa Karangharum adalah pemeluk agama Islam, bahkan bisa dikatakan seluruh penduduk Desa Karangharum adalah beragama Islam.

Tabel 7
 Statistik Penduduk Desa Karangharum Berdasarkan Agama
 Per tanggal 01-01-2023

No	Keterangan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	2524	2524	5048
2	Kristen	0	0	0
3	Katolik	0	0	0
4	Hindu	0	0	0
5	Budha	0	0	0
6	Khonghucu	0	0	0
Total				5048

Sumber: Dokumen Desa Karangharum 2022

Seperti terlihat pada **Tabel 7**, sosial keagamaan masyarakat Desa Karangharum 100% beragama Islam. Situasi sosial keagamaan di Desa Karangharum membuat semua warga hidup rukun sebagai tetangga. Kehidupan religius yang sebenarnya mengajarkan setiap orang untuk saling menghormati dan membantu. Dengan 100% penduduknya beragama Islam maka ini memungkinkan setiap masyarakat di desa ini untuk berinteraksi satu sama lain dengan mudah, selain itu situasi sosial juga membuat seluruh masyarakat tidak membandingkan atau merendahkan martabat orang lain. Jenis praktik sosial keagamaan di Desa Karangharum ditunjukkan melalui kegiatan sehari-hari seperti pengajian, tahlilan, dan yasinan.

Tabel 8
 Tempat Ibadah Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin

N0	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushola	12
3	Gereja, Pura, dll	-
Total		14

Sumber: Dokumen Desa Karangharum 2022

Keyakinan beragama masyarakat Desa Karangharum dapat dikatakan cukup baik, hal ini terlihat dari adanya masjid dan banyaknya mushola yang didirikan. Meski jamaah sholat di setiap masjidnya tidak selalu penuh, namun kepedulian terhadap agama bisa dibilang baik mengingat fasilitas keagamaan yang ada di lingkungan mereka sangat memadai dan banyak. Mereka menyadari kebutuhan akan agama, yang juga merupakan kebutuhan spiritual masyarakat. Bahkan masyarakat selalu mengadakan kegiatan pengajian ibu-ibu secara rutin setiap hari yang terdapat di 20 (dua puluh) tempat yang berada di Desa Karangharum. Sedangkan kegiatan untuk bapak-bapaknya ada pengajian yang dilakukan pada malam senin, selasa, rabu dan malam kamis dengan kegiatan berupa yasinan dan tawasulan.

Kebudayaan serta kekerabatan antar warga di Desa Karangharum ini masih sangat erat. Dalam faktor budaya terdapat istilah “*liliuran*”, yaitu berarti gotong royong yang merupakan hubungan timbal balik antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, yang saling bergotong royong menyelesaikan suatu hajat masyarakat dengan tanpa imbalan, namun menjadi hutang tenaga di kemudian hari. Terdapat pula istilah “*tandur*”, yaitu proses dalam penanaman bibit padi yang sudah siap tanam yang dilakukan oleh para masyarakat Desa Karangharum yang berprofesi sebagai petani saat musim tanam padi tiba. Terdapat pula istilah “*ngendong*”, yaitu menemani begadang sampai pagi atau menginapkan warga yang sedang hajatan, yang baru saja melahirkan, serta warga yang sedang tertimpa musibah seperti kematian atau sakit.

C. Profil Petani Desa Karangharum

Gambar 4. Luas Lahan Persawahan Desa Karangharum



Sumber: <https://maps.app.goo.gl/kLJBhKDdYPxc1Gvo6>

Luas areal persawahan masyarakat Desa Karangharum cukup luas, 2.04 hektar digunakan untuk budidaya padi, dan sisanya merupakan areal pemukiman desa dan perkebunan. Jenis tanah di Desa Karangharum cocok untuk ditanami padi sesuai dengan pola tanam musim hujan. Beras merupakan makanan pokok masyarakat desa Karangharum bahkan masyarakat Indonesia, sehingga tidak heran jika penduduk desa bekerja keras untuk menanam padi setiap tahunnya. Baik itu bercocok tanam maupun panen padi, masyarakat desa Karangharum memiliki model bercocok tanam yang modern, hal ini terlihat dari proses persiapan tanam yang biasa dilakukan masyarakat menggunakan traktor untuk membajak tanah dan mempersiapkannya untuk ditanami. Pada musim panen pun mereka menggunakan mesin perontok padi yaitu mesin sintok, sehingga petani dan masyarakat dapat menikmati hasil produksi padi yang nantinya menjadi beras atau jika lebih dijual ke pasar.

Petani di Desa Karangharum hidup dari bercocok tanam di lahan persawahan, terutama mereka yang bertani *full time* dan tidak mendapatkan buah dari pekerjaan lain. Para petani tersebut memainkan berbagai peran di sektor pertanian, termasuk:

- 1) Mencabut rumput/*ngerambet*, membersihkan sisa rumput atau sampah plastik di sawah dan biasanya dilakukan pada pagi hari.
- 2) Persemaian, yaitu kegiatan membuat benih menjadi bibit yang siap ditanam. Lokasi persemaian ini umumnya berada di tengah lahan yang akan ditanami padi, sehingga dapat memudahkan petani untuk membagi bibit.
- 3) Memupuk, pemupukan ini dilakukan pertama kali pada saat tanaman masih berumur kira-kira 25 hari. Agar tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur dan terhindar dari serangan hama.
- 4) Penanaman bibit/*tandur*, yaitu kegiatan menanam bibit atau benih padi yang biasanya dilakukan dengan cara berjalan membungkuk dan mundur agar benih padi yang telah ditanam tidak terinjak oleh kaki petani.
- 5) Penyemprotan/*penyempretan*, yaitu kegiatan dalam yang bertujuan untuk mengendalikan hama dan penyakit yang mengganggu tanaman padi. Biasanya proses penyemprotan ini terjadi 4 kali dalam satu kali tanam padi yaitu penyemprotan untuk menghilangkan keong, penyemprotan urea 1 dan 2, serta penyemprotan untuk menumbuhkan buah pada tanaman padi.

- 6) Potong padi/*ngarit*, yaitu proses pemotongan padi yang dilakukan oleh beberapa petani saat musim panen padi tiba.

Berikut ini data petani di Desa Karangharum berdasarkan kelompok yang telah peneliti peroleh dari dokumen BPP Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi.

Tabel 9
Data Kelompok Tani di Desa Karangharum Kecamatan
Kedungwaringin Kabupaten Bekasi

No	Nama Kelompok Tani	Struktur Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Tahun Berdiri	Keterangan
1	Karya Tani	Ketua : A. Gojali Sekretaris : Marsan Bendahara : Yayat	20	1983	Padi Sawah
2	Taruna Tani	Ketua : Masim Sekretaris : Toyib Bendahara : Manta	18	1984	Padi Sawah
3	Harapan Tani	Ketua : Ucep Somantri Sekretaris : Osen Bendahara : Raman	15	1984	Padi Sawah
4	Bina Tani	Ketua : H. Oman Sekretari : Samsudin Bendahara : Rimansyah	25	2010	Padi Sawah
5	Harapan Bahagia	Ketua : Dirja Sekretaris : H. Asmad Bendahara : Embih	14	2006	Padi Sawah
6	Sri Tunggal Jaya	Ketua : Join Sekretaris : Sonin Bendahara : Otik	13	1980	Padi Sawah
7	Mustika Jaya	Ketua : Yayat Sekretaris : Acep Bendahara : Irpan	21	1982	Padi Sawah
8	Makmur Jaya	Ketua : A. Basuki Sekretaris : Aja Bendahara : Kemin	9	2006	Padi Sawah
9	Karya Mulya Mandiri	Ketua : Ucup Sekretaris : Herman Bendahara : A. Gojali	24	2006	Padi Sawah

10	Melati	Ketua : Siti Khodijah Sekretaris : Wiwi Bendahara : Farida	20	2006	Peng. Hasil
11	Duta Tani	Ketua : Kasman Sekretaris : Harsono Bendahara : E. Jaenudin	8	2010	Ternak
12	Siliwangi	Ketua : Yayat Sekretaris : Acim Bendahara : A. Gojali	13	2012	Ternak
13	Maju Jaya	Ketua : Dirja Sekretaris : Rinta Bendahara : Enan	12	2012	Ternak
14	Poncol	Ketua : Masim Sekretaris : Usman Bendahara : Toyib	12	2012	Ternak
Total Petani Desa Karangharum			224		

Sumber: BPP Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi

Berdasarkan **Tabel 9** di atas maka dapat diketahui bahwa di Desa Karangharum terdapat 14 (empat belas) kelompok petani yang terdiri dari petani laki-laki dan perempuan. Namun 9 (sembilan) diantaranya adalah kelompok khusus untuk petani padi. Dengan total keseluruhan petani di Desa Karangharum ada 224 petani. Sektor pertanian merupakan mata pencaharian paling banyak penduduk Desa Karangharum. Dimana kelompok tani dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 67/ PERMENTAN/ SM. 050/ 12/ 2016 menimpa pembinaan kelembagaan petani, selaku sekumpulan petani/ peternak/ pekebun yang dibangun oleh para petani atas bawah kesamaan kepentingan, kesamaan keadaan area sosial, ekonomi, serta sumberdaya, kesamaan komoditas, serta keakraban buat tingkatkan serta meningkatkan usaha anggota. meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Hasil panen padi di Desa Karangharum sangat bergantung dengan air, dimana desa ini mendapatkan pasokan air melalui saluran buangan dari sungai utama yaitu Sungai Ranggon. Sehingga pada saat musim *tandur* para petani desa ini bekerjasama untuk membendung aliran air agar masuk kedalam saluran sawah mereka. Dimana hasil panen sawah di desa ini hanya terjadi 2 kali dalam satu tahun. Air menjadi sumber hambatan utama dalam pertanian di Desa Karangharum, namun selain itu ada lagi yang menjadi kendala yaitu hama pada tanaman padi

yang tidak dapat diprediksi datangnya hama-hama yang sering menyerang yaitu hama tikus dan hama ulat yang bila hama tersebut menyerang para petani harus bekerja lebih ekstra dan seringkali terjadi gagal panen.

Di Desa Karangharum sendiri terdiri atas 4 karakteristik petani yaitu petani pemilik, petani gadai, petani sewa, dan buruh tani.

1. Petani Pemilik, yaitu orang yang memiliki lahan persawahan sendiri dan menggarap lahannya sendiri atau menggunakan jasa buruh tani.
2. Petani Gadai, yaitu mereka yang menggadai lahan persawahan sampai batas waktu yang ditentukan (biasanya tahunan), dan menggarap lahannya sendiri atau menggunakan jasa buruh tani. Sistem gadai ini sama seperti cara penggadaian biasanya dimana para petani pemilik meminjam sejumlah uang kepada orang, dengan jaminan sawah mereka. Setelah petani pemilik tersebut membayar kembali uang yang telah dipinjam maka lahan persawahan tersebut akan kembali ke pemiliknya.
3. Petani Sewa, yaitu mereka yang menyewa lahan persawahan kepada si petani pemilik sampai batas waktu yang ditentukan, petani sewa ini menggarap lahannya sendiri atau menggunakan jasa buruh tani. Biasanya untuk rata-rata penyewaan lahan pertanian di Desa Karangharum ini terjadi setiap 6 bulan sekali atau satu kali musim tanam padi, jadi setiap 6 bulan setelah musim panen atau musim tander para petani penyewa tersebut akan menyetorkan sejumlah uang kepada si pemilik lahan untuk membayar penyewaan lahan atau melakukan kesepakatan untuk perpanjangan penyewaan lahan atau tidak.
4. Buruh Tani, yaitu mereka yang bekerja di lahan pemilik sawah. Buruh tani ini bekerja dari proses sebelum musim penanaman benih padi sampai pasca panen padi. Untuk pemberian upah sendiri dapat tergantung kepada buruh tani atau pemilik lahan dimana ada buruh tani yang mendapatkan upah pada awal penanaman padi, atau setelah panen padi, serta ada pula buruh tani yang mendapatkan upah secara bertahap. Dikarenakan upah yang minim maka terkadang di Desa Karangharum para buruh tani memiliki 3-4 garapan lahan persawahan.

Berikut ini peneliti sampaikan tabel terkait pendapatan dan pengeluaran dari empat kategori petani tersebut berdasarkan subjek wawancara peneliti dengan 10 petani yang berada di Desa Karangharum.

Tabel 10
 Penghasilan Petani Di Desa Karangharum
 Berdasarkan Subjek Penelitian
 Periode Tanam Padi Bulan Juli-Oktober 2022 (3 Bulan 10 Hari)

No	Nama	Luas Lahan Garapan	Penghasilan	Pendapatan	Pengeluaran	Keterangan
1	Nasan	2 Hektar	5 Ton	25 Juta (Harga Padi 5.000/kg)	20 Juta	Petani
2	Daming	1 Hektar	6 Ton	30 Juta (Harga Padi 5.000/kg)	10 Juta	Petani
3	Damang	1 Hektar	7 Ton	35 Juta (Harga Padi 5.000/kg)	10 Juta	Petani
4	Enjuh	1 Hektar	5 Ton	25 Juta (Harga Padi 5.000/kg)	10 Juta	Gadai
5	Masnah	1 Hektar	6 Ton	24 Juta (Harga Padi 4.000/kg)	10 Juta	Gadai
6	Rami	1 Hektar	6 Ton	24 Juta (Harga Padi 4000/kg)	10 Juta + 6 Juta Biaya Sewa = 16 Juta	Sewa
7	Ano Sumarno	1,5 Hektar	7,5 Ton	30 Juta	15 Juta + 6 Juta Biaya Sewa = 21 Juta	Sewa
8	Marsan	4000 Meter	2,5 Ton	2,5 Juta	-	Kuli
9	Nakip	1 Hektar	6 Ton	3 Juta	-	Kuli
10	Abo	1 Hektar	5 Ton	2,7 Juta	-	Kuli

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti dengan Petani di Desa Karangharum

Adapun rata-rata pengeluaran petani di Desa Karangharum berdasarkan hasil wawancara, yang telah peneliti rinci ialah sebagai berikut:

Tabel 11
Pengeluaran Rata-Rata Petani di Desa Karangharum

NO	PENGELUARAN	BIAYA
1	Traktor	Rp. 1.200.000
2	Tandur	Rp. 1.200.000
3	Pupuk	Rp. 1.500.000
4	Obat – Obatan (Fungisida, Rumput, dll)	Rp. 2.000.000
5	Ngarambet	Rp. 1.000.000
6	Kuli Sawah	Rp. 2.500.000
7	Pajak tanah, dll	Rp. 600.000
TOTAL		Rp. 10.000.000

Sumber: Petani Desa Karangharum

Berdasarkan **Tabel 11** di atas diketahui bahwa rata-rata pengeluaran petani Desa Karangharum ialah sebesar 10 juta rupiah yang meliputi biaya traktor, *tandur*, pemupukan, obat-obatan, *ngarambet*, kuli sawah, pajak tanah dan lain-lain. Biaya pengeluaran tersebut dikeluarkan untuk setiap 1 hektar lahan persawahan.

BAB IV

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN BEKASI

Pemerintah secara garis besar memegang 4 (empat) peran utama dalam masyarakat yaitu peran sebagai alokasi sumber daya, peran sebagai regulator, peran untuk kesejahteraan sosial, dan peran untuk mengelola ekonomi makro (I Gusti Ngurah Agung Sukrisna, 2018). Peran-peran tersebut dapat pemerintah realisasikan dari tingkat pemerintah yang paling rendah yaitu desa. Jika desa sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 5 sebagai suatu wilayah yang ditinggali oleh banyak orang sebagai suatu kesatuan masyarakat, termasuk kesatuan masyarakat hukum dengan organisasi pemerintahan minimal langsung di bawah Camat. Pemerintah Desa mempunyai hak untuk mengatur daerahnya sendiri dalam batas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa selaku badan eksekutif yang mengurus pemerintahan desa.

Mayoritas mata pencaharian masyarakat di pedesaan adalah di bidang pertanian, dikarenakan sumber daya alam yang tersedia masih melimpah dan luas lahan yang masih mendominasi serta subur. Seperti di Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi, yang wilayahnya masih didominasi oleh lahan pertanian dan mayoritas masyarakatnya pun bekerja sebagai petani. Walaupun desa ini berada di wilayah Kabupaten Bekasi yang merupakan wilayah industri terbesar di Asia Tenggara (Prakoso, 2023). Tetapi tidak menjadikan warga Desa Karangharum untuk beralih profesi dan tetap mempertahankan lahan mereka. Maka dari itu dibutuhkan peran dari Pemerintah Desa untuk lebih dapat mensejahterakan petani, melalui program-program yang lebih baik.

Badan Pusat Statistik (2022), mempunyai beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga masyarakat Indonesia dari masa ke masa dan perbandingan antar provinsi dengan luas tempat tinggal di perkotaan atau pedesaan, tingkat kesejahtraannya adalah dipelajari menurut delapan bidang yang meliputi kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, tingkat dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan sosial lainnya. Klasifikasi yang digunakan terdiri dari dua

klasifikasi, yaitu rumah tangga dalam kategori sejahtera dan tidak sejahtera. Untuk mengukur setiap klasifikasi kesejahteraan ditentukan dengan menggunakan skor total. Namun peneliti dalam skripsi ini hanya menggunakan 3 (tiga) indikator dalam menentukan kesejahteraan petani yaitu melihat perkembangan struktur pendapatan, pengeluaran, dan NTP (Nilai Tukar Petani).

Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi sendiri dalam mengkategorikan tingkat kesejahteraan petani dilihat dari jenis petani itu sendiri. Dalam wawancara yang dilakukan pada Selasa, 21 Februari 2023 dengan Bapak Arif Risman selaku Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi beliau mengatakan:

“Di Kabupaten Bekasi sendiri ada beberapa jenis petani, agar kita bisa memetakan tingkat kesejahteraan petani. Pertama petani pemilik, *bujang*, dan petani penyewa. Dimana untuk petani pemilik walaupun di Kabupaten Bekasi sedikit tetapi kesejahteraannya bagus karena dia memiliki lahan apalagi di Desa Karangharum yang lahannya masih lumayan, sedangkan untuk petani penggarap atau *bujang* bekerja di sawah milik orang lain jadi kesejahteraannya dibawah petani pemilik, dan untuk petani penyewa tingkat kesejahteraannya di atas petani penggarap” (Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Arif Risman, 21 Februari 2023).

Dalam wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis petani di Kabupaten Bekasi yaitu petani pemilik, penggarap atau *bujang*, dan petani penyewa. Dimana untuk petani pemilik tingkat kesejahteraannya relatif bagus, sedangkan untuk petani penggarap tingkat kesejahteraannya di bawah petani pemilik, sedangkan untuk petani sewa tingkat kesejahteraannya berada di atas petani penggarap namun masih di bawah petani pemilik. Tetapi di Desa Karangharum sendiri terdapat 4 kategori petani yang peneliti telah jelaskan sebelumnya yaitu petani pemilik, petani gadai, petani sewa, dan buruh tani. Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan melihat tingkat kesejahteraan petani dari 4 (empat) kategori tersebut.

Petani dan masyarakat Desa Karangharum sendiri mempunyai beragam pendapat mengenai kesejahteraan petani, seperti yang peneliti temui ada yang memandang bahwa kesejahteraan petani di desa ini masih berada di tahap yang sejahtera, berkembang, dan kurang sejahtera. Hal tersebut berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan yang

merupakan para petani di Desa Karangharum yaitu Bapak Nasan, Ano Sumarno, dan Damang sebagai berikut:

“Kesejahteraan petani di Desa Karangharum saat ini sudah mulai baik dan bagus, dilihat dari tingkat pendapatan petani yang mulai meningkat. Serta *nandurnya* bareng dan panennya juga bareng” (Wawancara, 11-13 Januari 2023).

Pendapat tersebut juga sejalan yang dikatakan oleh salah satu masyarakat yaitu Sarinah yang menjadi informan peneliti yang merupakan anak dari salah satu petani di Desa Karangharum yang menjelaskan bahwa petani di Desa Karangharum ini sejahtera dan hasil dari pertanian tersebut pun ada, namun informan tersebut masih menyayangkan apabila musim kemarau datang karena susah petani mendapatkan air, sehingga panennya jadi lebih lama.

“Karena orangtua saya petani, dan saya sejauh ini merasakan sejahtera-sejahtera saja. Jadi penghasilannya juga ada. Apalagi pada musim hujan penghasilannya banyak karena ada air, tapi kalau musim kemarau agak susah dan panennya jadi lebih lama. Tapi selebihnya menurut saya keadaannya sejahtera-sejahtera saja” (Masyarakat, Sarinah, 12 Januari 2023).

Namun pendapat yang menganggap bahwa petani di Desa Karangharum ini sejahtera dibantah oleh pendapat para petani yang lain yaitu Bapak Enjuh, Daming, Marsan, dan Ibu Rami. Informan tersebut berpendapat bahwa petani di Desa Karangharum kurang sejahtera.

“Kesejahteraan petani di Karangharum ini kurang sejahtera dan sangat memprihatinkan. Dimana di bidang perairannya kurang, karena saya mengalaminya sendiri. Untuk mengairi sawah, selalu melakukan penyedotan karena irigasinya kering. Selain itu pupuk yang langka, ditambah Gapoktan dan PPL pada lengah dan kurang tanggap terhadap petani” (Petani, Enjuh dan Daming, 11-12 Januari 2023).

Sedangkan pendapat Ibu Rami yang merupakan seorang petani sewa mengatakan bahwa:

“Kesejahteraan petani di desa ini masih berada di bawah rata-rata untuk zaman sekarang, penghasilan sebulan cuma dapat 2,5-3 juta masih dibawah standar UMR Kabupaten Bekasi yang sudah 5jtan” (Petani, Rami, 12 Januari 2023).

Selain itu Bapak Marsan yang merupakan Buruh Tani berpendapat bahwa:

“Disini rata-rata petaninya sewa atau *bebujang* kepada yang punya sawah, jadi menurut saya kehidupan petani disini masih dibawah standar. Jadi dalam setiap *garap* sawah palingan cuma dapat upah 2 jutaan jadi kalau kita hanya mengandalkan satu lahan

garapan saja buat kehidupan sehari-hari nggak ada makanya rata-rata yang para *bujang* pegang lebih dari satu *garapan* lahan” (Buruh Tani, Marsan, 10 Januari 2023).

Kurang sejahteranya petani di Desa Karangharum ini juga disampaikan oleh salah satu masyarakat yaitu Gangga, informan ini juga mengkategorikan kesejahteraan petani di Desa Karangharum ke dalam 4 kategori yaitu petani pemilik yang dianggap sejahtera, begitupun petani gadai dan sewa. Sedangkan untuk buruh tani masih kurang sejahtera.

“Petani di Desa Karangharum itu kan terbagi ya, jadi ada yang benar-benar seorang petani yaitu yang punya lahan persawahan, ada petani sewa, ada petani gadai, dan bujang. Jadi untuk petani yang mempunyai sawah bisa dibilang sejahtera begitupun petani gadai, sedangkan untuk petani sewa lumayan karena mereka harus bayar sewa setiap kali panen, dan untuk *bujang* ini yang menurut saya kurang sejahtera karena mereka sistemnya bagi hasil dengan si pemilik sawah” (Masyarakat, Gangga, 12 Januari 2023).

Dengan demikian pendapat mengenai kesejahteraan petani di Desa Karangharum tersebut cukup beragam, dari pendapat tersebut juga menjelaskan bahwa di Desa Karangharum ini terbagi atas 4 kategori petani yaitu petani yang memiliki lahan persawahan, petani gadai, petani sewa, dan buruh tani. Melihat kondisi pertanian yang ada di Desa Karangharum maka kesejahteraan petani serta pertanian di desa ini benar-benar harus dikembangkan melalui peran-peran dari Pemerintah Desa yang dapat benar-benar mensejahterakan petani. Dalam wawancara yang dilakukan pada 9 Januari 2023 dengan kepala desa Karangharum H. M. Rimansyah A, Md. beliau menerangkan bahwa kesejahteraan petani adalah hal yang penting, dimana:

“Kesejahteraan petani adalah hal yang penting, ditambah di Karangharum ini memang mayoritas 90% petani. Jadi menurut e-RDKK luas pertanian di Karangharum 2.04 hektar yang didalamnya termasuk Tanah Kas Desa (TDK) luar. Dan *alhamdulillahnya* tanah sawah di Desa Karangharum ini sangat produktif, baik itu dari irigasinya, tata cara pengelolaan tanahnya, dan hasil panen sawahnya yang rata-rata persatu sawah disini menghasilkan 6 ton padi” (Kepala Desa, H. M. Rimansyah A.Md, 9 Januari 2023).

Penjelasan tersebut selain kesejahteraan petani ada hal yang penting dikarenakan mayoritas masyarakat Desa Karangharum adalah petani. Ditambah luas lahan yang mendominasi dengan produktivitas pertanian yang bagus, irigasi yang baik, tata cara pengelolaan tanahnya yang baik pula sehingga rata-rata penghasilan padi di Desa ini dapat

menghasilkan 6 ton dalam sekali panen. Di bidang pertanian sendiri Pemerintah Desa Karangharum melakukan kerjasama dengan pihak BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Kerjasama ini bertujuan untuk lebih mengarahkan kebijakan dari Pemerintah Desa. Dimana BUMDes mengeluarkan program simpan pinjam yang bermanfaat untuk memberikan modal kepada para petani, sedangkan Gapoktan adalah gabungan dari para kelompok tani yang mengelola lahan persawahan di Desa Karangharum yang mempunyai program pembagian bibit dan pupuk kepada para petani, serta melakukan penyuluhan terkait pertanian.

“Dalam pertanian sendiri Pemerintah Desa Karangharum dibantu oleh BUMDes dan Gapoktan. Dimana BUMDes memberikan bantuan berupa simpan pinjam kepada para petani, sedangkan Gapoktan memberikan bantuan yang turun dari pemerintah pusat berupa pupuk, pestisida, dan bibit” (Kepala Desa, H. M. Rimansyah, 9 Januari 2023).

Berdasarkan keterangan Kepala Desa Karangharum bahwa dalam bidang pertanian Pemerintah Desa sendiri dalam menjalankan perannya membangun kerjasama dengan BUMDes dan Gapoktan, maka dari itu peneliti membagi 2 sub pembahasan. Sub bab pertama akan membahas peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani yang dilihat dari peran Pemerintah Desa, peran BUMDes, dan peran Gapoktan Desa Karangharum. Sub bab kedua akan membahas proses kolaborasi yang terjadi dari peranan ketiga *stakeholder* tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu dua sub tersebut juga akan memuat dampak dan harapan yang ingin disampaikan oleh petani dan masyarakat atas peran dari kolaborasi pemerintahan desa tersebut.

A. Peran dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Proses kolaboratif yang terjadi antara Pemerintah Desa dengan BUMDes dan Gapoktan dalam bidang pertanian menghasilkan peran-peran tersendiri pada setiap *stakeholder*. Dimana peran tersebut menciptakan program-program yang terkait dengan pertanian. Seperti keterangan yang diperoleh dari Kepala Desa Karangharum bahwa Pemerintah Desa membuat program PKTD (Padat Karya Tunai Desa), BUMDes mempunyai program simpan pinjam, dan Gapoktan pembagian bibit, pupuk, serta penyuluhan yang terkait dengan pertanian. Keterangan lebih lanjut dari program-program tersebut peneliti tuliskan dibawah ini sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola daerah tingkatan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa yang berfungsi untuk memfasilitasi warga serta membagikan arahan kepada warga tentang tujuan pembangunan yang hendak dilaksanakan. Sebaliknya warga berfungsi untuk memberikan pemikiran, tenaga, sampai harta barang untuk keberhasilan pembangunan. Pemerintah Desa Karangharum dalam bidang pertanian sendiri mempunyai program P3A (Persatuan Petani Pemakai Air) yang merupakan lembaga pengelola irigasi yang menjadi wadah para petani pemakai air dalam suatu kawasan tersier (kavling) atau desa yang dibangun secara demokratis oleh para petani pemakai air termasuk Badan Pengelola Irigasi setempat. Program tersebut merupakan program dari pemerintah pusat yang diberdayakan bagi petani untuk membuat irigasi.

“Bentuk keterlibatan Pemerintah Desa sendiri dalam pertanian yaitu dengan adanya program P3A dari program pusat. P3A yang diberdayakan untuk para kelompok tani untuk membuat irigasi. Agar aliran air untuk persawahan di Desa Karangharum berjalan lancar” (Kepala Desa, H. M. Rimansyah, A.Md, 9 Januari 2023).

Tabel 12
Program Desa Karangharum untuk Pertanian

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PKTD (Padat Karya Tunai)	20.000.000,-

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti dengan Kepala Desa Karangharum

Program P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) tersebut masuk ke dalam PKTD (Padat Karya Tunai Desa) yang meliputi pembersihan saluran air dan irigasi yang melibatkan para kelompok tani yang diberi upah. PKTD ini mengeluarkan dana sejumlah 20.000.000, PKTD sendiri menurut peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, PKTD merupakan kegiatan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan, terutama masyarakat miskin dan terpinggirkan, untuk meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan sumber

daya, tenaga kerja dan teknologi lokal memberikan tambahan upah atau pendapatan, serta mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu dalam peraturan tersebut juga yang mengatur tentang Rencana PKTD yang mengutamakan penggunaan dana akumulasi desa pada tahun 2022. Pelaksanaan skema PKTD diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat dengan memberikan gratifikasi (gaji) tunai langsung kepada masyarakat yang relevan secara harian maupun mingguan. Warga Desa Karangharum yang terlibat dalam program PKTD ini yaitu adalah kelompok tani.

Gambar 5. Irigasi Pertanian Desa Karangharum



Sumber: Dokumentasi Peneliti di Lapangan

Program PKTD tersebut dilaksanakan 20 hari sebelum musim tanam padi yang melibatkan para kelompok tani di Desa Karangharum yang kurang lebih berjumlah 20 orang yang diberi upah 50 ribu rupiah perhari.

“Program tersebut dilaksanakan 20 hari sebelum musim *tandur*, yang melibatkan para anggota kelompok tani Desa Karangharum yang kurang lebih berjumlah 20 orang. Petani-

petani tersebut dibayar 50 ribu rupiah perhari” (Kepala Desa Karangharum, H.M. Rimansyah A.Md, 9 Januari 2023).

Dampak program tersebut diklaim Pemerintah Desa memberikan manfaat bagi para petani. Dimana perairan yang sebelumnya tersendat setelah adanya program ini dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat mengairi sawah petani.

“*Alhamdulillah*, petani pun kemarin ada program P3A banyak dirasakan oleh petani masalah air yang tersendat yang *alhamdulillah* bisa mengairi sawah-sawah petani disini. Rencana di tahun di ada program normalisasi saluran air Ranggan-Rawa Kuda. Dengan harapan agar aliran air yang mengairi sawah Desa Karangharum lebih lancar” (Kepala Desa, H. M. Rimansyah, 9 Januari 2023).

Namun banyak pro dan kontra yang dirasakan para petani terkait program tersebut. Para petani yang mendukung hal tersebut mengatakan bahwa peran dari pemerintah tersebut sudah bagus dan mereka cukup terbantu, selain itu ditambah adanya pengawasan dari PPL. Pendapat tersebut disampaikan oleh informan Bapak Nasan, Ano Sumarno, Abo.

“Tanggapan saya terkait peranan dari Pemerintah Desa sudah bagus dan berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Programnya juga sudah bagus seperti contohnya programnya yaitu selalu mengadakan padat karya untuk pengurusan masalah tersier yang nantinya petani-petani yang membantu dalam program tersebut dibayar oleh Pemerintah Desa. Dimana padat karya ini seperti membersihkan selokan air supaya bersih dan lancar. Sehingga dampaknya pada pertanian yang cukup terbantu, ditambah adanya pengawas pertanian dari PPL Kecamatan Kedungwaringin” (Petani, Nasan dan Ano Sumarno, 11-12 Januari 2023).

Begitupun yang dirasakan oleh salah satu buruh tani yang menjadi informan peneliti yaitu saudara Abo yang termasuk kedalam petani milenial yang baru menjadi petani selama 3 tahun ini, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk peranan dari Pemerintah Desa sendiri saya merasakan lebih enak sekarang, mungkin dikarenakan saya juga baru masuk ke pertanian 3 tahun terakhir jadi saya tidak begitu mengetahui perbedaan lain. Peranan Pemerintah Desa saat ini lebih terbuka untuk pertanian” (Buruh Tani, Abo, 13 Januari 2023).

Sedangkan untuk pendapat petani yang kontra terhadap program Pemerintah Desa tersebut terdapat Ibu Rami dan Bapak Daming. Mereka menganggap bahwa program yang diberikan oleh pemerintah belum terasa, dan menganggap bahwa peran dari Pemerintah Desa saat ini untuk pertanian tidak sebaik pemerintahan sebelumnya. Ditambah walaupun ada pengawasan dari PPL Kecamatan tetapi mereka menganggap bahwa PPL tersebut tidak mau turun langsung ke lapangan yang mengakibatkan hasil pertanian di Desa Karangharum ini berkurang karena kurang terpantaunya pertanian di Desa Karangharum.

“Peran yang diberikan oleh Pemerintah Desa belum ada dan belum terlalu terasa, karena bila dilihat belum ada ide atau gagasan yang kreatif untuk menuju kesana. Sehingga para petani belum merasakan dampaknya dan masih terlihat berjalan seadanya. Tidak seperti waktu tahun 90an sampai tahun 2000 yang peran pemerintahnya bagus, lalu untuk tahun 2000 sampai 2010 juga lumayan bagus, tapi untuk sekarang kurang bagus dikarenakan Pemerintah Desa dan PPLnya tidak mau turun langsung ke lapangan. Ditambah pengairan untuk sawah yang semakin susah jadinya hasil pertanian semakin berkurang” (Petani, Ibu Rami dan Bapak Daming, 12 Januari 2023)

Berdasarkan pendapat para petani tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya program dari Pemerintah Desa dalam pertanian yaitu PKTD (Padat Karya Tunai Desa) yang meliputi pembersihan saluran air dan irigasi yang melibatkan para kelompok tani yang diberi upah. Dimana tanggapan program tersebut sudah bagus dan sedikit banyak membantu para petani dalam masalah perairan. Namun dikarenakan Pemerintah Desa hanya membuat program ini saja membuat banyak petani belum puas dimana dampak yang diberikan belum begitu terasa untuk pertanian yang bisa dilihat dengan wajah pertanian di Desa Karangharum yang begitu saja, tidak ada perubahan di setiap tahun atau periodenya.

Selain pendapat dari para petani, peneliti juga menghimpun beberapa pendapat dari para masyarakat Desa Karangharum yang juga beragam ada yang memang menanggapinya antusias, ada pula yang memang melihat bahwa program tersebut hanya berjalan sesuai aturan saja tanpa adanya perkembangan untuk menuju kemajuan pertanian di Desa Karangharum.

“Bagus, petani jadi lebih terbantu. Namun belum efektif sehingga belum ada dampak besar yang tercipta bagi pertanian di Desa Karangharum. pemerintahan sekarang untuk pertanian Karangharum yang biasa saja sama seperti sebelumnya, memang terdapat beberapa agenda yang Pemerintah Desa laksanakan untuk pertanian. Namun hal tersebut

hanya perkara yang biasa yang memang berjalan sesuai peraturan, namun untuk berkembang kearah yang lebih baik itu belum. Sehingga yang diharapkan Pemerintah Desa itu benar-benar membuat program yang dapat lebih memajukan petani” (Wawancara, Masyarakat, 10-13 Januari 2023).

Melihat pendapat-pendapat tersebut Pemerintah Desa sendiri sudah menetapkan program yang benar-benar dibutuhkan pertanian yaitu air.

“Untuk saat ini kebijakan Pemerintah Desa dalam pertanian hanya itu saja, karena air memang menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam pertanian. Jadi untuk kebijakan lain memang belum ada, dikarenakan kami tidak hanya memfokuskan program atau kebijakan kepada pertanian saja, tetapi ada program-program lain yang memang juga kami jalankan. Maka dari itu, kami melakukan kerja sama dengan pihak BUMDes dan Gapoktan yang diharapkan pihak tersebut dapat membantu pertanian di desa ini” (Kepala Desa, H. M. Rimansyah A.Md, 9 Januari 2023).

Berdasarkan pendapat Kepala Desa menunjukkan bahwa untuk saat ini tidak ada kebijakan lain, karena pada dasarnya kebutuhan masyarakat desa tidak hanya di bidang pertanian saja, tetapi terdapat di bidang lain. Maka dari itu Pemerintah Desa melakukan kerjasama dengan pihak Gapoktan dan BUMDes yang dimana pihak-pihak tersebut bisa menangani masalah pertanian yang Pemerintah Desa tidak bisa.

2. Peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Pengangkatan anggota dewan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan nama Harum Jaya telah diatur dalam Peraturan Desa Karangharum Nomor 18 Tahun 2019 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harum Jaya Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Periode 2020-2022 yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Dimana organisasi pengelolaan BUMDes Harum Jaya terdiri dari penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas.

Gambar 6
 Bagan Susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa
 “Harum Jaya”
 Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi
 Periode Tahun 2020-2022



Sumber: Dokumen BUMDes Karangharum

Adapun Tugas, Fungsi, dan Hak dari masing-masing pengurus, sebagai berikut:

1. Penasehat

- Menyampaikan masukan berupa nasehat kepada para pelaksana operasional BUMDes;
- Menyampaikan saran serta pendapat mengenai masalah yang dianggap penting;
- Mengontrol pelaksanaan aktivitas usaha serta mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi indikasi menurunnya kinerja BUMDes.

2. Pelaksana Operasional

- Melaksanakan pengelolaan BUMDes;
- Mencari serta memanfaatkan potensi agar BUMDes Harum Jaya dapat tumbuh serta maju;
- Menjalin kolaborasi dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kelancaran usaha BUMDes;
- Membuat rencana kerja serta rencana anggaran BUMDes pada awal tahun;
- Menyampaikan laporan kegiatan usaha BUMDes kepada Kepala Desa;

- Memberikan laporan pertanggungjawaban di setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain;
- Memberikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

a) Direktur

- Memandu jalannya organisasi BUMDes;
- Menyusun kebijakan operasional pengelolaan BUMDes;
- Mengelola kegiatan BUMDes;
- Mengangkat dan memberhentikan anggota BUMDes dengan persetujuan Pemerintah Desa;
- Mengkoordinasikan semua tugas pengurus BUMDes di dalam dan di luar;
- Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha atau kegiatan lain yang dianggap perlu;
- Menyampaikan kondisi keuangan BUMDes triwulanan melalui Musyawarah Desa;
- Menyampaikan keuangan BUMDes akhir tahun melalui Musyawarah Tanggung Jawab Desa.

b) Sekretaris

- Melaksanakan tugas kesekretariatan untuk menunjang kegiatan Direktur;
- Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes;
- Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi di setiap unit usaha BUMDes;
- Melaksanakan administrasi akuntansi keuangan BUMDes;
- Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pengelola unit usaha BUMDes;
- Kelola korespondensi secara umum;
- Melakukan pengarsipan;
- Mengelola data dan informasi unit usaha BUMDes.

c) Bendahara

- Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan keuangan BUMDes;
- Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha BUMDes;
- Menyusun penerimaan dan pengeluaran keuangan BUMDes;
- Mengelola gaji dan insentif untuk manajer unit bisnis;
- Mengatur pengelolaan belanja dan pengadaan barang/jasa BUMDes;
- Mengelola keuangan unit usaha BUMDes penerima manfaat;
- Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha BUMDes;
- Melaporkan posisi keuangan kepada direktur secara sistematis, akuntabel dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sebenarnya;
- Mengeluarkan uang berdasarkan bukti yang sah;
- Kelola likuiditas sesuai kebutuhan;
- Menyetorkan uang ke bank setelah disetujui oleh direktur.

3. Badan pengawas

- Menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk keperluan:
 - a) Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus Dewan Pengawas;
 - b) Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes;
 - c) Pelaksanaan review dan evaluasi kinerja Pelaksana Operasional.
- Mengadakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDes minimal satu kali dalam setahun;
- Meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan operasional setiap akhir tahun;
- meminta laporan kegiatan badan usaha milik desa;
- Meminta rincian laporan neraca dan kerugian serta penjelasan dokumen kegiatan unit usaha.

Dalam meningkatkan kesejahteraan petani BUMDes Karangharum mempunyai program utama yaitu berupa peminjaman dana yang diungkapkan oleh bendahara BUMDes:

“BUMDes sendiri memberikan peran kepada masyarakat terutama petani desa sebagai pemberi bantuan berupa pinjaman dana. Dimana BUMDes memberikan pinjaman dana kepada masyarakat dengan bunga yang rendah, yang bertujuan untuk dapat

memperdaya masyarakat dalam bidang ekonomi, sehingga masyarakat tidak tergiur akan pinjaman di bank lain dengan bunga yang tinggi sehingga potensi ekonomi warga desa dapat direalisasikan dengan maksimal. Dimana Bumdes sendiri diberikan dana oleh anggaran desa sebesar 50 juta rupiah, dan dana tersebut akan terus bertambah angkanya apabila pengelola yang ada dapat direalisasikan dengan benar untuk keperluan masyarakat” (Bendahara BUMDes, Ipah Masripah, 12 Januari 2023).

Dilihat dari program tersebut BUMDes meminjamkan dana kepada masyarakat dengan bunga yang rendah agar masyarakat tidak tergiur dengan pinjaman di bank yang mempunyai bunga yang cukup tinggi. Program tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang tujuan pendirian BUMDes yaitu menyelenggarakan kegiatan ekonomi melalui pengelolaan usaha, peningkatan investasi, produktivitas ekonomi dan potensi desa, serta memberikan pelayanan publik melalui penyediaan barang dan jasa. yang dapat memenuhi kebutuhan umum masyarakat, serta mengelola lumbung pangan desa yang mampu menghasilkan keuntungan atau laba bersih untuk meningkatkan pendapatan asli desa, serta mengembangkan manfaat sebesar-besarnya bagi sumber ekonomi masyarakat, sehingga menciptakan nilai tambah bagi desa. BUMDes Karangharum sendiri mendapatkan anggaran dana dari Pemerintah Desa sebesar 50 juta rupiah, adapun rincian dana tersebut sebagai berikut:

Tabel 13

Rencana Anggaran Belanja
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harum Jaya)
Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi
Tahun 2020

No	URAIAN	Volume	Harga Satuan	Jumlah Total
	<i>a</i>	<i>B</i>	<i>d</i>	<i>e = bxd</i>
A	Belanja Operasional			14.000.000
1	Belanja perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1 Pake x 1 Keg	1.600.000	1.600.000

2	Belanja Peralatan Rumah Tangga/Belanja Barang Konsumsi	1 Pake x 1 Keg	1.000.000	1.000.000
3	Belanja Barang Cetak dan Pengadaan	1 Pake x 1 Keg	1.000.000	1.000.000
4	Belanja Transpot Perjalanan Dinas	2 Org x 8 Keg	100.000	1.600.000
5	Belanja Honorium Ketua	1 Org x 8 Keg	500.000	4.000.000
6	Belanja Honorium Bendahara	1 Org x 8 Keg	300.000	2.400.000
7	Belanja Honorium Sekretaris	1 Org x 8 Keg	300.000	2.400.000
B	Unit Usaha Simpan Pinjam			36.000.000
1	Pinjam Perorangan	1 Thn x 1 Keg	18.000.000	18.000.000
2	Pinjam Modal Usaha	1 Thn x 1 Keg	18.000.000	18.000.000
TOTAL				50.000.000

Sumber: Dokumen BUMDes Karangharum

Dari tabel di atas dapat dilihat anggaran yang didapatkan BUMDes dibagi atas 2 kategori yang pertama untuk belanja operasional sebesar Rp. 14.000.000 dan yang kedua untuk unit usaha simpan pinjam sebesar Rp. 36.000.000. Adapun skema peminjaman dana BUMDes serta beberapa persyaratannya untuk mengajukan pinjaman tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 14

Angsuran Dana Mingguan/Tenor BUMDes Harum Jaya

Pinjaman	8 Minggu			Jasa 10%	12 Minggu			Jasa 10%
	Pokok	Jasa	Jumlah		Pokok	Jasa	Jumlah	
1,000,000	125,000	12,500	137,500	100.000	83,333	8,333	91,667	100.000
2,000,000	250,000	25,000	275,000	200.000	166,667	16,667	183,333	200.000
3,000,000	372,000	37,500	412,000	300.000	250,000	25,000	275,000	300.000
4,000,000	500,000	50,000	550,000	400.000	333,333	33,333	366,667	400.000
5,000,000	625,000	62,500	687,000	500.000	416,667	41,667	458,333	500.000
ADM ANGSURAN 2,000								

Pinjaman	16 Minggu			Jasa 10%	20 Minggu			Jasa 10%
	Pokok	Jasa	Jumlah		Pokok	Jasa	Jumlah	
1,000,000	62,500	6,250	68,750	100.000	50,000	5,000	55,000	100.000
2,000,000	125,000	12,500	137,500	200.000	100,000	10,000	110,000	200.000
3,000,000	187,500	18,750	206,250	300.000	150,000	15,000	165,000	300.000
4,000,000	250,000	25,000	275,000	400.000	200,000	20,000	220,000	400.000
5,000,000	312,000	31,250	343,750	500.000	250,000	25,000	275,000	500.000

Sumber: Dokumen BUMDes Karangharum

Tabel 15

Angsuran Dana Bulanan/Tenor BUMDes Harum Jaya

Pinjaman	4 Bulan			Jasa 10%	6 Bulan			Jasa 10%
	Pokok	Jasa	Jumlah		Pokok	Jasa	Jumlah	
1,000,000	250,000	25,000	275,000	100.000	166,667	16,667	183,333	100.000
2,000,000	500,000	50,000	550,000	200.000	333,333	33,333	366,667	200.000
3,000,000	750,000	75,000	825,000	300.000	500,000	50,000	550,000	300.000
4,000,000	1,000,000	100,000	1,100,000	400.000	666,667	66,667	733,333	400.000
5,000,000	1,250,000	125,000	1,375,000	500.000	833,333	83,333	916,667	500.000
ADM ANGSURAN 2,000								
	Pinjaman	8 Bulan			Jasa 10%			
		Pokok	Jasa	Jumlah				
	1,000,000	125,000	12,500	137,500	100.000			
	2,000,000	250,000	25,000	275,000	200.000			
	3,000,000	375,000	37,500	412,500	300.000			
	4,000,000	500,000	50,000	550,000	400.000			
	5,000,000	625,000	62,500	687,500	500.000			

Sumber: Dokumen BUMDes Karangharum

Tabel 16

Persyaratan Peminjaman Uang di BUMDes

No	Persyaratan Pinjaman Modal Usaha	No	Persyaratan Pinjaman
1	Materai 6000	1	Materai 6.000 (1 buah)
2	Mengisi Formulir	2	Mengisi Formulir
3	Fotocopy KTP suami/istri/orangtua	3	Fotocopy KTP suami/istri/orangtua
4	Fotocopy KK (Kartu Keluarga)	4	Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
5	Foto Jenis Usaha dengan yang bersangkutan	5	Fotocopy slip gaji 3 Bulan terakhir (untuk karyawan perusahaan)
		6	Fotocopy SK Jabatan/ Kontrak Perusahaan
		7	Buku Rekening Tabungan/ATM (untuk Jaminan)

Sumber: Dokumen BUMDes Karangharum

Dengan demikian adanya peminjaman dana yang diberikan BUMDes ini dapat lebih membantu masyarakat terutama petani di Desa Karangharum. Sehingga mereka tidak terlilit hutang bank. Anggaran ini dapat terus bertambah apabila dana tersebut dapat direalisasikan dengan benar serta berhasil untuk keperluan masyarakat. Selain program simpan pinjam, untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam desa, BUMDes juga mempunyai rencana kegiatan lain berupa pengadaan budidaya perikanan, peminjaman alat pertanian, dan pemberian hewan ternak bagi masyarakat. Seperti keterangan yang disampaikan langsung oleh bendahara BUMDes Ibu Ipah Masripah, sebagai berikut:

“Apabila nantinya program simpan pinjam tersebut berjalan dengan lancar dan sukses. BUMDes Karangharum juga akan memberikan fasilitas lainnya untuk pertanian, yaitu berupa peminjaman alat semprot hama, traktor, mesin pemotong padi, dan mesin penggiling padi. Ada juga untuk budidaya perikanan, dan peternakan. Perikanan sendiri nanti kami akan memberikan tempat kepada masyarakat untuk membudidayakan ikan, begitupun dengan peternakan yang mana kami akan memberikan hewan ternak seperti domba yang nanti masyarakat sendiri yang akan merawatnya” (Bendahara BUMDes, Ipah Masripah, 9 Januari 2023).

Keterangan tersebut menjelaskan kegiatan pertanian BUMDes juga akan merealisasikan peminjaman lain yaitu berupa alat-alat pertanian seperti traktor, alat semprot hama, dan alat potong padi yang bertujuan untuk lebih memudahkan petani. Sedangkan pada budidaya perikanan BUMDes akan memberikan tempat budidaya perikanan yang selanjutnya akan dikelola oleh warga desa sendiri. Dan dalam bidang peternakan BUMDes akan memberikan hewan ternak berupa domba kepada masyarakat untuk dternakan oleh masyarakat desa sendiri. Maka dari rencana-rencana tersebut diharapkan potensi ekonomi yang terdapat di Desa Karangharum dapat direalisasikan dengan maksimal kepada masyarakat Desa Karangharum.

Berdasarkan program yang sudah dicetuskan BUMDes Karangharum tersebut, ternyata dari hasil pengamatan peneliti di lapangan program tersebut banyak menuai kontra dari para petani dikarenakan tidak berjalannya program yang sudah dibuat. Dari hasil wawancara peneliti pada tanggal 10-12 Januari 2023 dengan 10 petani yang terdiri dari petani pemilik, petani gadai, petani sewa, dan buruh tani yang menjadi subjek penelitian ini mengatakan bahwa program yang diwacanakan tersebut sudah bagus, kejelasan atas program tersebut tidak ada sehingga para petani tidak dapat merasakan dampak dari program tersebut.

“Terkait programnya memberikan dampak yang positif untuk masyarakat, apalagi petani yang membutuhkan modal. Namun program BUMDes saat ini kurang membantu karena programnya belum berjalan. Walaupun dibentuk strukturnya tapi tidak ada keseriusan sehingga tidak berjalan. Saat ini pun mengetahui bagaimana kelanjutan dari program tersebut apakah sudah berdampak kepada masyarakat, tetapi memang petani disini tidak merasakan dampaknya. Selain itu, tidak ada sosialisasi yang dilakukan terkait program tersebut” (Wawancara, Petani, 10-12 Januari 2023).

Selain pendapat dari petani, peneliti juga menghimpun beberapa pendapat dari lima masyarakat yang menjadi informan penelitian ini. Dimana kelima masyarakat tersebut juga berpendapat bahwa program BUMDes Karangharum ini walaupun ada tetapi seperti tidak ada programnya. Seperti program simpan pinjam yang menjadi program dari BUMDes yang para masyarakat rasakan belum berjalan karena mereka tidak tidak merasakan dampak dari program tersebut.

“Program yang diwacanakan BUMDes sudah sangat bagus sekali untuk masyarakat desa. Apalagi peminjaman modal dengan bunga yang rendah yang bisa dibayar bulanan atau

mingguan. Jadi masyarakat tidak lagi meminjam uang di bank dengan bunga yang lumayan tinggi. Namun walaupun ada tetapi seperti tidak ada programnya. Selain itu, program BUMDes ini terbagi ada yang buat pertanian, peternakan, perkebunan, sama ekonomi kreatif. Jadi untuk pertanian itu belum dirasakan untuk saat ini. Dimana yang seharusnya program peminjaman tersebut sangat membantu pertanian yang memang membutuhkan modal yang besar yang petani bisa *nyelang* uang dulu saat musim tander. Nanti kalau sudah panen baru dibayar. Tapi sangat disayangkan sampai saat ini kejelasan dari program tersebut tidak ada” (Wawancara, Masyarakat, 10-13 Januari 2023).

Melihat banyaknya keluhan dari para petani dan masyarakat tentang program BUMDes yang dinilai tidak berjalan. Sehingga para petani dan masyarakat belum merasakan dampak kebijakan tersebut. Pihak BUMDes dalam wawancaranya pada tanggal 9 Januari 2023, mengatakan:

“Kami juga memahami banyaknya keluhan dari masyarakat terkait tidak berjalannya program BUMDes ini. Kami dibentuk tahun 2020 dimana waktu itu awal-awalnya covid-19 muncul. Dimana tadinya Uang dari pemerintah tersebut akan turun sudah diurus surat-suratnya segala macam. Tetapi karena adanya covid-19 jadi dana tersebut akhirnya tidak jadi untuk BUMDes dan dana tersebut dipakai untuk keperluan covid-19 terlebih dahulu. Sehingga pada periode didirikannya BUMDes yaitu tahun 2020-2022 tidak berjalan karena tidak adanya dana yang masuk dari pemerintah” (Bendahara BUMDes, Ipah Masripah, 9 Januari 2023).

Program BUMDes tersebut bila diamati sangat berpotensi membantu masyarakat terutama petani di Desa Karangharum. Sehingga nantinya masyarakat tidak tergiur meminjam uang di bank yang memiliki bunga yang cukup besar sehingga tidak terbelit hutang bank yang menumpuk. Namun karena pada tahun 2020 awal pembentukan BUMDes yang dibarengi juga dengan datangnya *pandemi covid-19*. Sehingga dana yang tadinya untuk BUMDes terpaksa harus dialihkan untuk menangani pandemi tersebut. Sehingga program BUMDes tidak dapat berjalan dengan semestinya untuk dapat membantu mensejahterakan petani dan masyarakat Desa Karangharum.

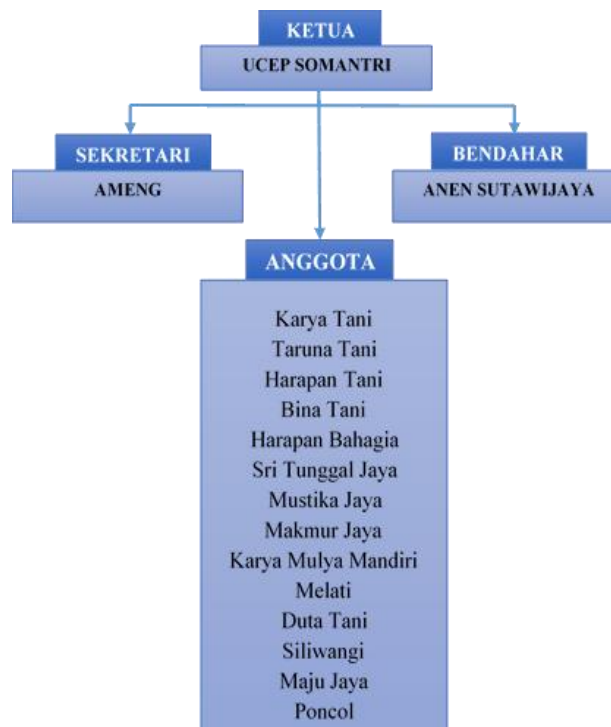
3. Peran GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani)

Peraturan Menteri Pertanian No:273/Kpts/ot.160/4/2007 tentang pedoman pembinaan kelembagaan petani, mendefinisikan GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) sebagai kumpulan dari beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi serta efisiensi usaha. Tujuan dari adanya Gapoktan ini agar kelompok tani dapat lebih efisien dan efektif, serta memberikan kemudahan dalam penciptaan pertanian, peningkatan, permodalan, serta perluasan usaha tani bagi petani dan kelompok tani dari zona hulu sampai hilir, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemasaran hasil pertanian. Desa Karangharum sendiri memiliki Gapoktan yang bernama “Karya Tani” yang merupakan gabungan dari 14 kelompok tani yang terdapat di Desa Karangharum. Gapoktan di Desa Karangharum sendiri dibentuk pada tahun 2019 atas keputusan Kepala Desa Karangharum. Adapun struktur Gapoktan Desa Karangharum ialah sebagai berikut:

Gambar 7

Bagan Struktur Gapoktan “Karya Tani”

Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi



Sumber: Dokumen BPP Kecamatan Kedungwaringin

Gapoktan Desa Karangharum diketuai oleh Ucep Somantri dengan sekretaris Ameng dan bendahara Anen Sutawijaya. Gapoktan ini memiliki jumlah anggota yaitu 14 kelompok tani. Dengan total menaungi 224 petani di yang ada di Desa Karangharum. Tujuan dibentuknya Gapoktan ini ialah untuk lebih memudahkan koordinasi antar kelompok petani serta agar petani di desa ini ada yang membimbingnya. Gapoktan Desa Karangharum mempunyai peran sebagai pengawas, pembimbing, serta pelaksana yang memudahkan petani mengelola lahan pertanian. Dari mulai proses pembajakan tanah, penanaman benih padi, penyemprotan hama, hingga proses panen padi. Selain itu, Gapoktan juga sebagai penerima bantuan pertanian dari pemerintah pusat yang selanjutnya nanti disalurkan untuk petani-petani yang ada di Desa Karangharum. Adapun bantuan yang diberikan pemerintah pusat adalah bibit dan pupuk cair organik (POC).

Tabel 17

Bantuan yang didapatkan Petani dari Pemerintah Pusat

NO	BANTUAN	JUMLAH	TOTAL
1	Benih Bantuan	25 Kg per Hektar	3750 Kg
2	POC (Pupuk Organik Cair)	3000 Ml per Hektar	612 Liter

Sumber: Dokumen Gapoktan Desa Karangharum
(Total bantuan tersebut dikalikan dengan luas pertanian di Desa Karangharum yang memiliki luas wilayah 204 hektar)

“Peran Gapoktan Desa Karangharum itu sebagai pengawas, pembimbing, dan pelaksana untuk membantu para petani di desa ini. Ditambah kalau ada bantuan dari pemerintah pusat turunnyakan di Gapoktan, nanti Gapoktan yang menyalurkan bantuan tersebut kepada para petani. Dimana ada program IP 400 yang menyalurkan benih bantuan 25 kg/hektar yang dikali 204 hektar dan obat semprot yaitu POC (Pupuk Organik Cair) 3000 ml/Hektar” (Ketua Gapoktan, Ucep Somantri, 9 Januari 2023).

Berbicara terkait program IP (Indeks Pertanaman) 400 atau pola 4 kali tanam dan 4 kali panen dalam setahun merupakan upaya pemerintah melalui APBN Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2022 sebagai sebuah terobosan untuk meningkatkan produksi beras nasional. Program tersebut yang saat ini pemerintah pusat sedang gaungkan melalui BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) pada setiap kecamatan. Selain program tersebut juga terdapat program

pelatihan biosaka yaitu larutan ekstrak tumbuhan yang berperan sebagai elisitor yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Pemanfaatan Biosaka dalam bercocok tanam merupakan salah satu upaya perlindungan tumbuhan berbasis ekologi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Biosaka memiliki manfaat lebih aman bagi lingkungan, hemat biaya, hemat pupuk hingga 50%, mengurangi penggunaan pestisida kimia, mengurangi serangan hama dan penyakit, membuat lahan lebih subur dan berproduksi lebih baik. Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh BPP Kecamatan Kedungwaringin Ibu Karolina pada tanggal 12 Januari 2023.

“Saat ini pemerintah pusat melalui yang berkoordinasi dengan BPP di setiap kecamatan sedang menggaungkan program pertanian berupa ip 400 dan pelatihan biosaka untuk para petani” (BPP Kecamatan Kedungwaringin, Karolina, 9 Januari 2023).

BPP sendiri merupakan unit pelaksana teknis di bidang pembinaan pertanian yang berada di bawah Kementerian Pertanian RI. Kelembagaan pertanian ini terbagi atas wilayah kerja penyuluhan pertanian. Penyuluh pertanian di BPP disebut PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) yang merupakan petugas dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kabupaten atau kota yang bertugas memberikan pengarahan, bimbingan, dan penyuluhan di bidang pertanian pada suatu pemerintahan kecamatan. Dimana Penyuluh Pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian, baik itu penyuluh swasta, swadaya, dan PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Dengan adanya program yang diberikan pemerintah pusat kepada petani tersebut membuat para petani sedikit banyak terbantu mengurangi pengeluaran untuk biaya pertanian. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petani yaitu Bapak Marsan dan Bapak Damang pada tanggal 10-11 Januari 2023 sebagai berikut:

“Sangat terbantu, lumayan mengurangi biaya untuk pertanian yang semakin mahal” (Petani, Marsan, 10 Januari 2023).

Sedangkan pendapat Bapak Damang yang baru masuk Gapoktan 3 tahun terakhir ini juga mendapatkan manfaat bahwa beliau mendapatkan bantuan seperti pupuk secara gratis serta bantuan lainnya. Namun beliau juga mengungkapkan bahwa program yang dijalankan hanya itu saja, karena selebihnya beliau melihat bahwa tidak ada program lain yang diwacanakan oleh Gapoktan Desa Karangharum.

“Saya sudah 3 tahun bergabung dengan Gapoktan, dimana setelah saya masuk Gapoktan ini saya mendapatkan bibit secara gratis dan bantuan lainnya. Namun disini saya melihat petaninya pada mandiri, karena program Gapoktannya sendiri kurang jelas. Walaupun ada program bantuan dari pemerintah tersebut, namun selebihnya tidak ada program lain yang diwacanakan” (Wawancara, Damang, 11 Januari 2023).

Berbicara terkait tidak adanya program lain yang diwacanakan oleh Gapoktan Desa Karangharum yang sebagai petani juga berpendapat demikian. Ditambah ada beberapa petani yang mengeluhkan bahwa pemberian pupuk tersebut berbayar dan sedikit. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Ano Sumarno dan Ibu Rami pada tanggal 11-12 Januari 2023, sebagai berikut:

“Adanya program dari Gapoktan ini cukup terbantu untuk saya, ditambah dengan adanya pembagian bibit untuk pertanian. Walaupun dalam pembagian bibit tersebut harus bayar yaitu 20 ribu *per kampil*. Namun selain itu saya tidak merasakan manfaat lain ditambah ketuanya pasif baik itu terhadap produktivitas pertanian ataupun proses pemasaran hasil pertanian karena penyuluhan yang ada tidak sesuai dengan program yang dicetuskan, karena yang saya lihat Gapoktan itu hanya turun di meja dan bukan mempraktekkannya secara langsung di sawah” (Wawancara, Petani, 11-12 Januari 2023).

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa program yang dijalankan Gapoktan desa Karangharum memang bermanfaat untuk pertanian yang ada di Desa ini. Namun program yang dijalankan tersebut berasal dari bantuan pemerintah pusat. Sehingga program yang benar-benar berasal dari Gapoktan sendiri itu tidak ada karena memang semuanya berasal dari sukarela dan tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan Gapoktan itu sendiri, jadi tidak ada program-program yang tercipta. Ditambah adanya pembiayaan terkait bantuan dari pemerintah yang seharusnya gratis merupakan bentuk dari jasa kuli angkat dari bantuan tersebut.

“Untuk saat ini tidak ada program lain dari Gapoktan, karena kami bekerja dengan sukarela karena tidak ada anggaran yang dikeluarkan dari Pemerintah Desa untuk kami, sehingga biar dikata dipaksa untuk mengerjakan tugas ini, ya tinggal semau-maunya saja karena semuanya balik lagi berdasarkan sukarela. Sedangkan ada kebutuhan sehari-hari yang harus kami penuhi. Bantuan tersebut turun langsung dari pemerintah, melalui perantara Gapoktan. Dimana Gapoktan menerima bibit, kemudian disalurkan kembali ke

petani dengan satu *kampil* atau 5 kg dengan harga 20.000. Pembagian bibit itukan memang gratis yang di *supply* langsung dari pemerintah. Nah, untuk 20.000 ini dimaksudkan untuk jasa kuli panggul. Selain itu ada juga pembagian pupuk cair yang memang dibagikan secara gratis kepada para petani” (Ketua Gapoktan, Ucep Somantri, 9 Januari 2023).

Pendapat tersebut dapat dilihat bahwa Gapoktan ini tidak mendapatkan dana dari Pemerintah Desa, mereka bekerja sukarela. Sehingga program yang dijalankan Gapoktan Desa Karangharum tidak berjalan secara maksimal. Namun apabila ada usulan dari para petani misalnya terkait menginginkan benih atau bibit bantuan yang unggul maka Gapoktan akan menyampaikan kepada pemerintah, selain itu Gapoktan juga menyampaikan kepada petugas POPT (Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan) setempat untuk memberikan pantauan kepada tanaman-tanaman petani supaya tidak ada serangan hama. Sehingga nantinya ada gerakan dari petugas POPT untuk membantu baik itu akan mengusulkan bantuan berupa pestisida atau bantuan lain untuk membasmi hama-hama tersebut.

“Namun kami juga tetap profesional apabila kelompok tani menginginkan benih atau bibit bantuan yang unggul maka kami akan sampaikan kepada petugas PPL terkait, selain itu kami juga meminta bantuan kepada petugas POPT setempat untuk memberikan pantauan agar jangan sampai tanaman-tanaman padi petani ini ada serangan hama. Nantinya ada gerakan dari petugas POPT untuk membantu baik itu akan mengusulkan pestisida bantuan untuk membasmi hama-hama tersebut” (Ketua Gapoktan, Ucep Somantri, 9 Januari 2023).

Selain berbicara mengenai program dari Gapoktan. Gapoktan sendiri mempunyai tugas sebagai pengawas dan pelaksana yang memudahkan masyarakat dalam pengelolaan lahan pertanian. Dari mulai proses pembajakan tanah, penanaman benih padi, penyemprotan hama, hingga proses panen padi. Dimana proses tersebut terjadi serentak sehingga padi yang diproduksi di Desa Karangharum dapat bersamaan agar dapat menjaga kestabilan harga pasar. Gapoktan ini yang mengkoordinasikan para petani, dan mereka yang akan memanggil para penyuluh pertanian untuk memantau pertanian di Desa Karangharum. Sehingga dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak PPL Kecamatan Kedungwaringin Ibu Karolina pada tanggal 9 Januari 2023 beliau mengatakan bahwa:

“Dimana saat ini pemerintah pusat mengarah kepada para petani untuk ikut bergabung dengan kelompok tani. Jadi diwajibkan, guna mendapatkan kartu tani yang ditujukan untuk menerima bantuan yang turun dari pemerintah untuk pertanian. Sehingga nanti bantuan yang didistribusikan dapat merata kepada para petani karena ada datanya” (BPP Kedungwaringin, Karolina, 9 Januari 2023).

Jadi dalam wawancara tersebut menjelaskan bahwa bergabung dengan kelompok tani adalah wajib bagi setiap petani, guna memudahkan pendataan untuk mendapatkan bantuan terkait pertanian. Apalagi Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI mengarahkan untuk setiap petani menggunakan Kartu Tani sebagai perantara untuk menerima BLP (Bantuan Langsung Pupuk), walaupun dalam penggunaannya kartu tani ini masih bertahap. Kartu Tani ini mirip dengan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Perbedaannya, Kartu Tani hanya tersedia bagi petani yang secara aturan dan ketentuan berhak atas bantuan langsung pupuk. Letak kemiripan dengan kartu ATM ini dilihat bahwa kartu tani ini dapat digunakan maka perlu diisi terlebih dahulu dengan cara menabung. Sehingga para pemegang Kartu Tani akan mengetahui jumlah kuota pupuk dan sisa kuota setelah transaksi pembelian pupuk selesai (Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, 2021).

Menjelaskan pembahasan sebelum dari BPP Kedungwaringin bahwa bergabung dengan kelompok tani adalah hal yang wajib. Namun dalam wawancara yang peneliti temukan di lapangan bahwa masih ada yang belum bergabung dengan kelompok tani yaitu Bapak Nakip yang merupakan seorang buruh, alasan beliau tidak bergabung dengan kelompok tani adalah karena beliau hanya bekerja di sawah orang lain dan tidak memiliki lahan persawahan.

“Saya tidak bergabung dengan kelompok tani desa ini, karena saya hanya *bebujang* di sawah orang. Jadi saya tidak punya sawah” (Buruh Tani, Nakip, 10 Januari 2023).

Sedangkan untuk Bapak Enjuh sendiri beralasan bahwa beliau mempunyai pekerjaan lain sehingga tidak sempat untuk ikut perkumpulan dengan para petani lainnya.

“Saya tidak bergabung dengan kelompok tani, dikarenakan saya sibuk dengan pekerjaan lain sehingga saya tidak sempat untuk ikut perkumpulan kelompok tani” (Petani, Enjuh, 11 Januari 2023).

Selain itu, ada beberapa petani juga yang sudah bergabung dengan kelompok tani namun mereka menganggap bahwa bergabung dengan kelompok tani adalah hal yang tidak terlalu penting. Berikut ini hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Ano Sumarno dan Bapak Daming sebagai berikut:

“Saya sudah bergabung dengan kelompok tani sudah 2 tahun ini, yang sebelumnya saya seorang ASN (Aparatur Sipil Negara). Alasan saya bergabung dengan kelompok tani yaitu untuk mempermudah dalam proses koordinasi, ditambah adanya pembagian bibit. Namun setelah saya bergabung dengan kelompok tani saya menyadari tidak terlalu penting, apalagi ketuanya pasif. Kalau saja ketuanya tidak pasif pasti masuk Gapoktan itu penting. Misalnya seperti saat ini ada hama tikus yang seharusnya ada gerakan untuk mengusir hama tersebut tapi nyatanya tidak ada sama sekali. Dimana seharusnya ketua kelompok itu mengarahkan anggotanya untuk membasmi hama namun tidak ada sama sekali, jadi intinya tidak ada inisiatif untuk menggerakkan sesuatu demi kebaikan pertanian di Desa Karangharum” (Petani, Ano Sumarno, 11 Januari 2023).

Pendapat Bapak Ano tersebut yang menganggap bahwa bergabung dengan kelompok tani tersebut tidak penting karena beliau melihat tidak ada gerakan atau kebijakan yang dibuat oleh kelompok tani ditambah ketua kelompok tidak berperan aktif seperti pada saat terjadi serangan hama yang tidak sama sekali ada kebijakan untuk mengusir hama tersebut. Sedangkan Bapak Daming berpendapat:

“Saya bergabung dengan kelompok tani, dan menurut saya dengan saya bergabung dengan kelompok tani biasa saja tidak terlalu bermanfaat. Karena menurut saya masuk kelompok tani ya wajib nggak wajib, jadi pertanian saya juga tetap berjalan seperti biasa. Termasuk hasil produksi pertanian dan pemasaran juga berjalan seperti biasa” (Petani, Daming, 12 Januari 2023).

Bapak Daming dalam wawancara tersebut menganggap bahwa masuk ke dalam kelompok tapi seperti wajib dan tidak, karena dengan masuknya Bapak Daming ke kelompok tani pertanian yang dihasilkan tetap berjalan seperti biasa baik dari segi produktivitas maupun hasil pemasaran dari hasil panen tersebut. Pendapat para petani mengenai kelompok tani di atas juga sejalan dengan pandangan salah satu masyarakat Desa Karangharum yaitu saudara Gangga yang menganggap bahwa program yang diberikan kelompok tani hanya bersifat formalitas

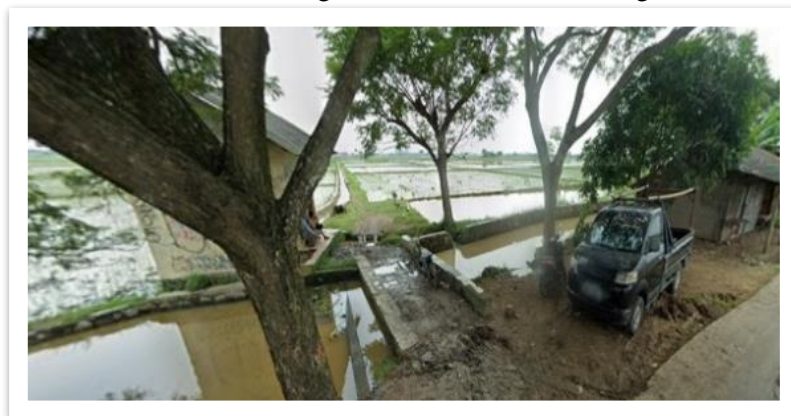
saja, dan tidak merubah pertanian di Desa Karangharum baik itu dari pertanian zaman dahulu maupun sekarang.

“Adanya kelompok untuk di Karangharum kan hanya membantu sosialisasi yang hanya formalitas dan ala kadarnya. Seperti bantuan subsidi pupuk dan urea. Terkait hal yang lain tidak ada yang bisa merubah kepada pertanian, karena saya melihat pertanian di Desa Karangharum gitu-gitu saja dari petani zaman dahulu sampai petani zaman sekarang” (Masyarakat, Gangga, 10 Januari 2023).

Dibalik pendapat-pendapat tersebut Gapoktan Desa Karangharum juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas-tugas mereka, agar pertanian di Desa Karangharum dapat lebih baik. Dengan banyak membuat diskusi atau pertemuan dengan para petani yang mengundang PPL.

“Ada kumpulan antara Gapoktan dan para petani, yang lokasinya terkadang dirumah saya atau di saung Gubuk Lotin. Kumpulan atau rapat ini dilaksanakan tidak menentu terkadang dalam masa tanam padi itu terjadi saat 15 hari atau sebulan. Terkadang dalam kumpulan ini ada PPL yang datang jika kelompok tani membutuhkan. Kumpulannya itu terlaksana saat musim tander. Selain itu juga terkadang ada sosialisasi PPL diantaranya seperti cara penggunaan obat, urea, dan juga pengolahan tanah” (Ketua Gapoktan, Ucep Somantri, 9 Januari 2023).

Gambar 8. Saung Gubuk Lotin Desa Karangharum



Sumber: Dokumentasi Peneliti di Lapangan

Dengan adanya pertemuan rutin tersebut, membuat para petani dan masyarakat memandang bahwa adanya kelompok tani adalah suatu hal yang penting dan membantu

pertanian di Desa Karangharum. Apalagi terkadang kelompok tani ini berpengaruh terhadap produktivitas dan pemasaran hasil pertanian di Desa Karangharum. Hal tersebut berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan para petani yang peneliti kategorikan yaitu petani pemilik, petani gadai, petani sewa, dan buruh tani. Petani pemilik yaitu Bapak Nasan dan Bapak Damang menerangkan bahwa:

“Bergabung dengan kelompok tani cukup terbantu, Karena semua diatur oleh kelompok tani dari mulai masuknya bantuan pembibitan dan obat dari pemerintah, atau adanya penyuluhan dari PPL pertanian. Jadi, dengan masuk kelompok tani lebih ringan dan enak. Ditambah adanya kelompok tani cukup berpengaruh terhadap produktivitas pertanian karena nanti kelompok tani mengarahkan untuk berkumpul guna mendapatkan penyuluhan dari PPL. Pada pemasaran juga berpengaruh apalagi disaat musim hujan yang banyak terjadi turunnya harga padi. Karena di dalam kelompok tani sendiri juga tergabung para tengkulak yang membeli padi para petani. Selain itu, kita juga bisa banyak dapat ilmu dari teman-teman kelompok tani yang lainnya karena sering terjadi diskusi bersama. Jadi kita tidak dapat ilmu dari satu pihak saja” (Wawancara, Petani, 11-12 Januari 2023).

Sedangkan petani gadai sendiri juga menganggap bahwa masuk kelompok tani ini terbantu, hal tersebut berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Masnah pada tanggal 13 Januari 2023.

“Adanya kelompok tani ini untuk mensejahterakan para petani. Contohnya seperti buruh lepas yang menjadi sejahtera. Selain itu, biar tahu informasi terkait pertanian. Jadi saya sudah bergabung dengan kelompok tani lumayan lama. Dan yang saya alami serta rasakan kayak sama saja antara sebelum masuk kelompok tani dan sesudah itu saja. Namun intinya Gapoktan ini memberikan arahan kepada kelompok-kelompok tani yang memang belum paham. Apalagi saat terjadi serangan hama dimana petugas tertentu memberikan penyuluhan kepada petani. Jadi intinya seperti itu saja dari tahun ke tahun. Tinggal kembali kepada para petaninya saja, jadi mau melaksanakan arah yang diberikan atau tidak” (Petani, Masnah, 13 Januari 2023).

Ibu Rami yang merupakan petani sewa juga merasakan demikian dimana ia menerangkan bahwa:

“Bergabung dengan kelompok tani untuk petani seperti saya itu wajib, karena tujuan dari adanya kelompok tanikan untuk mensejahterakan masyarakat dan petani. Contohnya seperti buruh lepas yang menjadi sejahtera. Dengan masuknya di kelompok tani sedikit berpengaruh pada produktivitas pertanian saya, seperti bisa konsultasi masalah obat atau benih padi. Begitupun untuk hasil dari pertanian ya sedikit berpengaruh terutama pada musim harga padi yang turun” (Petani, Rami, 12 Januari 2023)

Pendapat tersebut juga dirasakan oleh di Desa Karangharum, walaupun seorang buruh tani tidak memiliki lahan persawahan tetapi dengan mereka masuk ke dalam kelompok tani mereka jadi tahu bagaimana cara mengelola lahan pertanian dan tahu apa saja yang sedang menjadi program yang dijalankan pemerintah untuk pertanian. Sehingga para buruh tani ini tidak ketinggalan informasi terkait tanam padi dan dapat menjalankan sawah milik orang lain dengan lebih baik. Pendapat tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marsan dan Abo pada tanggal 10-13 Januari 2023, sebagai berikut:

“Alasan saya bergabung dengan kelompok tani ya dikarenakan saya ingin bergabung menjadi anggota Gapoktan. Sehingga kalau kita sudah masuk kita akan mendapatkan penyuluhan terkait cara-cara bertani jadi kita tidak ketinggalan informasi. Apalagi kelompok tani itu kan memang harus ada dan kita sebagai petani juga harus ikut bergabung. Ditambah saya sangat merasakan banyak manfaat dari bergabung dengan kelompok tani ini saya jadi tahu tentang masalah terkait obat-obatan untuk tanaman padi. Ditambah adanya Gapoktan ini berpengaruh terhadap produktivitas pertanian yang saya *garap*, lalu untuk pemasarannya juga berpengaruh seperti terkadang dilihat dari hasil panen. Bila hasil panen padinya bagus terkadang ada yang memborong atau dibeli harga dasar *gabah* petani tersebut” (Buruh Tani, Marsan, 10 Januari 2023).

Dengan demikian berdasarkan para pendapat para petani di atas yang menganggap bahwa masuk ke dalam kelompok tani cukup membantu pertanian mereka dimana ada pembagian bantuan seperti pupuk dan urea dan lainnya yang terkait pertanian, selain itu mereka juga dapat berdiskusi dengan para petani lainnya sehingga dapat menambah ilmu pertanian para petani tersebut. Para masyarakat Desa Karangharum juga berpendapat bahwa adanya kelompok tani ini penting dimana dapat membantu para petani di Desa Karangharum, hal tersebut berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Jamal, Iyang Saefudin, Ibu Marni, dan Sarinah pada tanggal 10-13 Januari 2023 sebagai berikut:

“Jadi agar para petani lebih disiplin dan pertanian lebih tertata. Sehingga nantinya pertanian di Desa Karangharum dapat lebih maju. Adanya bantuan pemerintah yang turun langsung melalui kelompok tani membuat para petani yang tergabung bisa mendapatkan bantuan tersebut. Selain itu, ketua kelompok tani dapat memberikan koordinasi kepada para petani untuk menggarap lahan persawahannya. Ditambah adanya kelompok tani ini dapat menjadi tempat bagi para petani untuk mendapatkan berbagai pengetahuan terkait pertanian. Apalagi untuk para petani baru”(Wawancara, Masyarakat, 11-13 Januari 2023).

Dengan demikian dari peran yang telah dijalankan oleh Pemerintah Desa yang bekerja sama dengan BUMDes dan Gapoktan kita bisa lihat bahwa program-program tersebut tentu banyak menuai pro dan kontra dari para petani dan masyarakat. Sehingga adanya program-program tersebut belum dapat mensejahterakan petani di Desa Karangharum. Apabila diamati kesejahteraan rumah tangga petani padi dimaksudkan dengan kemampuan keluarga dalam mencukupi segala keinginan untuk dapat hidup dengan sehat, produktif, serta layak (Hartoyo, dkk, 2010). Sedangkan Badan Pusat Statistik (2014) menjelaskan kesejahteraan sebagai suatu keadaan seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga petani dapat tercukupi sesuai dengan tingkat kehidupan yang layak.

Dengan demikian kesejahteraan merupakan suatu bentuk kehidupan dan kelangsungan hidup sosial, material dan spiritual yang diikuti dengan rasa aman, kesusilaan, dan kepuasan, baik lahir maupun batin, yang memungkinkan setiap warga negara mencurahkan upaya yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan fisik, spiritual, dan sosial bagi diri sendiri, rumah tangga, dan masyarakat yang memperjuangkan hak asasi manusia (Rambe, 2004). Maka dengan adanya pro dan kontra terhadap program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa yang berkolaborasi dengan pihak BUMDes dan Gapoktan maka dapat dikatakan bahwa kesejahteraan petani di Desa Karangharum belum menemui titik sejahtera. Maka dari itu perlu dilakukan lagi program-program yang memang dapat benar-benar dirasakan oleh para petani dan masyarakat Desa Karangharum. Seperti Pemerintah Desa yang mau ikut terjun langsung ke sawah, Program BUMDes yang harus mulai dijalankan, dan Gapoktan yang harus mampu membuat program untuk pertanian di Desa Karangharum.

B. Proses Kolaborasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Kolaborasi ini muncul karena disebabkan oleh gagasan dari berbagai pihak pendukung yang bekerja sama dan berkoordinasi dalam memecahkan masalah yang dihadapi publik. Ansell dan Gash mengatakan adanya pemerintahan yang berkolaboratif ini dibentuk sebagai respon atas kegagalan dalam sebuah pelaksanaan kebijakan publik, biaya tinggi, serta politisasi regulasi (Ansell dan Gash, 2008:54). Dari peran-peran yang sudah dijelaskan sebelumnya diketahui bahwa Pemerintah Desa melakukan kolaborasi dengan pihak BUMDes dan Gapoktan dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Karangharum.

Gambar 9

Bagan Proses Kolaborasi Pemerintah Desa dengan BUMDes dan Gapoktan Desa Karangharum



Ketiga aktor ini bekerja sama dalam proses tata kelola. Pemerintah desa bukan lagi satu-satunya entitas yang mampu memonopoli pemerintahan, tetapi membutuhkan bantuan dari entitas atau pihak lain karena adanya kapasitas pemerintah yang terbatas. BUMDes dengan dukungan dana harus dapat membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi dan hanya mencari keuntungan semata. Sedangkan Gapoktan sendiri sebagai penguatan partisipasi petani desa merupakan hal yang harus ditempuh dalam rangka mendukung dan mengembangkan pertanian Desa Karangharum sendiri, karena pada dasarnya faktor yang paling berpengaruh dalam penguatan gerakan reformasi desa terletak pada tingkat partisipasi para petani tersebut. Dengan demikian dari peran-peran *stakeholder* tersebut maka peneliti melakukan analisis proses kolaborasi yang terjadi di antara ketiga aktor tersebut dengan menggunakan model yang diberikan oleh Ansell dan Gash (2008) sebagai berikut:

1. *Face to face dialogue* (Dialog Tatap Muka)

Salah satu proses kolaborasi yang dianggap penting yaitu dialog tatap muka. Proses tersebut dilakukan dengan mengadakan pertemuan antar berbagai pemangku kepentingan secara serentak di satu tempat atau lokasi sehingga terjadi dialog langsung atau interaktif antara para pihak untuk membahas kepentingan bersama. Beberapa pertemuan formal menunjukkan bahwa proses kolaborasi dialog tatap muka telah berjalan dengan baik, yang ditunjukkan dengan beberapa kali pertemuan yang bersifat formal seperti MUSREMBANGDES (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) mau pun non formal baik secara langsung maupun dengan memanfaatkan media komunikasi lain. Pertemuan seperti Musrebangdes ini dilaksanakan dengan melibatkan beberapa pihak yang terdiri dari Pemerintah Desa (diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kasi Pembangunan), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), dan juga dari unsur Masyarakat. Perwakilan dari unsur masyarakat ini dilakukan dengan cara setiap dusun mengirimkan perwakilannya, dan warga yang dipilih mewakili dusunnya merupakan orang yang selama ini banyak berpartisipasi dalam program di desa. Hal ini berdasarkan keterangan yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala Desa Karangharum pada tanggal 9 Januari 2023, sebagai berikut:

“Selalu ada Musrebangdes yang dilaksanakan 1 tahun sekali untuk menyerap aspirasi dari berbagai tokoh seperti tokoh agama, petani, pengusaha, masyarakat. Jadi kalau ada kegiatan atau pembangunan kita menyerapnya dari aspirasi. Seperti usulan saluran air, pengajuan benih, dan simpan pinjam. Kemudian kita tampung dan baru direalisasikan seperti yang sedang berjalan yaitu pembuatan saluran air di beberapa titik” (Kepala Desa, H. M. Rimansyah A.Md, 9 Januari 2023).

MUSREMBANGDES (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) ini dilakukan setiap satu sekali untuk mengambil aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat yang berasal dari berbagai tokoh agama, petani, pengusaha, pedagang, dan tokoh masyarakat. Serta di dalam MUSREMBANGDES tersebut juga akan ada usulan-usulan yang disampaikan dari para tokoh, yang nantinya usulan tersebut akan menjadi program yang akan diperankan oleh Pemerintah Desa.

Selain adanya pertemuan formal tersebut, pihak Pemerintah Desa juga mengadakan pertemuan non formal seperti pada saat sebelum musim *tandur*. Seperti keterangan yang dijelaskan oleh Kepala Desa Karangharum, sebagai berikut:

“Kami melakukan penyuluhan yang bermitra dengan perusahaan pestisida, seperti pengendalian hama, atau penyuluhan tanam padi dari usia 0 sampai masa panen. Dimana ada 3 perusahaan yaitu PT. Sygenta, PT. Dupont, dan PT. FMC yang mempunyai produk insektisida, herbisida, dan fungisida yang bermitra dengan Gapoktan. Penyuluhan ini berlokasi di Gubuk Lotin yang juga turut mengundang PPL, UPTD, dan para petani Desa Karangharum” (Kepala Desa, H. M. Rimansyah, A.Md, 9 Januari 2023).

Keterangan tersebut menjelaskan bahwa pertemuan non formal ini dilakukan dengan melibatkan pihak swasta yaitu perusahaan yang mempunyai produk pestisida. Selain itu juga turut mengundang penyuluh PPL dan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas). Ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada para petani di Desa Karangharum untuk mengendalikan hama tanaman atau memberikan pengetahuan terbaru tata cara menanam padi dari usia 0 sampai masa panen.

2. *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)

Ansell dan Gash berpendapat bahwa proses tata kelola kolaboratif tidak hanya bernegosiasi di antara para *stakeholder* yang terlibat, tetapi juga membangun kepercayaan di antara para *stakeholder* tersebut. Sebab, kurangnya kepercayaan yang terjadi di antara *stakeholder* membuat munculnya *collaborative governance*. Membangun kepercayaan di sini berarti semua pihak memiliki niat yang sama untuk mengambil kebijakan terbaik bagi masa depan. Dalam peranan meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Karangharum, Pemerintah, BUMDes, dan Gapoktan saling membangun kepercayaan dengan cara menjalani komunikasi dan membangun koordinasi dengan pihak yang terkait.

Komunikasi dan koordinasi yang terjalin oleh pihak desa dengan BUMDes dan Gapoktan tersebut penting untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan petani secara efektif dan efisien. Hal ini dilakukan karena membangun kepercayaan bukanlah tugas yang mudah dan perlu dilakukan secara berkesinambungan. Para pihak yang terlibat juga harus saling memahami maksud dan tujuan yang sebenarnya untuk mencapai kesepakatan yang

saling menguntungkan. Namun komunikasi dan koordinasi dalam meningkatkan kesejahteraan petani masih bersifat parsial atau sepihak, karena komunikasi dan koordinasi yang terjadi belum sepenuhnya terjadi. Ini mengarah pada perbedaan perspektif, kepentingan yang tumpang tindih, dan aktivitas yang identik, sehingga tidak mungkin menciptakan kampanye yang efektif dan efisien. Seperti keterangan yang disampaikan oleh petani dan masyarakat Desa Karangharum, sebagai berikut:

“Pemerintah tidak mau turun langsung kebawah, tidak ada program lain yang dijalankan oleh Gapoktan, sedangkan BUMDes programnya tidak berjalan. Sehingga belum banyak dampak yang dirasakan oleh petani di Desa Karangharum” (Wawancara, Petani dan Masyarakat, 10-13 Januari 2023).

Keterangan tersebut menandakan bahwa program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa belum berjalan dengan maksimal, begitupun dengan Gapoktan dan BUMDes yang dinilai programnya hanya itu saja dan bahkan tidak berjalan. Dengan demikian proses kolaborasi dalam membangun kepercayaan meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Karangharum menunjukkan bahwa setiap aktor lebih berfokus kepada kepentingan masing-masing dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Sehingga proses kerjasama dalam membangun kepercayaan ini belum terjalin satu sama lain. Masing-masing aktor cenderung berpikir sendiri-sendiri karena lebih mementingkan programnya masing-masing, atau masih ada ego sektoral dari masing-masing aktor tersebut.

3. *Commitment to the process* (Komitmen Terhadap Proses)

Pada dasarnya komitmen memiliki hubungan yang penting dalam proses kolaboratif, karena tingkat komitmen antar pemangku kepentingan merupakan faktor penentu sukses tidaknya tata kelola kolaboratif. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari setiap pemangku kepentingan untuk mencegah risiko dalam proses kolaboratif. Namun, komitmen itu sendiri seringkali dianggap cukup rumit untuk dilaksanakan dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Dimana didalam sebuah komitmen, harus terjalin beberapa hubungan, seperti saling ketergantungan untuk mengatasi masalah dan mencari solusinya dari permasalahan yang terjadi

Proses kolaborasi dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Karangharum dalam hal komitmen terhadap proses yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BUMDes,

dan Gapoktan memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan petani yaitu memajukan pertanian yang mempunyai manfaat bagi para petani serta masyarakat sekitar, dengan pelaksanaan masing-masing *stakeholder* sesuai dengan tugas dan fungsinya.

“BUMDes dan Gapoktan kami bentuk dengan fungsi serta tugasnya masing-masing untuk mensejahterakan masyarakat terutama petani. BUMDes terdiri dari orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya yang diharapkan mampu mengembangkan tugasnya dengan sesuai. Sama seperti Gapoktan dibentuk untuk lebih memudahkan koordinasi dari setiap kelompok petani sehingga dapat memfokuskan arah kebijakan pada satu titik” (Kepala Desa, H. M. Rimansyah, M.Ad, 9 Januari 2023).

Penjelasan Kepala Desa tersebut menjelaskan bahwa kerjasama antar pemangku sudah berjalan lancar, dan semua pihak mengutamakan terwujudnya kesejahteraan petani di Desa Karangharum. Sehingga proses komitmen tersebut para pemangku kepentingan melakukannya secara sadar dalam menjalankan tugas maupun tanggungjawabnya dan tetap mengedepankan terwujudnya kesejahteraan petani di Desa Karangharum.

Namun pada kenyataannya di lapangan para pemangku kepentingan masih kurang optimal, terbukti dengan adanya tumpang tindih kepentingan dan munculnya ego sektoral antar pemangku kepentingan terkait. Terbukti dengan peran yang dijalankan oleh Gapoktan Desa Karangharum, dimana pada program yang dijalankan oleh Gapoktan yaitu pembagian bibit dan pupuk dari pemerintah pusat. Masih ada petani yang belum mendapatkan bantuan tersebut dikarenakan petani ini tidak bergabung dengan kelompok tani. Serta ada pula petani yang dikenakan pembayaran pada pembagian bibit sebesar 20 ribu rupiah per *kampil*. Dengan demikian proses kerjasama antar pemangku kepentingan tidak berjalan mulus karena proses kerjasama dilakukan hanya untuk menguntungkan satu pihak dan bukan untuk kepentingan bersama. Hal ini didasarkan pada kurangnya negosiasi atau koordinasi antar pemangku kepentingan terkait peningkatan kesejahteraan petani di Desa Karangharum.

4. *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama)

Shared Understanding yang terjadi dalam meningkatkan kesejahteraan petani dinilai belum optimal. Adanya pemahaman bersama yang seharusnya dimiliki oleh setiap *stakeholder* untuk mencapai tujuan bersama, namun tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kurangnya pemahaman bersama ini membuat banyak program yang dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan tidak sinkron. Terbukti dengan *stakeholder* yang dalam menjalankan program dan kegiatannya tidak memperhatikan program dari aktor lain. Bahkan masing-masing aktor tersebut tidak mengetahui program yang dilakukan oleh aktor yang lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Seperti keterangan yang disampaikan oleh informan yang merupakan seorang petani yaitu Bapak Damang dan Bapak Ano Sumarno, kedua informan tersebut sudah bergabung dengan kelompok tani Desa Karangharum namun mereka tidak mengetahui adanya program yang dijalankan oleh pihak BUMDes untuk pertanian di Desa Karangharum.

“Terus terang saja kurang tahu mengenai program BUMDes, karena tidak ada sosialisasi yang dilakukan terkait program tersebut. sehingga para petani belum merasakan dampak dari program tersebut “ (Wawancara, Petani, 11 Januari 2023).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *shared understanding* atau pemahaman bersama dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Karangharum ini belum terbangun karena masih terjadi tumpang tindih kepentingan antar instansi. Maka dapat diharapkan para *stakeholder* tersebut bila membuat program dapat mensosialisasikannya kepada para petani dan masyarakat agar program yang dijalankan dapat tepat sasaran.

5. *Intermediate Outcomes* (Hasil Sementara)

Hasil sementara dari sebuah proses yang sedang dilakukan ini memberikan manfaat dan bernilai strategis. *Intermediate outcomes* yang dapat dirasakan manfaatnya yaitu dari kerjasama para petani di Desa Karangharum dalam penanaman padi yang dirasa sudah sesuai dengan yang diharapkan walaupun belum berdampak besar bagi petani di Desa Karangharum tetapi telah berkontribusi terhadap pendapatan hasil desa meskipun belum memuaskan. Walaupun lahan pertanian padi di Desa Karangharum ini masih mendominasi namun masih menemui harga penjualan padi yang tidak stabil atau masih mengalami penurunan. Belum optimalnya hasil dari program yang dijalankan oleh setiap *stakeholder* karena masih terdapat tumpang tindih kepentingan maupun kurangnya kesepahaman bersama antar aktor yang terkait.

“*Alhamduillah* sejauh ini program PKTD sudah berjalan begitupun dengan pembagian bibit serta pupuk kepada para petani. Namun untuk simpan pinjam

sendiri kami akan usahakan segera terealisasi tahun ini dengan dibentuknya struktur baru dari BUMDes Karangharum” (Kepala Desa, H. M. Rimansyah, A.Md).

Keterangan Kepala Desa Karangharum tersebut menunjukkan bahwa program yang dijalankan oleh setiap *stakeholder* sebagian besar sudah berjalan walaupun ada yang belum berjalan namun pihak Pemerintah Desa akan mengupayakan untuk program tersebut dapat berjalan sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat khususnya petani.

“Saya berharap pertanian di Desa Karangharum ini dapat lebih maju, para pemangku kepentingan yang diamanatkan dalam bidang pertanian ini dapat bekerja secara maksimal. Selain itu, program-program yang dijalankan dapat dirasakan oleh petani dan masyarakat Desa Karangharum” (Kepala Desa, H. M. Rimansyah, A.Md, 9 Januari 2023).

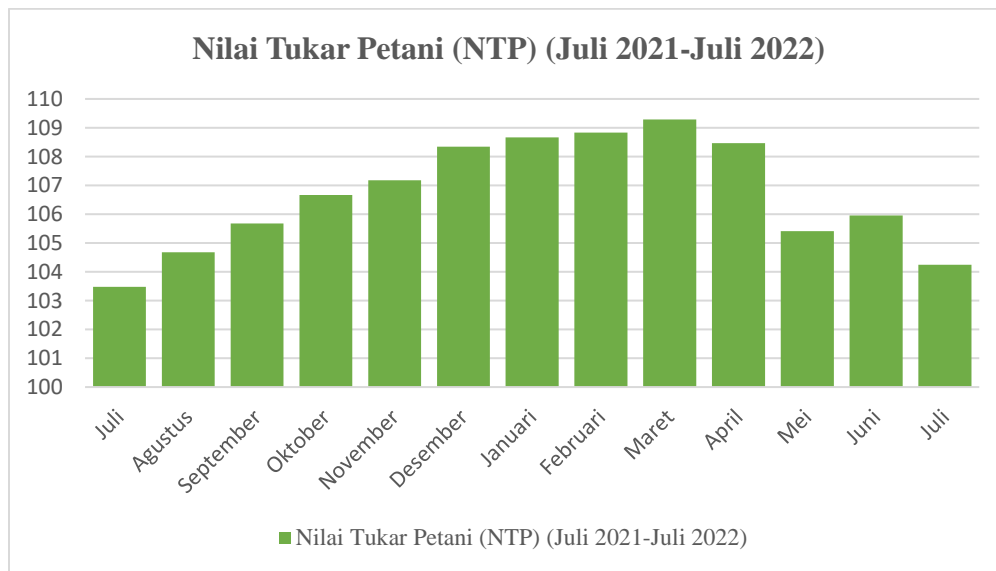
Berdasarkan keterangan Kepala Desa diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa mempunyai harapan atas kerja sama yang telah terjadi, dimana kerja sama ini diharapkan terus berlanjut dan semakin meningkatkan kerjasama yang ada. Sehingga dengan meningkatnya kerja sama yang dilakukan dapat memberikan kontribusi lebih terhadap perekonomian masyarakat, terutama petani di Desa Karangharum.

BAB V

HAMBATAN PEMERINTAH DESA KARANGHARUM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN BEKASI

Melihat kondisi pertanian Indonesia yang masih tergolong miskin, berdasarkan data BPS 2022 menyebutkan bahwa 26,36 juta jiwa penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan yang 12,29 juta diantaranya adalah penduduk yang berada di wilayah pedesaan. Selain itu bila dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) tingkat kesejahteraan petani berada di sekitar 100-105 pada Juli 2022 ini jauh berada di bawah target batas bawah RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yaitu 115-120 (Lutfi, 2014). Hal ini menunjukkan petani di Indonesia belum sejahtera.

Gambar 10



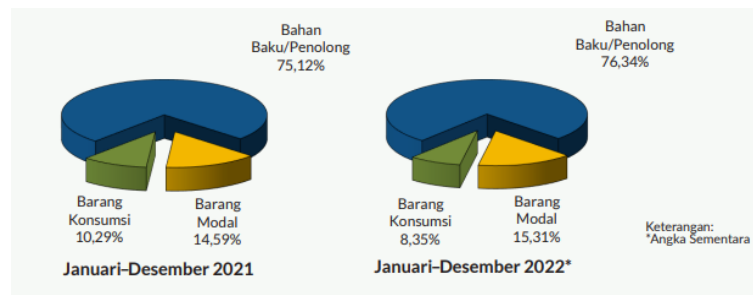
Sumber: BPS 2022

Lemahnya nilai NTP ini dapat dilihat dari It dan Ib. Dari sisi It diversifikasi konsumsi pangan sulit karena budaya masyarakat Indonesia yang masih menganggap nasi sebagai makanan pokok tertentu, sehingga yang sulit berubah yang menjadikan ketergantungan konsumsi pangan masih tinggi. Sedangkan sisi Ib, keterlambatan bantuan input usaha pertanian

seperti benih dan pupuk yang sering terjadi. Umumnya hal ini dapat terjadi karena anggaran belum bisa dicairkan dengan mudah pada awal-awal tahun, padahal pada awal tahun tersebut para petani harus segera memulai penanaman padi untuk mengejar stok pangan.

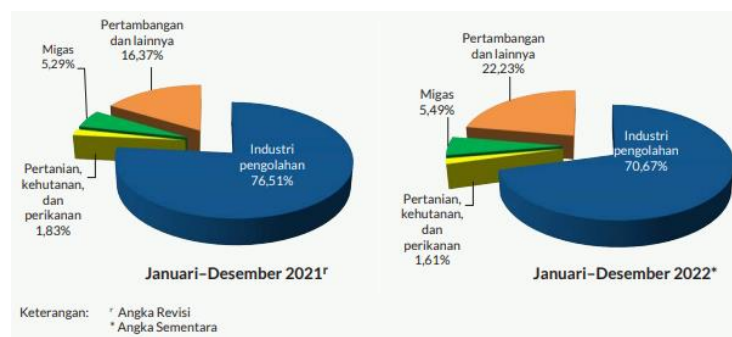
Kehidupan petani yang rata-rata masih berada pada tahap miskin ini dikarenakan petani tidak punya hak untuk menetapkan kebijakan pertanian pada semua level. Walaupun terdapat asosiasi pertanian yang ada di Indonesia, namun mereka tidak dapat memihak para petani. Peneliti ambil contoh di Negara India, dimana di India mereka sudah memberlakukan *Farmer Jury* yang berdampak pada gerakan kedaulatan pangan. Sehingga di India yang memiliki 1,2 miliar penduduk tetapi masih bisa ekspor 4,5 juta ton beras, 2,2 juta ton jagung, dan 4,2 juta ton tepung kedelai pada tahun 2011. Sedangkan di Indonesia yang hanya memiliki 240 juta penduduk tetapi banyak mengimpor berbagai komoditas, seperti yang dapat dilihat pada **Gambar 11** dan **Gambar 12** dibawah ini.

Gambar 11. Peranan Nilai Impor Menurut Golongan Penggunaan Barang, Januari-Desember 2021 dan 2022



Sumber: BPS 2023

Gambar 12. Struktur Nilai Ekspor, Januari-Desember 2021 dan 2022



Sumber: BPS 2023

Berdasarkan gambar di atas yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan data impor bahan baku Indonesia pada tahun 2022 menempati 76,34% dari total impor yang dilakukan pemerintah yang mana ini naik 1,22% pada periode 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia saat ini masih ketergantungan oleh bahan-bahan impor. Sedangkan untuk data ekspor sendiri pada kategori pertanian, perhutanan, dan perikanan hanya sebesar 1,61% pada tahun 2022, yang mana ini menunjukkan penurunan pada tahun 2021 yang mendapatkan angka sebesar 1,83%. Produk yang ditanam diekspor sebagai bahan mentah dan sebagian diimpor sebagai produk jadi. Impor terutama untuk konsumsi, bukan untuk proses produksi. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi konsumsi dalam negeri sangat bergantung pada impor yang menjadikan salah satu penyebab dari menurunnya tingkat kesejahteraan petani.

Selain itu, penurunan jumlah rumah tangga usaha pertanian dari tahun ke tahun juga menjadi penyebab turunnya tingkat kesejahteraan petani yang dapat dilihat pada **Gambar 13**, yang menunjukkan jumlah petani per 2019 mencapai 33,6 juta orang sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 300 ribu orang menjadi hanya 33,3 juta. Adanya penurunan tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang beralih mencari pekerjaan yang lebih layak dan menguntungkan. Selain itu, generasi muda saat ini enggan terjun ke dunia pertanian. Data berikut juga menunjukkan bahwa petani muda usia 20-39 tahun di Indonesia hanya 8% atau setara dengan 2,7 juta orang. Hal ini diperparah dengan berkurangnya jumlah petani muda yang beregenerasi. Pada data yang sama, dari tahun 2017 hingga 2018, jumlah petani muda mengalami penurunan sebanyak 415.789. Berkurangnya usia produktif di Indonesia disebabkan minat mereka yang lebih besar pada pekerjaan non-pertanian ditambah dengan dukungan pemerintah yang kurang untuk sektor pertanian. Jika sektor pertanian menjadi kurang diminati oleh penduduk usia produktif, dalam waktu 10 tahun sektor pertanian Indonesia akan semakin terpuruk sehingga mengancam ketahanan pangan Indonesia.

Gambar 13



Sumber: BPS per Februari 2022

Maka dari itu terdapat beberapa aspek yang menghambat peranan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani dalam suatu wilayah. Hambatan tersebut bisa datang dari peran pemerintah itu sendiri yang dinilai kurang maksimal, atau dari sumber daya manusia sendiri yang kurang berkualitas, serta dari kondisi alam dalam yang susah untuk diprediksi. Dengan demikian dalam skripsi ini peneliti akan memuat tiga hambatan utama yang dirasakan Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani yaitu mengenai aspek program Pemerintah Desa, aspek kondisi geografis, dan aspek sumber daya manusia.

A. Program Pemerintah Desa

Sebelumnya peneliti telah membahas mengenai program Pemerintah Desa Karangharum untuk pertanian yang bekerjasama dengan pihak BUMDes dan Gapoktan. Pemerintah desa sendiri mengeluarkan program berupa PKTD (Padat Karya Tunai) yang meliputi pembersihan saluran air dan irigasi yang mengeluarkan dana sejumlah 20.000.000 program ini melibatkan para kelompok tani yang diberi upah sebesar 50.000 rupiah. BUMDes sendiri membuat program berupa simpan pinjam dengan bunga yang rendah yang dapat digunakan bagi para petani dan masyarakat yang sedang membutuhkan modal. Sedangkan

pihak Gapoktan sendiri yaitu memberikan bantuan dari pemerintah pusat serta melakukan penyuluhan terkait pertanian dengan PPL

1. Program PKTD (Padat Karya Tunai Desa)

Program PKTD beberapa petani berpendapat bahwa program tersebut tidak memuaskan para petani, karena program tersebut tidak berjalan dengan semestinya, sedangkan beberapa aduan sudah dilayangkan kepada pemerintah tetapi tidak ada tanggapan. Sebagaimana wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Bapak Nakip dan Ibu Rami pada tanggal 10-12 Januari 2023.

“Program PKTD itu program pembersihan saluran air buat persawahan, supaya jalannya air itu lancar. Sehingga nantinya air tersebut dapat masuk ke sawah-sawah petani. Tetapi pada kenyataannya petani disini masih banyak kesulitan mendapatkan air. Lalu, apabila program tersebut telah selesai pemerintah melakukan pengontrolan yang di foto-fotoin hanya yang bagus-bagusnya saja, sedangkan yang *bala-bala* tidak diperlihatkan. Para petani di sini sudah banyak melakukan aduan, tetapi tidak ada tanggapan” (Wawancara, Petani, 10-12 Januari 2023).

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diamati bahwa kelancaran masuknya air ke lahan persawahan petani adalah inti dari program PKTD tersebut. Dimana air adalah kebutuhan primer yang sangat penting bagi pertanian, maka ketersediaan air ini harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat. Air merupakan komponen fisik yang sangat vital yang dibutuhkan dalam jumlah besar untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman karena sekitar 85%-90% kandungan sel inti dan jaringan tanaman adalah air. Dengan demikian kurangnya air merupakan hambatan utama dalam pertanian di Desa Karangharum. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Enjuh dan Bapak Damang, mereka menjelaskan bahwa:

“Dalam masalah perairan, Pemerintah Desa sendiri kurang tanggap. Walaupun ada programnya tapi apa buktinya air masih jadi masalah buat pertanian di sini. Lalu pemerintah juga tidak mau turun kebawah untuk memantau pertanian secara langsung, seperti apakah itu sawah airnya masuk atau tidak, jadi ke banyak petani disini melakukan pompa air semua. Ada pula yang mengatasinya dengan membuat *mantek* sendiri.

Sehingga tidak merasakan dampak dari programnya sama sekali. Karena semuanya disini petani mengatasinya secara mandiri, seperti membeli mesin pompa air sendiri” (Wawancara, Petani, 11 Januari 2023).

Air merupakan hal yang sangat penting dalam pertanian. Dimana kurang atau sulitnya petani Desa Karangharum mendapatkan air salah satunya dikarenakan Desa Karangharum ini tidak mendapatkan air dari sungai utama yaitu Sungai Kalimalang, yang mana desa ini mendapatkan air dari sungai buangan yang ditampung di Sungai Ranggong. Hal tersebut dijelaskan oleh ketua Gapoktan Desa Karangharum pada tanggal 9 Januari 2023.

“Kesulitan air di Desa Karangharum ini terjadi dikarenakan desa ini tidak mendapatkan saluran air dari sungai langsung yaitu Sungai Kalimalang, yang mana desa ini mendapatkan air untuk persawahan yang berasal dari air pembuangan yang ditampung dari kali ranggong. Jadi sumber air yang desa ini dapatkan untuk pertanian itu berasal dari tadangan air dari sungai utama. Dimana prosesnya itu petani bergantian menutup pintu air penyangga, agar air tersebut masuk kedalam perairan desa ini” (Ketua Gapoktan, Ucep Somantri, 9 Januari 2023).

Gambar 14. Pintu Air Desa Karangharum



Sumber: Dokumentasi Peneliti di Lapangan

Kesulitan air tersebutlah yang membuat pertanian di Desa Karangharum sulit untuk menetapkan program ip 400 yaitu program 4 kali tanam dan 4 kali panen. Hal tersebut dikarenakan untuk memulai menanam padi menunggu air terlebih dahulu.

“Ada program dari pemerintah pusat yang disosialisasikan oleh PPL, yang menyuruh kepada para petani untuk melakukan 4 kali tanam padi dalam satu tahun. Namun di Desa Karangharum ini sulit tercapai, dimana waktu umur padi di Desa ini rata-rata 120 hari. Dan paling tidak hanya bisa 3 kali tanam saja, dikarenakan kendalanya air yang susah. Jadi sebelum tanam padi itu harus menunggu air dulu, baru dilakukan proses tanam padi” (Ketua Gapoktan, Ucep Somantri, 9 Januari 2023).

Terkait kendala tersebut peneliti mewawancarai pihak dinas pertanian untuk menanyakan permasalahan mengenai air ini. Pihak dari dinas pertanian yang diwakilkan oleh Bapak Arif Risman menerangkan bahwa:

“Hambatan yang saat ini sedang terjadi pada pertanian di Kabupaten Bekasi salah satunya di Desa Karangharum itu terhadap produktivitas yang terkait dengan kondisi saluran irigasi yang sudah sedimentasi dan menyempit. Maka kami selalu melakukan pemantau dan pengecekan secara rutin oleh PPL yang ada di setiap kecamatan, yang selanjutnya dilakukan pembersihan oleh para petani-petani yang ada di wilayah tersebut. Namun apabila irigasi tersebut sudah parah maka akan ditindak lanjuti dengan melakukan rehabilitasi yang melibatkan partisipasi dari P3A dan Gapoktan yang bertugas nantinya sebagai penerima bantuan pemerintah tersebut. Mereka yang nantinya akan memulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan konstruksi, sampai pemeliharaan irigasi tersebut. P3A dan Gapoktan akan dibimbing serta dibina oleh petugas dinas pertanian dan instansi terkait. Untuk anggarannya sendiri ini berdasarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2019 dengan pembiayaan yang dikeluarkan yaitu sebesar 1.100.000 per hektar untuk wilayah Jawa dan Bali” (Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Arif Risman, 21 Februari 2023).

Pada wawancara tersebut untuk permasalahan mengenai air ini menjadi permasalahan yang menyangkut produktivitas dari pertanian itu sendiri. Dimana selalu dilakukan pengontrolan irigasi-irigasi, yang selanjutnya dilakukan pembersihan yang dilakukan oleh para

kelompok tani setempat. Namun apabila saluran irigasi tersebut sudah rusak parah maka akan dilakukan rehabilitasi.

Berdasarkan keterangan tersebut Kepala Desa Karangharum mengatakan bahwa Pemerintah Desa sudah berusaha untuk menjalankan program dengan semaksimal mungkin, namun hal tersebut kadang terkendala dari pemerintah pusatnya sendiri. Seperti uang yang diturunkan bertahap atau terkadang tidak sesuai tanggal, sedangkan ada target pertanian yang harus dikejar yang membuat akhirnya program yang dijalankan tidak berjalan secara maksimal.

“Pemerintah Desa sudah berusaha menjalankan program sebaik mungkin, namun terkadang banyak masalah di lapangan yang tidak dapat diprediksi terkadang dana yang belum cair, karena dari pemerintah sendiri kan dana itu turunnya bertahap yaitu ada tiga tahap. Sehingga apabila petani membutuhkan saluran irigasi yang mendesak kami memakai uang yang ada. Jadi tidak menunggu dana cair sepenuhnya”.

2. Program Simpan Pinjam

Begitupun yang terjadi pada BUMDes Karangharum dimana program yang mereka jalankan dapat dikatakan tidak berjalan. Karena para petani dan masyarakat sendiri belum merasakan dampak dari program tersebut.

“Hambatan yang BUMDes rasakan yaitu karena uang yang seharusnya digunakan untuk menjalankan program namun karena terjadi pandemi covid-19 yang membuat dana harus terpaksa dialihkan untuk mengatasi pandemi terlebih dahulu. Sehingga dapat dikatakan pandemi covid-19 membuat BUMDes Karangharum tidak berjalan” (Bendahara BUMDes, Ipah Masripah, 9 Januari 2023).

Keterangan tersebut menjelaskan bahwa program BUMDes tidak berjalan akibat pandemi covid-19 yang mengharuskan dana yang tadinya untuk BUMDes namun harus dialihkan terlebih dahulu untuk mengatasi pandemi covid-19. Sehingga programnya tidak berjalan dan BUMDes Karangharum ini menjadi salah satu BUMDes yang terkena dampak dari pandemi covid-19. Dimana permodalan merupakan aspek terpenting bagi pengelolaan BUMDes agar dapat bergerak dan menjalankan kegiatannya. Jika BUMDes masih dalam tahap pertumbuhan, sangat membutuhkan dukungan dana yang besar. Sehingga kendala yang terjadi saat ini di lapangan yaitu proses pelaksanaan strategi dalam pengembangan ekonomi melalui BUMDes

membutuhkan selang waktu yang tidak singkat karena membutuhkan sokongan modal dari Pemerintah Desa yang belum turun.

Banyak pandangan dari para masyarakat dan petani terkait tidak berjalannya program BUMDes tersebut yang kurang lebih mereka sangat menyayangkan kegagalan program tersebut, namun mereka berharap BUMDes Karangharum ini dapat berjalan dengan program-program yang diwacanakannya sehingga dapat membantu para petani serta masyarakat Desa Karangharum. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 15 informan yang terdiri dari petani dan masyarakat Desa Karangharum, sebagai berikut:

“Adanya BUMDes saat ini tidak membantu, karena walaupun ada program tapi itu tidak berjalan sama sekali. Bila dilihat program yang dicetuskan BUMDes ini bagus sekali untuk membantu para petani dan masyarakat. Namun karena uangnya susah turun jadi membuat programnya susah untuk diwujudkan. Namun besar harapan agar program dari BUMDes ini dapat benar-benar dapat terealisasikan agar dapat membantu para petani dan masyarakat yang kekurangan modal” (Wawancara, 10-14 Januari 2023).

Baik itu program yang dijalankan Pemerintah Desa maupun BUMDes semuanya mempunyai hambatan-hambatannya masing-masing yang membuat program yang dijalankan tidak maksimal sehingga banyak mendapat keluhan dari para petani dan masyarakat Desa Karangharum. Dengan intinya akibat tidak ada modal yang diberikan oleh Pemerintah Desa membuat seluruh program yang diwacanakan tidak berjalan.

3. Program Pemberian Bibit, Pupuk, dan Penyuluhan Pertanian

Dimana petani Desa Karangharum mengatakan bahwa program yang dijalankan oleh Gapoktan hanya pembagian pupuk, bibit, dan obat-obatan yang berasal dari pemerintah pusat serta melakukan penyuluhan pertanian yang dibantu oleh PPL terkait. Tanpa adanya pembuatan program lain yang dapat memajukan pertanian di Desa Karangharum. Alasan yang membuat program Gapoktan hanya itu-itu saja yaitu karena tidak adanya *support* dana Pemerintah Desa. Dimana para anggota Gapoktan ini memerlukan kebutuhan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, karena untuk kehidupan sehari-hari saja masih sulit jadi untuk membuat kebijakan lainnya tanpa adanya penyokong modal dari pemerintah sangat sulit untuk dilakukan. Terkecuali kebutuhan untuk sehari-hari dapat terpenuhi sekaligus ada modal yang

diberikan Pemerintah Desa pasti akan ada program-program yang dapat memajukan pertanian sekaligus mensejahterakan pertanian di Desa Karangharum.

“Untuk kebutuhan sehari-hari saja petani di sini masih sulit, apalagi untuk membuat suatu kebijakan juga sulit tanpa adanya bantuan modal dari Pemerintah Desa. Maka dari itu saya berharap kepada Pemerintah Desa untuk memberikan dana khusus untuk kelompok tani. Sehingga kemajuan pertanian di Desa Karangharum dapat tercapai” (Ketua Gapoktan, Ucep Somantri, 9 Januari 2023).

Selain itu, ada hambatan lain yang dirasakan para petani yaitu terkait masih adanya petani yang merasakan bahwa pemberian yang diberikan oleh Gapoktan kurang serta pemberian bantuan yang terkadang terlambat datangnya. Ditambah sosialisasi terkait pertanian yang dilakukan oleh pihak PPL dan ketua Gapoktan yang dinilai hanya formalitas semata sehingga para petani tidak mengerti bagaimana maksud dari apa yang disampaikan. Hal tersebut berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ano Sumarno dan Bapak Daming pada tanggal 11-12 Januari 2023), sebagai berikut:

“Masalah pupuk yang terkadang terlambat datangnya, jadi apabila petani sudah membeli pupuk dari pihak luar, baru bantuan dari pemerintah datang. Selain itu, terkadang bantuan yang didapatkan tidak sesuai sehingga para petani membeli sendiri seperti pupuk dan bibit. Selain itu, terkait penyuluhan yang diberikan oleh PPL terkadang hanya bersifat formalitas dikarenakan mereka tidak mau turun langsung untuk mempraktekkan bagaimana cara baiknya, sehingga para petani bingung mencerna maksud yang disampaikan oleh PPL dan ketua tersebut” (Petani, Ano Sumarno, 11 Januari 2023).

Berdasarkan pendapat tersebut, dijelaskan bahwa Indonesia masih mengalokasikan sebagian besar anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk subsidi energi yang tidak sesuai target. Alokasi anggaran subsidi benih APBN rata-rata hanya 2,3% dari total subsidi non energi per tahun dan rata-rata 0,4% dari total subsidi per tahun. Sementara itu, rata-rata subsidi pupuk mencapai 37 persen dari subsidi non energi dan 7 persen dari total subsidi. Informasi ini menunjukkan bahwa untuk negara agraris seperti Indonesia sangat sedikit (Analisis Anggaran dan Direktorat Pelaksana APBN, SETJEN DPR-RI, 2014: 116). Maka dengan banyak keluhan yang dirasakan petani terhadap program pemerintah, membuat program yang dibuat tersebut tidak berjalan secara maksimal. Sehingga

mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani. Apabila program tersebut dalam berjalan dengan lancar maka tingkat kesejahteraan petani pun juga akan meningkat.

B. Aspek Geografis

Penyebab turunnya produktivitas pertanian dapat disebabkan salah satunya oleh *force majeure* atau dengan kata lain di luar kendali manusia, seperti bencana alam. Dimana Indonesia sendiri terletak di wilayah *ring of fire*, yang mungkin Indonesia akan lebih sering terkena dampak dari bencana alam.

Tabel 18

Banyaknya Kejadian Bencana Alam menurut Desa dan Jenis Bencana Alam di Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi, 2021

Desa/Kelurahan	Jenis Bencana		
	Banjir	Banjir Bandang	Kekeringan
Bojongsari	3	0	0
Kedungwaringin	1	0	0
Waringinjaya	1	0	0
Karangsambung	1	0	0
Karangharum	1	0	0
Mekarjaya	0	0	0
Karangmekar	1	0	0
Jumlah	8	0	0

Sumber: BPS, Pendataan Updating Potensi Desa (Podes) 2021

Berdasarkan **Tabel 18** di atas dapat diketahui bahwa tahun 2021 Desa Karangharum pernah dilanda banjir, yang mengakibatkan banyak gagal panen, sehingga tidak ada hasil pertanian di Desa ini hanya sedikit. Banjir mengakibatkan lahan persawahan petani terendam yang membuat tanaman padi petani roboh. Namun bencana banjir di desa ini tidak terlalu sering terjadi hal ini tergantung dari volume hujan yang turun setiap tahunnya yang dapat dilihat dalam **Tabel 19**. Sehingga bencana ini tidak terlalu sering berdampak untuk pertanian.

Tabel 19

Keadaan Iklim di Kecamatan Kedungwaringin, 2021

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
Januari	384,0	26
Februari	678,6	26
Maret	187,4	21
April	358,2	23
Mei	115,3	14
Juni	257,6	21
Juli	66,3	8
Agustus	165,7	13
September	187,6	16
Oktober	311,0	19
November	344,0	27
Desember	446,0	28

Sumber: Stasiun Meteorologi Citeko dalam BPS 2022

Selain banjir ada juga bencana yang selalu menjadi masalah besar untuk pertanian, yaitu hama. Datangnya hama tidak dapat diprediksikan. Prakiraan luas serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) utama tanaman padi pada musim tanam 2021 adalah 254.845 ha. Prakiraan luas serangan masing-masing OPT tanaman padi yaitu penggerek batang padi ada sekitar 68.477 ha, wereng batang coklat terdapat 55.526 ha, lalu hama tikus terdapat 68.183 ha, hama bias ada sekitar 32.391 ha, hama hawar daun bakteri terdapat sekitar 28.743 ha, dan tungro ada sekitar 1.525 ha yang dapat dilihat pada **Tabel 20** di bawah ini (Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, 2021).

Tabel 20

Prakiraan Serangan OPT Utama pada Tanaman Padi di Indonesia MT 2021

NO	OPT	KLTS MT. 2020/2021 (ha)	RAMALAN MT. 2021 (ha)
1	Penggerek Batang Padi (PBP)	49.263	68.477
2	Wereng Batang Cokelat (WBC)	21.016	55.526
3	Tikus	47.844	68.183

4	Bias	22.620	32.391
5	Hamar Daun Bakteri (HDB)	33.676	28.743
6	Tungro	1.085	1.525
JUMLAH		175.505	254.845

(KLTS: Kumulatif Luas Tambah Serangan)

Berdasarkan keterangan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 6 (enam) serangan utama hama pada tanaman padi. Adanya hama tersebut banyak dirasakan oleh para petani di Desa Karangharum. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 10 petani Desa Karangharum mereka mengatakan bahwa selain masalah air, hama merupakan permasalahan utama juga yang datangnya tidak dapat diprediksi.

“Selain masalah air, ada pula hama yang menjadi permasalahan dalam pertanian di Desa Karangharum. Hama tersebut yaitu hama sundep, tikus, kupu-kupu. Untuk solusinya sendiri kalau hama tikus itu digali, sedangkan kalau hama sundep dan kupu-kupu itu dilakukan penyemprotan” (Wawancara, Petani, 10-13 Januari 2023).

Penjelasan tersebut dapat diketahui selain permasalahan air dapat diketahui juga bahwa ada permasalahan lain yang dihadapi oleh petani yaitu hama. Cara Pemerintah Desa sendiri itu mengatasi hal tersebut yaitu dengan ketua kelompok tani melakukan koordinasi dengan bertugas POPT untuk meminta bantuan kepada petugas POPT setempat untuk memberikan pantauan agar jangan sampai tanaman-tanaman padi petani ini ada serangan hama. Nantinya ada gerakan dari petugas POPT untuk membantu baik itu akan mengusulkan pestisida bantuan untuk membasmi hama-hama tersebut. POPT (Pengendalian/pengawasan obat pada tanaman) tugasnya sebagai pengamat hama pada tanaman padi.

C. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan hal utama karena segala potensi sumber daya yang dimiliki oleh manusia dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk mencapai suatu keberhasilan dalam mewujudkan tujuan baik secara individu maupun kelompok. Dengan tingginya kualitas SDM yang dimiliki oleh suatu negara maka dapat menjadi indikasi kemajuan untuk negara tersebut. Begitupun dalam suatu bidang, seperti pertanian misalnya, apabila dalam sektor pertanian tersebut diisi oleh SDM yang berkualitas maka akan dapat memajukan sektor

pertanian itu sendiri. Namun bila dilihat dari **Tabel 21** dibawah ini yang menunjukkan kualitas petani dalam tingkat pendidikan masih sangat didominasi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Tabel 21
Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non-Pertanian Menurut Tingkat Pendidikan 2020-2022

Tingkat Pendidikan	Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non Pertanian Menurut Tingkat Pendidikan		
	2020	2021	2022
<= SD	69,18	70,26	70,59
SMP	59,25	59,82	59,40
SMA Umum	45,15	44,76	42,03
SMA Kejuruan	34,70	35,24	33,47
Diploma I/II/III	23,71	23,71	22,75
Universitas	16,16	14,57	14,35

(Sumber: BPS 2022)

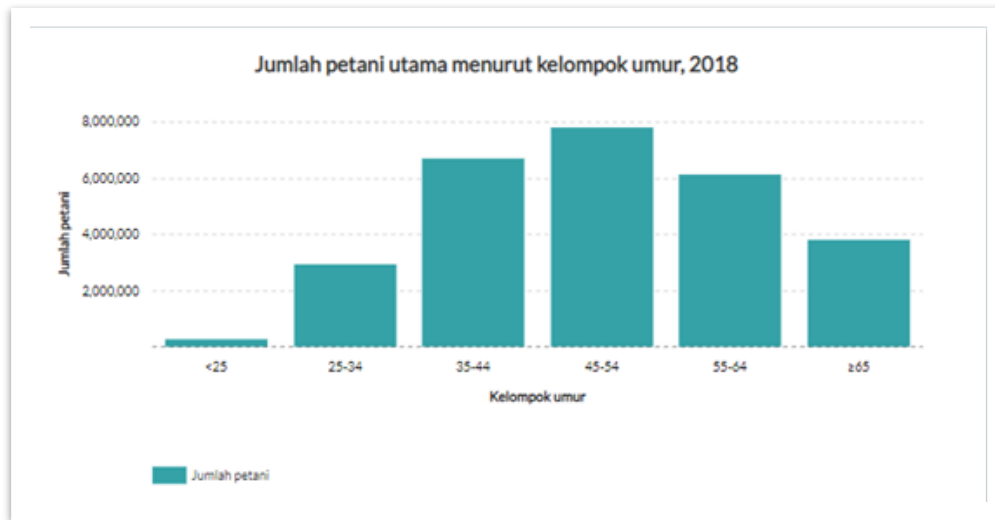
Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sekolah dasar mendominasi pekerjaan pada bidang pertanian. Walaupun sudah mulai beragamnya tingkat pendidikan yang ditunjukkan dengan adanya petani yang memiliki tingkat pendidikan universitas. Dengan demikian tidak heran jika produksi pertanian masih belum mampu untuk berdaya saing tinggi. Sektor pertanian Indonesia masih terkendala dengan masih rendahnya tingkat pendidikan para petaninya. Rendahnya tingkat pendidikan inilah yang juga membuat petani enggan untuk menyuarakan pendapatnya atas ketidakadilan yang terjadi seperti misalnya pada bantuan yang diterima.

“Harapan saya lebih kepada petaninya sendiri yang mampu *melek* melihat keadaan, jadi jangan jadi otak tani saja. Melihat ketidakadilan yang terjadi misalnya terhadap bantuan pemerintah yang tidak sesuai harus bisa tegas untuk menentang hal tersebut. Dimana saya ingin petani itu tahu hak-haknya. Bila melihat sekarang ini sudah padinya murah ditambah banyak calo. Apalagi pemerintah belum bisa mengusir *calo-calo* para petani. Sehingga banyak membuat para petani menjeritkan disitu. Banyaknya *calo* ini mengakibatkan hasil panen tidak turun langsung ke bulo dan ditambah bulog yang saat

ini kita mati dan tidak jalan. Jadi saya berharap pemerintah bisa mengatasi hal tersebut” (Masyarakat, Gangga, 10 Januari 2023).

Selain ada pula yang menjadi hal yang menarik dimana rata-rata para petani yang memang lulusan SD ini banyak didominasi oleh petani lama atau petani yang sudah berumur di atas 40 tahun. Yang dapat dilihat pada **Gambar 15** jumlah petani menurut kelompok umur dibawah ini.

Gambar 15



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dilihat dari **Gambar 15** mengenai data jumlah petani menurut kelompok umur, menunjukkan rendahnya minat generasi muda bekerja di sektor pertanian. Data menunjukkan, hanya ada 885.077 petani yang berusia di bawah 25 tahun. Sementara itu, ada 4,1 juta petani yang berusia 25-34 tahun. Kemudian, petani pada kelompok umur 35-44 tahun ada sebanyak 8,17 juta orang. Kelompok usia yang mendominasi profesi ini adalah petani pada rentang usia 45-54 tahun yaitu ada sebanyak 9,19 juta jiwa. Sedangkan petani kelompok umur 55-64 tahun dan lebih dari 65 masing-masing sebanyak 6,95 juta dan 4,19 juta orang. Dengan demikian petani jumlah petani yang memiliki umur 25 tahun kebawah jumlah paling sedikit, sedangkan untuk kelompok umur terbanyak 45-54 tahun. Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020 menunjukkan 64,50 juta penduduk Indonesia berada dalam kelompok usia muda.

Menumbuhkan minat generasi muda untuk menjadi petani adalah hal yang penting, dikarenakan generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang dapat mengarahkan bangsa

ini kepada kemajuan dalam segala sektor yang salah satunya sektor pertanian. Adanya permasalahan tersebut juga diakui oleh ketua Gapoktan Desa Karangharum, dimana beliau mengatakan bahwa susah mencari jasa petani untuk saat ini terutama di Desa Karangharum.

“Untuk saat ini banyak generasi muda yang beralih ke sektor industri artinya udah banyak yang meninggalkan pertanian. Bahkan untuk jasa tanam di Desa Karangharum saja kalau tidak melibatkan jasa orang luar kampung terutama daerah-daerah pesisir kampung bawah di sini sudah susah karena tidak ada jasa tani yang baru. Karena petani lama di sini sudah banyak memegang lahan garapan” (Ketua Gapoktan, Ucep Somantri, 9 Januari 2023).

Rendahnya minat generasi muda di Desa Karangharum ini juga di sampai oleh salah satu informan masyarakat milenial yaitu Gangga yang mengatakan bahwa beliau tidak mau menjadi petani karena:

“Tidak, karena saya melihat dari sistem-sistem yang ada, untuk sekarang ini menurut saya tidak ada pemuda yang mau *bebelokan*, ditambah pupuk mahal, proses susah. Sedangkan penghasilan yang ada menurun bukannya naik. Jadi kalau memang keadaannya seperti itu tidak ada generasi milenial yang mau jadi petani. Tetapi kalau Pemerintah Desa atau kabupaten bisa mempermudah untuk regenerasi petani menjadi lebih baik, mungkin saya mau” (Masyarakat, Gangga, 10 Januari 2023).

Dengan demikian dari pihak Dinas pertanian juga mengatakan bahwa selain produktivitas mengenai saluran irigasi, rendahnya minat petani juga menjadi faktor penghambat pertanian di Kabupaten Bekasi, dalam wawancaranya tanggal 21 Februari beliau menyampaikan:

“Untuk saat ini rendahnya jumlah pekerja tani yang semakin berkurang mengakibatkan produktivitas pertanian juga berkurang, makanya perlu adanya regenerasi petani. Untuk saat ini Regenerasi petani, dimana di Jawa Barat sendiri mulai membuat program petani milenial yaitu dengan cara pemerintah memberikan semangat, agar petani-petani muda atau anak-anak petani mau kembali ke sawah. Dengan cara atau teknologi kekinian. Untuk sejauh ini programnya masih berjalan jadi hanya baru beberapa petani muda yang dibimbing oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga

saat ini masih dalam proses” (Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Arif Risman, 21 Februari 2023).

Keterangan tersebut menjelaskan pemerintah pusat sendiri sedang mencoba mengatasi semakin berkurangnya petani dengan cara melakukan regenerasi petani muda yang saat ini sedang berjalan. Harapan atas program tersebut adalah adanya peningkatan generasi muda yang mau terjun ke bidang pertanian, dengan membawa pertanian ke arah yang lebih modern dan dapat bersaing dengan wilayah lainnya.

Dengan demikian banyak harapan dari Pemerintah Desa, para petani, dan masyarakat untuk pertanian di Desa Karangharum yang mana tertuju kepada kemajuan pertanian di Desa Karangharum serta meningkatnya kesejahteraan petani. Maka disini pemerintah sebagai fasilitator yang menunjang arah kebijakan harus dapat menjadikan pertanian menjadi sektor yang mandiri serta modern sehingga membuat keluarga petani sejahtera dan generasi muda melihatnya sebagai profesi yang menarik yang bukan hanya dipandang sebagai dunia yang kotor, kumuh, miskin, dan komunitas yang terpinggirkan, serta dianggap tidak menjanjikan. Persepsi tersebut harus dapat pemerintah ubah agar dapat mengembalikan minat masyarakat terutama para generasi muda untuk terjun ke dalam bidang pertanian.

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kawasan Industri (Studi Kasus Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi)”, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan kesejahteraan petani Pemerintah Desa melakukan kolaborasi dengan pihak BUMDes dan Gapoktan yang dimana Pemerintah Desa merupakan aktor utama dalam kolaborasi tersebut, dikarenakan pemerintah desa adalah pembentuk, sekaligus pemberi kuasa untuk *stakeholders* tersebut. Kolaborasi yang terjadi menghasilkan peran-peran tersendiri dari setiap *stakeholder*, sehingga menciptakan program dari masing-masing pemangku kepentingan tersebut. Dimana Pemerintah Desa memiliki program PKTD (Padat Karya Tunai Desa), sedangkan BUMDes simpan pinjam, dan Gapoktan berupa bantuan bibit, pupuk, serta penyuluhan pertanian yang dibantu oleh PPL. *Collaborative governance* yang terjadi antara Pemerintah Desa dengan BUMDes dan Gapoktan ini dapat dilihat dengan lima proses kolaborasi yaitu melalui dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Dimana proses kolaborasi tersebut dinilai belum optimal dilakukan, karena masih adanya tumpang tindih kepentingan dan komunikasi yang tidak terarah. Walaupun sudah ada forum tatap muka rutin, seperti pertemuan formal MUSREMBANGDES dan non formal yaitu penyuluhan pertanian. Namun kepercayaan antar *stakeholder* yang terkait belum terjalin satu sama lain masing-masing aktor cenderung berpikir individualistis, sedangkan dalam komitmen para pihak memiliki tujuan yang sama yaitu memajukan pertanian tetapi proses kolaborasi yang dilakukan hanya menguntungkan satu pihak tidak untuk kepentingan publik. Dalam pemahaman bersama tidak berjalan semestinya karena masih adanya instansi yang terkait dalam melakukan program maupun kegiatannya tidak memperhatikan program dari instansi lain, seperti pada program BUMDes masih ada petani yang belum mengetahuinya. Dari proses kolaboratif tersebut mendapatkan hasil sementara bahwa peranan pemerintah

memang sudah sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Karangharum seperti adanya kerjasama dalam penanaman padi, pembagian bantuan yang sudah banyak dirasakan petani. Walaupun kenyataannya di lapangan masih belum berjalan dengan dengan maksimal.

2. Proses kolaboratif tersebut mendapatkan tiga aspek hambatan yang dirasakan oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani yaitu aspek program dari Pemerintah desa, aspek geografis, dan aspek SDM (Sumber Daya Manusia). Program Pemerintah Desa ini menjadi hambatan karena banyak program yang diwacanakan tidak dapat berjalan karena masalah biaya, sedangkan dari aspek geografis adanya bencana alam seperti banjir dan hama tanaman mengakibatkan banyaknya lahan persawahan petani banyak yang gagal panen, dan dalam aspek SDM ini menjadi hambatan karena rendahnya tingkat pendidikan petani sehingga kurang memahami hak yang didapatkan sehingga petani Desa Karangharum ini tidak dapat berdaya saing dengan petani yang lain, selain itu kurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani juga menjadi hambatan dalam aspek SDM ini yang mana mengakibatkan mulai berkurangnya jasa petani di Desa Karangharum.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, hendaknya dapat menjalankan program yang sudah dibuat dengan semaksimal mungkin serta lebih memperkuat kelembagaan kolaboratifnya. Agar harapan kesejahteraan petani serta kemajuan pertanian di Desa Karangharum dapat tercapai.
2. Bagi petani, saya berharap petani dapat lebih mengerti hak dan kewajiban yang didapatkan seorang petani, serta dapat menindak tegas ketidakadilan yang didapatkan sebagai seorang petani.
3. Bagi mahasiswa FISIP peneliti berharap bahwa ada di antara kalian yang mau terjun langsung ke dalam bidang pertanian, dimana pertanian saat ini membutuhkan tenaga para generasi milenial yang mampu membawa perubahan lebih baik dan maju, sehingga pertanian di Indonesia ini dapat lebih bersaing dengan negara-negara yang lain.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengetahui secara jelas bagaimana peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan industri sehingga

penelitian selanjutnya tersebut dapat berkembang lebih baik hingga nanti ada kebijakan yang dapat mengatasi pertanian yang berada di kawasan industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Selfian, Supriyo Imran, dan Yuriko Boekoesoe. (2020). Analisis Pendapatan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Jagung di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango. *AGRINESIA*, 5(1), 65-72. Retrieved Oktober 2, 2022
- Afriliyeni, M. S. (2021). Hubungan Reforma Agraria dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kasus: Lahan Eks HGU di Desa Pesawahan, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 05(02), 433-449. doi:10.29244
- AJ, B. (2002). Collaborative governance versus constitutional politics: Decision rules for sustainability from Australia's South East Queensland forest agreement. *Environmental Science and Policy*, 19-32.
- Alnoor, E. (2004). Institutional preconditions to collaboration: Indian forest and irrigation policy in historical perspective. *Administration & Society*, 208-242.
- Ariefana, Pebriansyah . (2021). *Sejarah Cikarang, Kini Jadi Kota Industri Terbesar se-Asia Tenggara*. Kabupaten Bekasi: suarabekaci.id. Retrieved Oktober 24, 2022, from <https://bekaci.suara.com/read/2021/09/27/161025/sejarah-cikarang-kini-jadi-kota-industri-terbesar-se-asia-tenggara>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. (2014). *Rencana Strategis Tahun 2010-2014*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. (2020). *Kabupaten Bekasi dalam Angka 2020*. Kabupaten Bekasi: BPS Kabupaten Bekasi.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. (2020). *Kecamatan Kedungwaringin dalam Angka 2020*. Kabupaten Bekasi: BPS Kabupaten Bekasi.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. (2021). *Kabupaten Bekasi dalam Angka 2021*. Kabupaten Bekasi: BPS Kabupaten Bekasi.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. (2021). *Kecamatan Kedungwaringin dalam Angka 2021*. Kabupaten Bekasi: BPS Kabupaten Bekasi.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. (2022). *Kabupaten Bekasi dalam Angka 2022*. Kabupaten Bekasi: Kabupaten Bekasi.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. (2022). *Kecamatan Kedungwaringin dalam Angka 2022*. Kabupaten Bekasi: BPS Kabupaten Bekasi.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. (2023). *Kabupaten Bekasi dalam Angka 2023*. Kabupaten Bekasi: BPS Kabupaten Bekasi.
- Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan. (2021). *Prakiraan Serangan OPT Utama Padi, Jagung, dan Kedelai di Indonesia MT 2021*. Karawang: Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
- Barbara, G. (1989). *Collaborating: Finding common ground for multi-party problems*. Francisco: CAJossey-Bass.
- Barbara, G. (1989). *Collaborating: Finding common ground for multi-party problems*. San Francisco: CAJossey-Bass.
- Barusman, M. Y. (2021). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Lampung Farmer Welfare Improving Program Lampung. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, 5(4), 1126-1136. doi:10.21776/ub.jepa.2021.005.04.15
- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN SETJEN DPR-RI. (2019). PERMASALAHAN DAN UPAYA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN.
- Budiandrian, Bayu, Fatima Azzahra, dan Arief Setyadi. (2022, Maret). Peran Organisasi Petani dalam Peningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Petani di Indonesia. *Jurnal Agrimanex*, 2(2), 123-134. Retrieved Oktober 3, 2022
- Cakti Indra Gunawan, K. S. (2020). *Sosial Ekonomi Pertanian Suatu Pengantar*. Malang: Unitri Press.
- Claire, R. (2001). Leadership in collaborative policy-making: An analysis of agency roles in regulatory negotiations. *Policy Science*, 221-245.
- Connick Sarah, J. I. (2003). Outcomes of collaborative water policy making: Applying complexity thinking to evaluation. *Journal of Environmental Planning and Management*, 46(2), 177-197. doi:https://doi.org/10.1080/0964056032000070987
- D., E. J. (2001). No success like failure: The Platte River collaborative watershed planning process. *William and Mary Environmental Law and Policy*, 559.
- Danim, Sudarwan. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Datau, Tity Iriani , Syarwani Canon, dan Amir Halid. (2019, July). Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Menurut Tipologi Masyarakat. *Jambura Agribusiness Journal*, 1(1), 26-35. Retrieved Oktober 2, 2022, from <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jaj>
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kampus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Retrieved Oktober 21, 2022

- Devi Arianti, L. S. (2018). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN KONSERVASI MANGROVE BAROS DI DESA TIRTOHARGO KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL. *E-Journal Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara*, 809-826.
- Edi Sugianto, M. M. (2019). Analisis Pengeluaran Rumah Tangga Petani Tidak Miskin dan Miskin (Studi Kasus di Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna). *Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian*, 4(1), 23-28. Retrieved Desember 2, 2022, from <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1035363&val=15682&title=Analisis%20Pengeluaran%20Rumah%20Tangga%20Petani%20Tidak%20Miskin%20dan%20Miskin%20Studi%20Kasus%20di%20Desa%20Raimuna%20Kecamatan%20Maligano%20Kabupaten%20Muna>
- F, W. J. (2006). More sustainable participation? Multi-stakeholder platforms for integrated catchment management. *Water Resource Development*, 15-35.
- Febrina, M. (2020). Analisis Tingkat Kebisingan di Area Produksi PT. ANTAM, TBK. UBPN SULTRA (Studi Kasus PT. Antam, TBK. UBPN SULTRA). *Departemen Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Hasanudin*.
- Fitrianti, Retno, Fatmawati, Sri Undai Nurbayani, Mirzalina Zaenal, Insany Fitri Nurqamar, dan Daniella Cynthia S. (2022). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Inovasi Produk Olahan Singkong di Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. *Jurnal Dinamika Pengabdian*, 7(2), 281-290. Retrieved Oktober 2, 2022, from <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jdp/index>
- Fung Archon, E. O. (2001). Deepening democracy: Innovations in empowered participatory governance. *Politics & Society*, 5-41.
- Fung Archon, E. O. (2001). Deepening democracy: Innovations in empowered participatory governance. *Politics & Society*, 5-41.
- Gary, B. (2001). Evaluation of a collaborative model: A case study of analysis of watershed planning in the Intermountain West. *Environmental Management*, 739-748.
- Gary, W. (1997). Participatory management, popular knowledge, and community empowerment: The case of sea urchin harvesting in the Vieux-Fort area of St. Lucia. *Human Ecology*, 29-46.
- Gash, C. A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration*, 18(4), 543-571. doi:<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Gerry, S. (1998). Governance as Theory: Five propositions. *International Social Science Journal*, 17-28.
- Gilliam Aisha, D. D. (2002). The Value of engaging stakeholders in planning and implementing evaluation. *AIDS Education and Prevention*, 5-17.

- Hardayani, Y. (2022). Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. *TRANSFORMASI: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 2(1), 1-7. Retrieved Desember 2, 2022, from <https://journal.ummat.ac.id/index.php/transformasi/article/view/8079>
- Hartoyo, Eko, dkk. (2010). *Modul Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) Tingkat Dasar*. Bogor: Tropenbos International Programme.
- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasbiansyah, O. (2008). Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. *9*(1), 166-167.
- Heikkila Tanya, G. A. (2005). The formation of large-scale collaborative resource management institutions: Clarifying the roles of stakeholders, science, and institutions. *Policy Studies Journal*, 283-612.
- Heli, S. (2000). Environmental impact assessment (EIA) as collaborative learning process. *Environmental Impact Assessment Review*, 681-700.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. (2014). *Perindustrian*. Bandung: Fokusmedia.
- Hutauruk, A. H. (2021). Filosofi Negara Kesejahteraan yang Dirumuskan dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. *SOLJUSTISIO: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(1), 287-303. Retrieved Desember 02, 2022, from <http://ojs.mputantular.ac.id/index.php/sj/article/view/513/403>
- I Gusti Ngurah Agung Sukrisna, I. K. (2018). Peran Pemerintah dan Modal Sosial terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 177-216.
- Iskandar, Muhammad Joni, Rini Endang Prasetyowati, dan Dwi Haryati Ningsih. (2022, Juni). Efisiensi Ekonomi Usahatani Padi Model Corporate Farming di Jawa Tengah. *Journal of Agribusiness Science and Rural Development*, 2(2), 15-22. Retrieved Oktober 2, 2022, from <https://jurnal.universitaspurabangsa.ac.id/index.php/jasrd>
- Jeanne, L. (1991). Interests and interdependence in the formation of social problem-solving collaborations. *Journal of Applied Behavioral Science*, 23-37.
- Jefta, Leibo . (1995). *Sosiologi Pedesaan (Mencari Suatu Strategi Pembangunan)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Jody, F. (1997). Collaborative governance in the administrative state. *UCLA Law Review*, 1.
- Jody, F. (1997). Collaborative Governance in The Administrative State. *UCLA Law Review*, 1.

- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2019, Desember 12). Retrieved from [https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4130#:~:text=Jakarta%20%2D%20Kementerian%20Pertanian%20\(Kementan\),Pembangunan%20Pertanian%20\(Kostra%20Tani\)](https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4130#:~:text=Jakarta%20%2D%20Kementerian%20Pertanian%20(Kementan),Pembangunan%20Pertanian%20(Kostra%20Tani)).
- klikdesaku.id. (2005, Desember 16). Retrieved from <https://klikdesaku.id/id/kelurahan/demografi/30761/32.16.12.2005/Karangharum>
- Kristriantono, Petrus dan Yuliawati. (2022, Juni). Dampak Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani dan Tenaga Kerja Sektor Pertanian. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 18(2), 141-158. Retrieved Oktober 2, 2022, from <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jsep>
- Lasker Roz D, W. E. (2003). Broadening participation in community problem-solving: A multidisciplinary model to support collaborative practice and research . *Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine*, 14-60.
- Linton, R. (1956). *The Study of Man, an Introduction*. New York: Appleton Century.
- Lynn Lawrence E, H. C. (2001). *Improving Governance: A new logic for empirical research, 2001 Washingt*. Washington: DCGeorgetown Univ. Press.
- Mary, E. (2000). Who are the stakeholders in environmental risk decisions? *Risk: Health, Safety & Environment*, 243-254.
- masterplandes.com. (2021, April 6). Retrieved from <https://www.masterplandes.com/artikel/upaya-mengatasi-dampak-kawasan-industri-di-pedesaan/>
- Matthew, S. (2001). Making hard choices: A collaborative governance model for the biodiversity context. *Washington University Law Quarterly*, 343.
- Michael, M. (2000). Problems with using collaborative to shape environmental public policy . *Valparaiso University Law Review*, 423.
- Mosher, A. T. (1987). *Menggerakkan dan Membangun Pertanian: Syarat-syarat Pokok Pembangunan dan Modernisasi*. Jakarta: CV Yasaguna.
- Mubyarto. (1991). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- Mukmin, H. (2014). *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*. Lampung: Pusat Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Raden Intan Lampung. Retrieved Oktober 21, 2022
- Murdock Barbara, W. C. (2005). Stakeholder participation in voluntary environmental agreements: Analysis of 10 Project XL case studies. *Science, Technology & Human Values*, 223-250.

- Natawidjaja, R. S. (2007). Pengembangan Komoditas Bernilai Tinggi (High Value Commodity) Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani. *Pusat Penelitian Kebijakan Pertanian dan Agribisnis*, 17-28.
- Neil, B. (1998). Prospects for associative governance: Lessons from Ontario . *Canada: Politics & Society*, 539-573.
- Nurfadillah, A. (2022). Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa dalam Prespektif Fiqh Siyasah. *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- P, O. (1993). Improving citizen participation in environmental decisionmaking: The use of transformative mediator techniques. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 103-117.
- Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Kayubih Tahun Anggaran 2022. (2022, April 12). *Pertanian*.
- Palupi, Retno, Andi Warnaen, dan Ach. Syamsuddin. (2022, Juni). Strategi Balai Penyuluhan Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani pada Era Kostratani di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. *Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik*, 12(1), 34-44. Retrieved Oktober 2, 2022, from <http://stisipm-sinjai.ac.id/stisippublishing/index.php/JAQ>
- Pratama, M. S. (2022, Maret). Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Usaha Desa Melalui PT. Mitra Desa Pamarican sebagai Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas" Fisip Unpas*, IV(1), 42-53. Retrieved Oktober 1, 2022
- Pujiharto. (2010). Kajian Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai Kelembagaan Pembangunan Pertanian di Pedesaan. *Jurnal AGRITECH*, Vol. XXI(No.1), 70.
- Purhantara, Wahyu. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Putu Karismawan, W. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Program Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi Kasus di BUMDES Suka Maju Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Ganec Swara*, 1242-1249.
- R. Rindu Garvera, F. S. (2021). Collaborative Governance dalam Mewujudkan Desa Mandiri. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 502-513.
- Robert, F. (2003). Technical adversarialism and participatory in the U.S. chemical weapons disposal program. *Science, Technology, & Human Values*, 451-482.
- Rodjak, Abdul. (2012). *Pengantar Ilmu Tani*. Jatinangor: Graha Ilmu.

- Santoso, A.B. (2007, Januari). Peluang Kerja Non-Farm di Perdesaan (Kajian teoritis Strategi Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan). *Jurnal Geografi*, 4(1), 25-34. Retrieved Oktober 3, 2022, from <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JG/article/view/109/111>
- Sarwono, S. W. (2015). *Teori- Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiyono, B. (2014). *Pemerintah dan Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: CAPS.
- Slamet, M. (1985). *Mahasiswa dan Pembangunan: Peranan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata dalam Pembangunan Pedesaan dan Perubahan Sosial*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sodiq, A. (2015). Konsep Kesejahteraan dalam Islam. *EQUILIBRIUM*, 3(2), 380-405. Retrieved from <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
- Soekartawi. (1995). *Ilmu Usahatani dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil*. Jakarta: UI-Press.
- Subagyo, P. J. (2006). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyowati, S. S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suratha, I. K. (2015). KRISIS PETANI BERDAMPAK PADA KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA. *Media Komunikasi Geografi*, 16(1), 67-80.
- Suryaningsih, I. (2021). Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Padi di Desa Lauwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. *SKRIPSI*, 60-61.
- Susan, S. (1998). Collaborative approaches to Pacific Northwest fisheries management: The salmon experience. *Willamette Journal of International Law and Dispute Resolution*, 6, 29. Retrieved from <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/wildisres6&div=6&id=&page=>
- Susskind Lawrence, C. J. (1987). *Breaking the impasse: Consensual approaches to resolving public disputers*. New York: Basic Book.
- Sutrisma, F. Z. (2022, April). Analisis Pendapatan, Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan Petani Pada Sawah di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *Jurnal Economica*, X(1), 76-90. Retrieved Desember 2, 2022, from <https://repository.uir.ac.id/17488/1/19.%20Jurnal%20Economica%20Analisis%20Pendapatan%2C%20Pengeluaran%20Rumah%20Tangga%20dan%20Tingkat%20Kesej>

ahteraan%20Petani%20Padi%20Sawah%20Di%20Kecamatan%20SIak%20Kecil%20April%202022_0.pdf

- Suwarni, E. (2006). Perubahan Stuktur Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 19-29. Retrieved Oktober 3, 2022
- Syafira, Rizqalya Rachmatu dan Dewi Rahmi. (2022). Peran Kelompok Tani dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(2), 282-290. doi:10.29313/bces.v2i2.3286
- Syahrani. (2019). *Pengantar Ilmu Pertanian*.
- Thom, R. (1998). Communities in conflict: Resolving differences through collaborative efforts in environmental planning and human service delivery. *Journal of Sociology and Welfare*, 25, 115-42. Retrieved from <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jrllsasw25&div=36&id=&page=>
- Till John E, M. K. (2001). Public involvement in science and decision Making. *Health Physics*, 370-378.
- Vangen Siv, H. C. (2003). Enacting leadership for collaborative advantage: Dilemmas of ideology and pragmatism in the activities of partnership managers. *British Journal of Management*, 561-576.
- Walter Uta, P. C. (2000). A template for family centered interagency collaborative. *Families in Society: The Journal of Contemporary Human Services*, 494-503.
- Wasistiono, S. (2001). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Bandung: Alqa Print.
- Weech-Maldonado Robert, M. S. (2000). Building partnerships with the community: Lessons form the Camden Health Improvement Learning Collaborative. *Journal of Healthcare Management*, 189-205.
- Yaffee Steven L, W. J. (2003). Collaborative ecosystem planning processes in the United States: Evolution and challenges. *Environments*, 59-72.
- Yulianti, E. (2017). Respons Pemerintah Kabupaten Bekasi Terhadap Perselisihan Hubungan Industrial Atas Pelanggaran Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No.SE 07/Men/1990 Oleh Pengusaha Tahun 2015-2016 (Studi atas PT Chao Long Motor Part Indonesia). *FISIP UIN Jakarta*.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI

(Studi Kasus Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin
Kabupaten Bekasi)

- | |
|-----------------------|
| a) Identitas Informan |
| a) Nama : |
| b) Umur : |
| c) Pekerjaan : |
| b) Daftar pertanyaan |

Informan I: Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi

- 1) Sebagai salah satu bagian dari dinas pertanian Kabupaten Bekasi, melihat tingkat kesejahteraan petani di Kabupaten Bekasi sendiri, bagaimana?
- 2) Apakah ada indikator tersendiri untuk mengategorikan tingkat kesejahteraan petani?
- 3) Berapa hasil panen di Desa Karangharum?
- 4) Berapa luas lahan persawahan di Desa Karangharum?
- 5) Berapa jumlah petani di Desa Karangharum?
- 6) Bantuan apa yang diberikan dinas pertanian untuk pertanian di Kabupaten Bekasi salah satunya di Desa Karangharum?
- 7) Apakah ada data yang menunjukkan bahwa Kabupaten Bekasi itu dahulu merupakan salah satu lumbung padi nasional?
- 8) Apakah ada kategori penzonaan yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak boleh didirikan PT (Perseroan Terbatas)? Apakah Desa Karangharum termasuk dalam kategori hijau?

- 9) Apakah ada program khusus yang benar-benar untuk pertanian di kawasan industri mengingat banyak fungsi peralihan lahan persawahan yang menjadi industri dan perumahan guna membatasi pendirian PT-PT dan perumahan tersebut?
- 10) Hambatan yang diperoleh dari dinas pertanian selama menjalankan program terkait pertanian?
- 11) Apa solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

Infotman II: BPP Kecamatan Kedungwaringin

- 1) Bagaimana kesejahteraan petani di Desa Karangharum?
- 2) Program apa yang saat ini sedang dijalankan oleh BPP (Balai Penyuluh Pertanian) Kecamatan Kedungwaringin?
- 3) Hambatan apa yang dirasakan saat menjalankan program tersebut?
- 4) Solusi apa yang dilakukan untuk menghadapi masalah tersebut?

Informan: Kepala Desa Karangharum

- 1) Bagaimana kondisi terkait kesejahteraan petani di Desa Karangharum menurut pandangan Bapak sebagai Kepala Desa?
- 2) Lalu adakah indikator dari pemerintah desa untuk mengetahui atau mengkategorikan tingkat kesejahteraan petani di Desa Karangharum?
- 3) Program apa saja yang pemerintah desa lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani?
- 4) Bagaimana peranan pemerintah desa terkait program meningkatkan kesejahteraan petani tersebut?
- 5) Berapa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dalam program meningkatkan kesejahteraan petani?
- 6) Bagaimana bentuk keterlibatan pemerintah desa terhadap penyelenggaraan program peningkatan kesejahteraan petani?

- 7) Dalam meningkatkan kesejahteraan petani ini, pemerintah desa mempunyai aturan khusus untuk mengatur program terkait kesejahteraan petani tersebut?
- 8) Dalam menjalankan peranan untuk meningkatkan kesejahteraan petani pemerintah desa berkolaborasi atau bekerja sama dengan pihak mana saja?
- 9) Adakah badan khusus atau organisasi tertentu yang pemerintah desa bentuk dalam meningkatkan kesejahteraan petani?
- 10) Berapa kali pertemuan atau musyawarah yang dilakukan pemerintah desa dengan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan kesejahteraan petani?
- 11) Bagaimana proses koordinasi pemerintah desa dengan para pihak yang terlibat dalam meningkatkan kesejahteraan petani?
- 12) Bagaimana pemerintah desa menyalurkan informasi terkait program peranan kesejahteraan petani?
- 13) Adakah pelatihan yang diberikan pemerintah desa kepada petani di Desa Karangharum? Apa saja?
- 14) Adakah Fasilitas yang diberikan pemerintah desa dalam menunjang peningkatan pertanian di Desa Karangharum?
- 15) Menurut Bapak apa pentingnya pemerintah Desa Karangharum meningkatkan kesejahteraan petani?
- 16) Apakah program kesejahteraan petani yang diberikan sejauh ini menghasilkan dampak terhadap kesejahteraan petani di Desa Karangharum? Apa saja?
- 17) Program kesejahteraan apa yang paling memiliki pengaruh besar dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani di Desa Karangharum?
- 18) Bagaimana respon dan antusiasme petani ataupun terhadap program kesejahteraan petani yang ada?
- 19) Apa saja hambatan yang dirasakan oleh pemerintah Desa Karangharum dalam meningkatkan kesejahteraan petani?
- 20) Bagaimana solusi pemerintah desa Karangharum dalam mengatasi hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan petani?
- 21) Apa harapan dari pemerintah desa untuk pertanian di Desa Karangharum?

Informan: BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

- 1) Apa tujuan awal dibentuknya BUMDes?
- 2) Bagaimana struktur organisasi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan petani?
- 3) Apa tupoksi dari masing-masing struktur organisasi ini?
- 4) Peranan apa saja yang BUMDes lakukan dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Karangharum?
- 5) Apa yang melatarbelakangi BUMDes membuat program untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Karangharum?
- 6) Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan meningkatkan kesejahteraan petani? Bagaimana solusinya?
- 7) Dari mana sumber anggaran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan petani ini?
- 8) Bagaimana peranan BUMDes untuk menumbuhkan kesadaran dan kemandirian petani di desa Karangharum?
- 9) Berapa kali pertemuan atau musyawarah yang dilakukan BUMDes dengan pemerintah desa terkait program peningkatkan kesejahteraan petani ini?
- 10) Sejauh mana peran BUMDes dalam melakukan kegiatan peningkatkan kesejahteraan bagi para petani di Desa Karangharum? seberapa besar dampak yang dihasilkan dari adanya BUMDes terhadap kondisi sosial ekonomi petani?
- 11) Peranan seperti apa yang dirasa paling penting dan relevan dengan kondisi petani di Desa Karangharum saat ini? Apa alasannya?
- 12) Apakah BUMDes ikut berperan dalam proses pemasaran hasil pertanian dari para petani di desa Karangharum?
- 13) Bagaimanaa respon dari petani terhadap peranan yang dilakukan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Karangharum?

- 14) Perubahan apa yang ingin dicapai oleh BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan petani di Desa Karangharum?
- 15) Sejauh mana perubahan itu sudah mulai terwujud dari awal terbentuknya BUMDes sampai dengan saat ini?

Informan: Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani)

- 1) Apa tujuan awal dibentuknya Gapoktan?
- 2) Bagaimana struktur organisasi Gapoktan dalam meningkatkan kesejahteraan petani?
- 3) Apa tupoksi dari masing-masing struktur organisasi ini?
- 4) Peranan apa saja yang Gapoktan berikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Karangharum?
- 5) Apakah ada bantuan misalnya seperti anggaran atau barang dari pemerintah untuk pertanian yang diberikan kepada Gapoktan?
- 6) Bagaimana pelaksanaan bantuan yang diberikan oleh pemerintah maupun dinas pertanian yang dilakukan dan diawasi pemerintah desa kepada Gapoktan?
- 7) Bagaimana Gapoktan mendapatkan informasi dari pemerintah desa Karangharum terkait pertanian?
- 8) Menurut bapak sebagai ketua Gapoktan bagaimana dukungan pemerintah desa Karangharum dalam meningkatkan kesejahteraan petani?
- 9) Apa saja hambatan yang dihadapi Gapoktan dalam pelaksanaan kegiatan meningkatkan kesejahteraan petani? Solusinya apa?
- 10) Bagaimana peranan Gapoktan untuk menumbuhkan kesadaran dan kemandirian petani di desa Karangharum?
- 11) Adakah pelatihan yang diberikan oleh Gapoktan bagi para petani di Desa Karangharum?
- 12) Adakah pertemuan atau musyawarah yang dilakukan pemerintah desa dengan Gapoktan di Desa Karangharum ? atau adakah pertemuan yang dilakukan pihak Gapoktan dengan petani di Desa Karangharum?

- 13) Sejah mana peran Gapoktan dalam melakukan kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat desa Karangharum? seberapa besar dampak yang dihasilkan dari adanya Gapoktan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat?
- 14) Perubahan apa yang saat ini ingin dicapai oleh Gapoktan bagi peningkatan kesejahteraan petani di Desa Karangharum?
- 15) Sejah mana perubahan itu sudah mulai terwujud dari awal terbentuknya Gapoktan sampai dengan sekarang ini?

Informan: Petani


- 1) Apakah saudara memiliki lahan *garapan*? Kalau iya, berapa luas lahan persawahan saudara?
- 2) Berapa penghasilan yang saudara hasilkan dalam satu kali tanam padi?
- 3) Bagaimana kesejahteraan petani di Desa Karangharum?
- 4) Bagaimana tanggapan petani terkait peranan dari pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani?
- 5) Bagaimana dampak yang petani rasakan terhadap peranan pemerintah desa tersebut?
- 6) Adakah sosialisasi yang diberikan pemerintah desa kepada bapak/ibu terkait program peningkatan kesejahteraan petani ini?
- 7) Bagaimana dampak yang bapak/ibu rasakan mengenai program kesejahteraan petani yang diberikan oleh BUMDes?
- 8) Apakah anda bergabung dengan kelompok tani Desa Karangharum? Kalau iya, sudah berapa lama bergabung?
- 9) Apa alasan saudara menjadi anggota kelompok tani ini?
- 10) Apa manfaat yang saudara rasakan sebagai anggota kelompok tani di Desa Karangharum?
- 11) Apakah kehadiran kelompok tani berpengaruh terhadap produktivitas hasil pertanian saudara?

- 12) Apakah kehadiran kelompok tani juga berpengaruh terhadap akses pemasaran hasil pertanian?
- 13) Bagaimana pandangan saudara terhadap kegiatan atau program yang sudah dijalankan oleh kelompok tani?
- 14) Bagaimana dampak dari program pemberdayaan tersebut terhadap tingkat ekonomi saudara?
- 15) Apa kendala yang anda hadapi sebagai anggota kelompok tani ini?

Informan: Masyarakat



- 1) Bagaimana pandangan saudara terhadap kesejahteraan petani di Desa Karangharum?
- 2) Apakah adanya kelompok tani penting bagi para petani di Desa Karangharum? mengapa?
- 3) Bagaimana pandangan saudara terhadap kegiatan atau peranan yang sudah dijalankan oleh pemerintah desa Karangharum dalam meningkatkan kesejahteraan petani?
- 4) Bagaimana pandangan saudara mengenai program yang dijalankan oleh BUMDes Karangharum?
- 5) Bagaimana pandangan saudara mengenai program yang dijalankan kelompok tani Desa Karangharum?
- 6) Apa harapan saudara terhadap pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Karangharum?
- 7) Apakah tertarik menjadi petani di Desa Karangharum?

Lampiran 2

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngalyan Semarang Kode Pos 50185 Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id	
Nomor	: 3127/Un.10.6/K/KM.05.01/12/2022	27 Desember 2022
Lamp	: -	
Hal	: Permohonan Ijin Penelitian	
<p>Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi Di tempat</p> <p><i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p> <p>Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan <i>Penulisan Skripsi</i> Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi)" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.</p> <p>Nama : Shelly Salamah NIM : 1906016032 Semester : VII (tujuh) Jurusan : Ilmu Politik Tempat/ Tgl lahir : Bekasi, 21 Maret 2001 CP/e-mail : 089699888727/shellysalamah2001@gmail.com Nama Ayah/ Ibu : U. Saepulloh/Ipah Masripah Pekerjaan : Pedagang Alamat : Kp. Rawa Kuda, RT006/RW003, Desa Karangharum.</p> <p>Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p> <p><i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p> <p style="text-align: right;"> Dekan Kisub'bag Akademik <i>A. Gunawan, S.Ag, M.H</i></p> <p>Tembusan : Dekan FISIP UIN Walisongo</p>		



Surat Pengantar Penelitian untuk Kesbangpol Kabupaten Bekasi

Lampiran 3

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185 Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id	
Nomor	: 3127/Un.10.6/K/KM.05.01/12/2022	27 Desember 2022
Lamp	: -	
Hal	: Permohonan Ijin Penelitian	
Yth. Kepala Desa Karangharum Di tempat		
<i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i>		
Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan <i>Penulisan Skripsi</i> Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi)" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.		
Nama	: Shelly Salamah	
NIM	: 1906016032	
Semester	: VII (tujuh)	
Jurusan	: Ilmu Politik	
Tempat/ Tgl lahir	: Bekasi, 21 Maret 2001	
CP/e-mail	: 089699888727/shellysalamah2001@gmail.com	
Nama Ayah/ Ibu	: U. Saepulloh/Ipah Masripah	
Pekerjaan	: Pedagang	
Alamat	: Kp. Rawa Kuda, RT006/RW003, Desa Karangharum.	
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.		
<i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i>		
		 A. Gunawan, S.Ag, M.H Dekan Kasubag Akademik
Tembusan : Dekan FISIP UIN Walisongo		



Surat Pengantar Penelitian untuk Kepala Desa Karangharum

Lampiran 4

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185 Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id	
Nomor	: 3127/Un.10.6/K/KM.05.01/12/2022	27 Desember 2022
Lamp	: -	
Hal	: Permohonan Ijin Penelitian	
<p>Yth. Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karangharum Di tempat</p> <p><i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p> <p>Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan <i>Penulisan Skripsi</i> Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi)" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.</p> <p>Nama : Shelly Salamah NIM : 1906016032 Semester : VII (tujuh) Jurusan : Ilmu Politik Tempat/ Tgl lahir : Bekasi, 21 Maret 2001 CP/e-mail : 089699888727/shellysalamah2001@gmail.com Nama Ayah/ Ibu : U. Saepulloh/Ipah Masripah Pekerjaan : Pedagang Alamat : Kp. Rawa Kuda, RT006/RW003, Desa Karangharum.</p> <p>Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p> <p><i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p> <p style="text-align: right;"> Dekan Kasubag Akademik <i>[Signature]</i> A. Gunawan, S.Ag, M.H</p> <p>Tembusan : Dekan FISIP UIN Walisongo</p>		





Surat Pengantar Penelitian untuk BUMDes Karangharum

Lampiran 5

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185 Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id	
Nomor	: 3127/Un.10.6/K/KM.05.01/12/2022	27 Desember 2022
Lamp	: -	
Hal	: Permohonan Ijin Penelitian	
<p>Yth. Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Karangharum Di tempat</p> <p><i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p> <p>Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan <i>Penulisan Skripsi</i> Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi)" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.</p> <p>Nama : Shelly Salamah NIM : 1906016032 Semester : VII (tujuh) Jurusan : Ilmu Politik Tempat/ Tgl lahir : Bekasi, 21 Maret 2001 CP/e-mail : 089699888727/shellysalamah2001@gmail.com Nama Ayah/ Ibu : U. Saepulloh/Ipah Masripah Pekerjaan : Pedagang Alamat : Kp. Rawa Kuda, RT006/RW003, Desa Karangharum.</p> <p>Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p> <p><i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p> <p style="text-align: right;"> Dekan Kasubag Akademik <i>[Signature]</i> A. Gunawan, S.Ag, M.H</p> <p>Tembusan : Dekan FISIP UIN Walisongo</p>		

Surat Pengantar Penelitian untuk Ketua Gapoktan Desa Karangharum

Lampiran 6

	PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Instagram: kesbangpolkabbekasi Email: badankesbangpol.kab.bekasi@gmail.com B E K A S I	
Bekasi, 24 Januari 2023		
Nomor : HM.04.04/073/Bakesbangpol/2022	Yth. 1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi	
Sifat : Biasa	2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	
Lampiran : -	Desa Kabupaten Bekasi	
Perihal : <u>Surat Keterangan Penelitian</u>	3. Kepala Desa Karangharum Kabupaten Bekasi	
	di-	
	<u>B E K A S I</u>	
<p>Menindaklanjuti surat dari Kasubbag Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Nomor Surat: 3127/Un.10.6/K/KM.05.01/12/2022, tanggal 27 Desember 2022, Perihal: Permohonan Izin Penelitian, berkenaan hal tersebut di atas dengan ini menerangkan bahwa :</p>		
N a m a	: SHELLY SALAMAH	
Tempat/Tgl Lahir	: Bekasi, 21-03-2001	
NIM	: 1906016032	
Jenjang/ Program Studi	: Strata Satu (S.1) / Ilmu Politik	
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	
Perguruan Tinggi / Universitas	: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	
Pekerjaan	: Mahasiswa	
Alamat Rumah	: Kp. Rawakuda RT/RW. 006/003 Kel/Desa Karangharum Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi	
No. Telp/ HP / Email	: 0896-9988-8727/ shellysalamah2001@gmail.com	
<p>Bermaksud akan mengadakan Penelitian, Pengumpulan Data dan Wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul: "PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI KAWASAN INDUSTRI (STUDI KASUS DESA KARANGHARUM KECAMATAN KEDUNG WARINGIN KABUPATEN BEKASI)" yang akan dilaksanakan di lingkungan dan wilayah kerja Bapak/Ibu pimpin, adapun waktu pelaksanaan mulai tanggal 24 Januari s/d 28 April 2023, apabila berkenan mohon kiranya kepada yang bersangkutan diberikan kemudahan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p>		
<ol style="list-style-type: none">1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan sepanjang tempat penelitian memberikan izin;2. Melaporkan kedatangan kepada Instansi dimaksud dengan menunjukkan surat ini;3. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan akademik;4. Apabila di atas tanggal 28 April 2023 kegiatan penelitian belum selesai, agar menyampaikan permohonan perpanjangan oleh instansi pemohon ditujukan kepada Pj. Bupati Bekasi cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi;5. Setelah selesai melaksanakan kegiatan penelitian wajib melaporkan hasilnya kepada Pj. Bupati Bekasi Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi;6. Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas.		
Demikian agar maklum terima kasih.		
<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;"> Ditandatangani secara elektronik oleh : a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BEKASI SEKRETARIS BADAN TITOT SUHERYANTO, S.Sos, M.Si. Pembina Tingkat I / Pvh NIP.19651205 199203 1 005</td></tr></table>		 Ditandatangani secara elektronik oleh : a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BEKASI SEKRETARIS BADAN TITOT SUHERYANTO, S.Sos, M.Si. Pembina Tingkat I / Pvh NIP.19651205 199203 1 005
 Ditandatangani secara elektronik oleh : a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BEKASI SEKRETARIS BADAN TITOT SUHERYANTO, S.Sos, M.Si. Pembina Tingkat I / Pvh NIP.19651205 199203 1 005		
<p>Tembusan : disampaikan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Yth. Pj. Bupati Bekasi (sebagai laporan);2. Yth. Dekan FISIP Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.		
<p><i>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsE) Badan Siber dan Sandi Negara</i></p>		

Surat Izin Permohonan Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi

Lampiran 7



Denah Desa Karangharum

**PAPAN MONOGRAFI DESA KARANGHARUM
KECAMATAN KEDUNGWARINGIN - KABUPATEN BEKASI
KEADAAN PADA BULAN
TAHUN 20**

1. DATA DASAR	2. DATA PENDUDUK	3. DATA PENDUDUK BERKUALITAS	4. DATA PENDUDUK BERPENDAHULUAN
1.1. Luas Wilayah	1.2. Jumlah Penduduk	1.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan	1.4. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi
1.2.1. Luas Wilayah	1.2.1.1. Jumlah Penduduk	1.2.1.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan	1.2.1.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi
1.2.2. Jumlah Penduduk	1.2.2.1. Jumlah Penduduk Berpendidikan	1.2.2.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi	1.2.2.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Rendah
1.2.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan	1.2.3.1. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi	1.2.3.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan Rendah	1.2.3.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah
1.2.4. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi	1.2.4.1. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi	1.2.4.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan Rendah	1.2.4.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah
1.2.5. Jumlah Penduduk Berpendidikan Rendah	1.2.5.1. Jumlah Penduduk Berpendidikan Rendah	1.2.5.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi	1.2.5.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah
1.2.6. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah	1.2.6.1. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah	1.2.6.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan Rendah	1.2.6.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi
1.2.7. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.7.1. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.7.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi	1.2.7.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah
1.2.8. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.8.1. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.8.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi	1.2.8.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah
1.2.9. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.9.1. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.9.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi	1.2.9.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah
1.2.10. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.10.1. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.10.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi	1.2.10.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah
1.2.11. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.11.1. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.11.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi	1.2.11.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah
1.2.12. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.12.1. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.12.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi	1.2.12.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah
1.2.13. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.13.1. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.13.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi	1.2.13.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah
1.2.14. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.14.1. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.14.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi	1.2.14.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah
1.2.15. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.15.1. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.15.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi	1.2.15.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah
1.2.16. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.16.1. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.16.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi	1.2.16.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah
1.2.17. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.17.1. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.17.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi	1.2.17.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah
1.2.18. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.18.1. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.18.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi	1.2.18.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah
1.2.19. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.19.1. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.19.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi	1.2.19.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah
1.2.20. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.20.1. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.20.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi	1.2.20.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah
1.2.21. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.21.1. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.21.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi	1.2.21.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah
1.2.22. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.22.1. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.22.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi	1.2.22.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah
1.2.23. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.23.1. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.23.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi	1.2.23.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah
1.2.24. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.24.1. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.24.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi	1.2.24.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah
1.2.25. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.25.1. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.25.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi	1.2.25.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah
1.2.26. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.26.1. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.26.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi	1.2.26.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah
1.2.27. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.27.1. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.27.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi	1.2.27.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah
1.2.28. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.28.1. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.28.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi	1.2.28.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah
1.2.29. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.29.1. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.29.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi	1.2.29.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah
1.2.30. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.30.1. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah Rendah	1.2.30.2. Jumlah Penduduk Berpendidikan Tinggi	1.2.30.3. Jumlah Penduduk Berpendidikan Menengah

M. Rimansyah, A.md

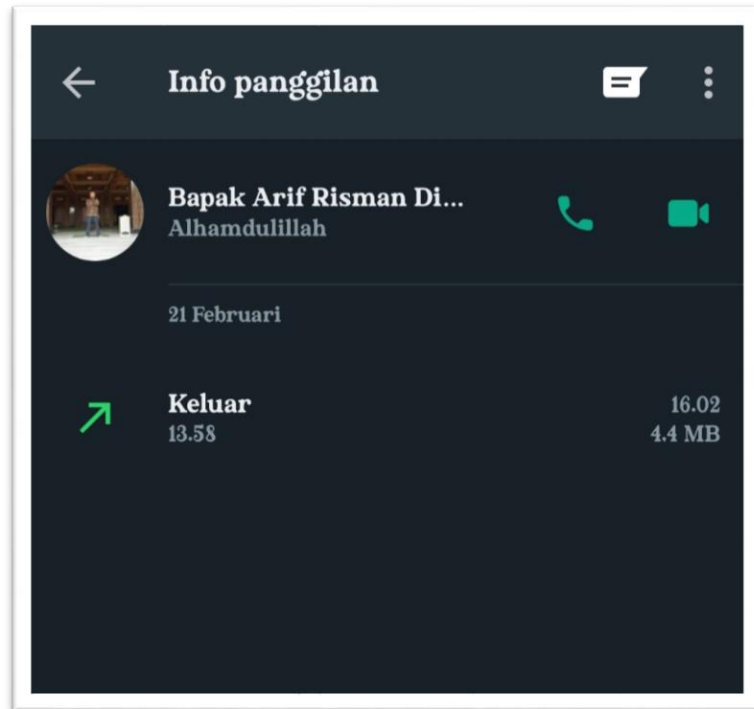
Papan Monografi Desa Karangharum

Lampiran 8



Potret Persawahan di Desa Karangharum

Lampiran 9



Dokumentasi Wawancara melalui *Whatsapp* dengan Pihak Dinas Pertanian
Kabupaten Bekasi Bapak Arif Risman tanggal 21 Februari 2023

Lampiran 10



Bersama Kepala Desa Karangharum H. M. Rimansyah, A.Md



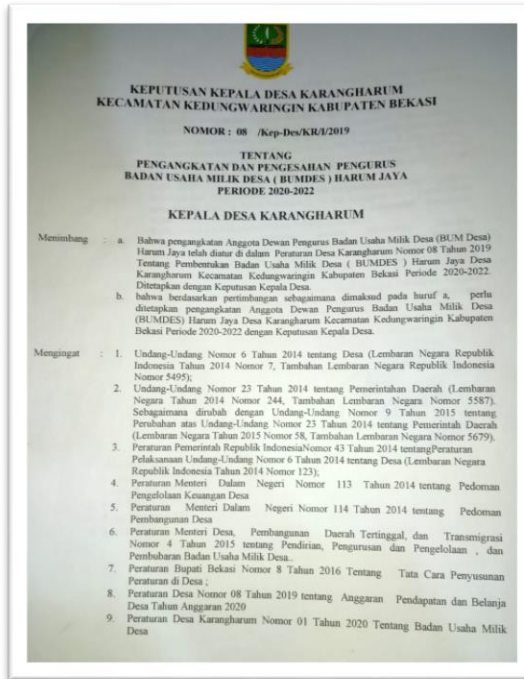
Bersama Sekretaris Desa Karangharum Bapak Nasan

Lampiran 11



Bersama Bendahara BUMDes Karangharum Ibu Ipah Masripah

Lampiran 12



Dokumen BUMDes Karangharum

Lampiran 13

**RENCANA ANGGARAN BELANJA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes HARUM JAYA)
DS. KARANGHARUM KEC. KEDUNGWARINGIN KAB. BEKASI
TAHUN 2020**

No	URAIAN	Volume	Harga Satuan	Jumlah Total
	a	b	d	e = bxd
A	Belanja Operasional			14,000,000
1	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1 Pake x 1 Keg	1,600,000	1,600,000
2	Belanja Peralatan Rumah Tangga/Belanja Barang Konsumsi	1 Pake x 1 Keg	1,000,000	1,000,000
3	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1 Pake x 1 Keg	1,000,000	1,000,000
4	Belanja Transpot Perjalanan Dinas	2 Org x 8 Keg	100,000	1,600,000
5	Belanja Honorarium Ketua	1 Org x 8 Keg	500,000	4,000,000
6	Belanja Honorarium Bendahara	1 Org x 8 Keg	300,000	2,400,000
7	Belanja Honorarium Sekretaris	1 Org x 8 Keg	300,000	2,400,000
B	Unit Usaha Simpan Pinjam			36,000,000
1	Pinjaman Perorangan	1 Thn x 1 Keg	18,000,000	18,000,000
1	Pinjaman Modal Usaha	1 Thn x 1 Keg	18,000,000	18,000,000
Total				50,000,000

Karangharum,
Direktur

KARNA WIJAYA

Bendahara

IPAH MASRIPAH

Dokumen Anggaran BUMDes Karangharum

Tabel Anggaran Bulanan/Tahun BUMDes Harum Jaya

Program	3 Minggu			12 Minggu			18 Minggu			20 Minggu			4 Bulan			6 Bulan			8 Bulan			JASA	KORPORASI	
	Pokok	Jasa	Jumlah	Pokok	Jasa	Jumlah	Pokok	Jasa	Jumlah	Pokok	Jasa	Jumlah	Pokok	Jasa	Jumlah	Pokok	Jasa	Jumlah	Pokok	Jasa	Jumlah			
1.000.000	120.000	10.000	130.000	81.333	8.333	89.667	81.333	8.333	89.667	81.333	8.333	89.667	81.333	8.333	89.667	81.333	8.333	89.667	81.333	8.333	89.667	81.333	8.333	89.667
2.000.000	200.000	20.000	220.000	146.667	14.667	161.334	146.667	14.667	161.334	146.667	14.667	161.334	146.667	14.667	161.334	146.667	14.667	161.334	146.667	14.667	161.334	146.667	14.667	161.334
3.000.000	300.000	30.000	330.000	213.333	21.333	234.667	213.333	21.333	234.667	213.333	21.333	234.667	213.333	21.333	234.667	213.333	21.333	234.667	213.333	21.333	234.667	213.333	21.333	234.667
4.000.000	400.000	40.000	440.000	280.000	28.000	308.000	280.000	28.000	308.000	280.000	28.000	308.000	280.000	28.000	308.000	280.000	28.000	308.000	280.000	28.000	308.000	280.000	28.000	308.000
5.000.000	500.000	50.000	550.000	346.667	34.667	381.334	346.667	34.667	381.334	346.667	34.667	381.334	346.667	34.667	381.334	346.667	34.667	381.334	346.667	34.667	381.334	346.667	34.667	381.334
6.000.000	600.000	60.000	660.000	413.333	41.333	454.667	413.333	41.333	454.667	413.333	41.333	454.667	413.333	41.333	454.667	413.333	41.333	454.667	413.333	41.333	454.667	413.333	41.333	454.667
7.000.000	700.000	70.000	770.000	480.000	48.000	528.000	480.000	48.000	528.000	480.000	48.000	528.000	480.000	48.000	528.000	480.000	48.000	528.000	480.000	48.000	528.000	480.000	48.000	528.000
8.000.000	800.000	80.000	880.000	546.667	54.667	601.334	546.667	54.667	601.334	546.667	54.667	601.334	546.667	54.667	601.334	546.667	54.667	601.334	546.667	54.667	601.334	546.667	54.667	601.334
9.000.000	900.000	90.000	990.000	613.333	61.333	674.667	613.333	61.333	674.667	613.333	61.333	674.667	613.333	61.333	674.667	613.333	61.333	674.667	613.333	61.333	674.667	613.333	61.333	674.667
10.000.000	1.000.000	100.000	1.100.000	680.000	68.000	748.000	680.000	68.000	748.000	680.000	68.000	748.000	680.000	68.000	748.000	680.000	68.000	748.000	680.000	68.000	748.000	680.000	68.000	748.000

SYARATAN PINJAMAN MODAL USAHA :

- Matrik 6.000 (1 Buah)
- Mengisi Formulir
- Fotocopy KTP suami/istri/Orang Tua
- Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
- Foto Jense Usaha dengan yg bersangkutan

SYARATAN PINJAMAN :

- Matrik 6.000 (1 Buah)
- Mengisi Formulir
- Fotocopy KTP suami/istri/Orang Tua
- Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
- Fotocopy Slip Gaji 3 bulan terakhir (untuk karyawan perusahaan)
- Fotocopy SK Jabatan/Kontrak Perusahaan
- Buku Rekening Tabungan/ATM (untuk jaminan)

Dokumen Simpan Pinjam BUMDes Karangharum

Lampiran 14



Bersama Ketua Gapoktan Desa Karangharum Bapak Ucep Somantri dan PPL Kedungwaringin Ibu Karolina

Lampiran 15





Dokumentasi Wawancara Bersama Para Petani dan Masyarakat Desa Karangharum

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Shelly Salamah
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Bekasi, 21 Maret 2001
Agama : Islam
Alamat : Kp. Rawa Kuda
No Telp : 089699888727
Email : shellysalamah2001@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

TK Nurul Iman 2006-2007
SDN Karangharum 01 2007-2013
SMP Karya Bhakti 2013-2016
SMAN 2 Cikarang Utara - MIPA 2016-2019
SI UIN Walisongo Semarang -
Ilmu Politik 2019-2023

C. Pengalaman Organisasi

- Kordiv Artistik LPM Reference UIN Walisongo 2019-2022
- Anggota Partai Mahasiswa Demokrat Fisip UIN Walisongo 2022
- Anggota Fisip Sport Club UIN Walisongo 2019-2020
- Anggota PMII Fisip Uin Walisongo Semarang 2019-2020

Semarang, 17 Februari 2023

Shelly Salamah